WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kota Ternate;

b. bahwa penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Ternate perlu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Sistem Inovasi Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Komite Inovasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 199).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Walikota adalah Walikota Ternate;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah;
7. Road Map Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Road Map SIDa adalah dokumen kebijakan yang memuat kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, kondisi SIDa yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi SIDa, fokus dan program prioritas SIDa; dan rencana aksi SIDa;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Maluku Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai tahun 2024;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Ternate adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Ternate untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Ternate adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate, yang selanjutnya disebut RKPD Kota Ternate adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Ternate untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah; dan
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Road Map SIDa Kota Ternate adalah terwujudnya SIDa Kota Ternate berbasis Perdagangan dan Jasa yang didukung kerja sama sinergis Pemerintah, Pakar, Bisnis, dan Masyarakat.

Pasal 3

Sasaran Road Map SIDa Kota Ternate yaitu:

a. Tersusunnya kerangka umum inovasi dan bisnis melalui inventarisasi, regulasi, dan insentif yang mendukung perdagangan dan jasa;
b. Menguatnya kerjasama dan sinergisitas antara lembaga litbang pemerintah, swasta, lembaga akademik, dan masyarakat dengan umkm/pelaku usaha;
c. Meningkatnya difusi inovasi antarpemangku kepentingan dengan penggunaan teknologi informasi;
d. Menguatnya budaya inovasi melalui pengembangan kewirausahaan;
e. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan yang mendorong kemandirian dan pengembangan inovasi klaster usaha; dan
f. Berkembangnya inovasi layanan pariwisata dan jasa pendukung industri yang berdaya saing dan berkualitas internasional.

BAB III
ROAD MAP SIDa KOTA TERNATE
TAHUN 2021-2026

Pasal 4

Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Kondisi SIDa Saat Ini;
BAB II Tantangan dan Peluang SIDa;
BAB III Kondisi SIDa Yang Akan Dicapai;
BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ;
BAB V Fokus, Prioritas dan Program;
BAB VI Rencana Aksi SIDa.

Pasal 5

Strategi yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan SIDa di Kota Ternate, yaitu:

a. Membangun basis data inovasi daerah;
b. Menyusun regulasi yang mendukung inovasi;
c. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai upaya untuk mendorong kegiatan yang inovatif;
d. Melaksanakan kegiatan bersama yang dapat menguatkan jejaring antarpemangku kepentingan;
e. Membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antarpemangku kepentingan;
f. Menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal hingga tingkat akar rumput;
g. Membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif;
h. Membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga;
i. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional; dan
j. Meningkatkan pemahamanan dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.

Pasal 6

Isi beserta uraian Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 466.D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TENTANG : ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021-2026

BAB I
KONDISI SIDa DAERAH SAAT INI

1.1 PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian global berpengaruh cukup signifikan terhadap esensi pembangunan ekonomi masyarakat yang menekankan pada aspek pengetahuan dan inovasi. Pembangunan aspek ekonomi tersebut dikenal dengan istilah Perekonomian Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Economy*). Negara yang pembangunannya bertumpu pada peningkatan dan kehandalan sumber daya manusia, ternyata mempunyai perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan negara yang mengandalkan sumber daya alam. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura menitikberatkan perkembangan ekonomi mereka ke *knowledge-based economy,* dan berhasil memenangkan persaingan global, walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Knowledge-based economy adalah perekonomian yang secara langsung didasarkan atas produksi, distribusi serta penggunaan knowledge. Salah seorang pakar manajemen, Peter F. Drucker, menyatakan bahwa informasi dan pengetahuan akan menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi di masa depan (Drucker, Peter F. *The age of Discontinuity: Guidelines to out Changing Society*, 1992).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula cara pandang manusia dalam berpikir dan berkreasi. Informasi dan pengetahuan menjadi pondasi bagi perekonomian modern yang mampu mempengaruhi proses kerja, perilaku tenaga kerja, dan konsumen. Bank Dunia (*The World Bank*) menyatakan bahwa *knowledge-based economy* merupakan model ekonomi yang menstimulasi kreativitas, kreasi, penyemaian, serta penerapan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Untuk mengukur dan memonitor perkembangan knowledge-based economy, Bank Dunia menggunakan indeks yang disebut dengan *The Knowledge Economy Index* (KEI), dimana terdapat empat pilar yang menjadi dasar penilaian, yaitu:

- Kerangka institusi/organisasi serta insentif ekonomi untuk menghasilkan efisiensi dalam pemanfaatan pengetahuan dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- Masyarakat yang terdidik dan terlatih, yang mampu menciptakan, berbagi dan memanfaatkan pengetahuan dengan baik.
- Sistem infrastruktur teknologi dan inovasi yang efisien, baik bagi perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan, dan organisasi lain, dalam penciptaan teknologi baru, sehingga mampu bersaing dalam lingkungan global.
- Teknologi informasi dan komunikasi yang mampu memfasilitasi karya kreatif serta pengembangan dan cara melakukan proses informasi.

Undang-Undang No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3Iptek) serta Peraturan Bersama Menteri Negara Ristek dan Teknologi Nomor 03 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, sudah menggambarkan bahwa pengembangan sistem inovasi merupakan agenda yang penting untuk dilaksanakan. Sehingga peran daerah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem inovasi merupakan hal penting dan perlu sebagai upaya peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing merupakan salah satu agenda yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang lebih jauh lagi bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Suatu negara tidak dapat berdiri atas dasar unsur ekonomi berlandaskan sumberdaya alam saja, melainkan ditentukan oleh aktivitas warganya berdasarkan penciptaan dan pemanfaatan pengetahuan.

Pandemi COVID-19 menjadi momok yang menakutkan untuk masyarakat termasuk Kota Ternate. Sebanyak 2.276 jiwa telah terkonfirmasi positif dengan 2.410 jiwa yang telah dinyatakan sembuh dan 69 orang meninggal dunia di-update data pada 2 Agustus 2021. Beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara telah melakukan pembatasan sosial ditengah masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap jalannya perekonomian yang ada di Kota Ternate. Sektor UMKM menjadi salah satu yang merasakan dampak dari adanya COVID-19, dikarenakan mereka tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Beberapa sektor lain justru tidak begitu berdampak dan sebaliknya mengalami peningkatan seperti sektor jasa, logistik makanan dan minuman. Kondisi pandemi COVID-19 sedikit memaksa kita untuk melakukan segala aktivitas mengunakan media elektronik. Hal ini sejalan dengan kondisi industri di Indonesia yang telah memasuki masa Industri 4.0.

Kota Ternate merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Maluku Utara (terdapat 10 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku UTara, terdiri dari 2 kota dan 8 kabupaten). Luas wilayah Kota Ternate hanya 0,35% dari luas wilayah Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate merupakan Kota Kepulauan dan merupakan salah satu simpul strategis sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara. Jarak Kota Ternate ke Ibu Kota Sofifi adalah 20,56 Km. Kota Ternate dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan yang akibatnya menjadikan perekonomian bergantung hanya pada sektor jasa perdagangan. Saat ini ekonomi tak lagi dapat bergantung pada *resources based economy* atau ekonomi berbasis sumber daya alam melainkan bergantung pada *knowledge based economy* atau ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi saat ini tidak lagi terbatas baik ruang maupun waktu dikarenakan adanya teknologi. Setiap tindakan ekonomi yang dilakukan dalam berbisnis harus mampu mencerna setiap bentuk permasalahan kecil sampai permasalahan yang paling kompleks, seperti misalnya mengambil kebijakan moneter, distribusi pendapatan, serta permasalahan ekonomi lainnya.

Sumber daya manusia menjadi faktor paling utama dalam perekonomian terutama pada industri 4.0 dan masa pandemi COVID-19 ini. Pertumbuhan ekonomi kedepan dapat dilihat dari kondisi sumber daya manusia saat ini. Saat fase *work from home* ini seharusnya bukan menjadi penghambat dalam melakukan aktivitas dan perkembangan diri. Pengembangan inovasi mengalami persaingan yang sangat ketat dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing daerah, strategi sistem inovasi nasional salah satunya adalah MP3EI 2011-2025 (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia 2011-2025) yang membagi wilayah-wilayah di Indonesia menjadi koridor-koridor pembangunan yang didasarkan pada “potensi lokal” di wilayah tersebut. Untuk menindaklanjuti Renstra nasional

tersebut, sudah selayaknya pemerintah daerah mendukung dengan pengembangan sistem inovasi di tingkat daerah.

Road Map Sistem Inovasi Daerah-SIDa merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas. Sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai dan mendifusikan teknologi-teknologi baru (Freeman, dalam Taufik, 2005). Pengertian sistem dalam pembahasan ini merupakan istilah yang menunjukkan cara pandang dengan sadar melakukan suatu kesatuan aksi yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks inovasi. Pandangan lain terdapat pada Llerena dan Matt (2005) yang lebih jelas menjabarkan bahwa sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun beberapa institusi berbeda yang berkontribusi bersama dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru serta menyediakan kerangka kerja dengan cara pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses inovasi.

Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah telah mengamanatkan kepada semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan Kebijakan Penguatan SIDa. Kebijakan penguatan SIDa merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIP Daerah)/RPJPD dan RPJMD.

Kota Ternate sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional menyusun Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 pada tahun anggaran 2021, bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. Road Map disusun oleh Tim Strategis dan Kelompok-kelompok kerja sesuai dengan arahan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Teknologi dengan mengacu pada agenda kebijakan inovasi dengan pilar-pilar implementasinya. Kebijakan SIDa Kota Ternate yang disusun dan ditetapkan harus sinkron serta selaras dengan RPJPD dan RPJMD, sehingga Road Map SIDa Kota Ternate 2021-2026 pun harus sinkron dan selaras dengan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah untuk lima tahun yang akan datang berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate, Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Komite Inovasi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 186);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210).

1.1.3 Hubungan Antar Dokumen

Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, telah mengamanatkan kepada semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menetapkan Kebijakan Road Map SIDa. Kebijakan SIDa merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIP)/RPJPD dan terintegrasi dalam RPJMD.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan

tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RPJMD Kota Ternate merupakan penjabaran atas kebijakan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kota Ternate.

Penyusunan RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 diprioritaskan pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah utamanya pulau di luar Pulau Ternate, yaitu Hiri, Moti dan Batang Dua yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih maksimal lagi, sehingga secara merata dapat dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Ternate dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian pula, keseimbangan pembangunan daerah baik dari segi sosial budaya, perekonomian, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan Kota Ternate. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan di Kota Ternate lebih diarahkan pada model pembangunan horizontal dimana pelaksanaan pembangunan di setiap bidang pembangunan akan memiliki porsi yang proporsional dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan mempertimbangkan masih adanya kesenjangan antar wilayah di Kota Ternate. Melalui pendekatan pembangunan yang demikian, diharapkan akan membangun kemandirian dan tercipta suatu keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, sosial dan keseimbangan antar dan antara wilayah, serta mendorong terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Upaya-upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 merupakan tujuan bersama Kota Ternate, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Ternate akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance* and *clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi *stakeholder-stakeholder* atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Ternate. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial. Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Ternate tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Ternate sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Ternate 2021-2026 yang berkaitan dengan kewilayahan, berpedoman pada RTRW Tahun 2012-2032. Penyusunan telah memperhatikan dokumen RTRW yang di dalamnya berisi tentang bagaimana mewujudkan perencanaan struktur ruang terkait dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan, air minum dan transportasi publik. Selain itu

juga membahas perwujudan pola ruang yang membahas tentang pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya dimana didalamnya membahas rencana pengembangan wilayah dalam meningkatkan perekonomian dan pariwisata. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kota Ternate berdasarkan potensi wilayahnya. Selain itu pada proses penyusunan RPJMD juga telah mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah mencermati khususnya tentang program yang terkait dengan pengembangan sentra industri, penyediaan air baku, sarana dasar perkotaan, pemakaman, PKL, perdagangan, pertanian dan perkebunan, jalan dan jembatan, budaya sebagai sektor pariwisata, pengendalian banjir dan rob serta pelayanan angkutan umum. Hal ini untuk menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan RPJMD Kota Ternate juga tidak terlepas dari prioritas kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara. Aspek keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, yaitu dengan melakukan penyelarasan terhadap prioritas pembangunan terutama untuk wilayah Kota Ternate. Kebijakan pembangunan Provinsi Maluku Utara untuk lima tahun dapat dilihat dalam misi pembangunannya. RPJMD Kota Ternate 2021-2026 juga memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024.

Kebijakan Road Map SIDa Kota Ternate yang disusun dan ditetapkan harus sinkron serta selaras dengan RPJPD dan RPJMD, sehingga Road Map SIDa Kota Ternate 2021-2026 pun harus sinkron dan selaras dengan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. Fokus dan Program Prioritas SIDa Kota Ternate harus selaras dengan fokus dan prioritas program di dalam RPJMD Kota Ternate 2021-2026.

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini sebagai penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah untuk lima tahun, berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan yang ada dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pada Pemerintah Kota Ternate. RKPD ini secara teknis dan operasional memuat prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Kota Ternate. Terkait dengan hal ini, sikronisasi Rencana Aksi Road Map SIDa Kota Ternate 2021-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah pada kurun waktu perencanaan tahun 2021-2026.

1.2 GAMBARAN UMUM KOTA TERNATE

Kota Ternate merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Maluku Utara yang memiliki berbagai sumber daya alam dan beranekaragam kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Oleh karena itu, potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kesejahteraan rakyat akan terbangun secara konsisten dan merata jika segenap insan di Kota Ternate berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dirinya untuk mandiri sekaligus membangun

daya saing daerah, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menggapai cita-citanya yakni meningkatnya taraf kehidupan keluarga secara sosial ekonomi dalam masyarakat.

Sebagai pusat perekonomian Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate memiliki segala potensi untuk maju dan bersinar, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional atau bahkan internasional. Namun, berbagai potensi itu terkesan belum terasah maksimal. Kota ini juga membawa narasi sejarah, yang tak hanya penting dalam skala nasional, tetapi dunia. Sejarah mencatat, Ternate menjadi pintu masuk bangsa-bangsa Eropa ke Kepulauan Maluku dan Nusantara pada era penjelajahan dan penaklukkan dunia pada abad ke-16. Sejumlah benteng bangsa Eropa di Ternate menjadi saksi bisu persaingan dan perebutan pengaruh pada abad kolonialisme itu, pada saat Eropa begitu haus akan rempah-rempah.

Kota Ternate yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada potensi-potensi unggulan yang ada di Kota Ternate. Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan kebijakan dan peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam mengatur jalannya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan perencanaan yang efektif dengan partipasi para pelaku pembangunan secara terkoordinir.

1.2.1 Kondisi Geografis

Wilayah Kota Ternate dengan luas wilayah 5.709,72 km^2 terdiri dari perairan 5.547,55 km^2 dan daratan 162,17 km^2, yang mencakup delapan kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Ternate 17,39 km^2, Kecamatan Moti 24,78 km^2, Kecamatan Batang Dua 29,03 km^2, Kecamatan Hiri 6,69 km^2, Kecamatan Ternate Barat 33,88 Km^2, Kecamatan Ternate Selatan 20,22 km^2, Kecamatan Ternate Tengah 13,26 km^2, dan Kecamatan Ternate Utara 13,92 km^2 serta Hutan Lindung 2,99 km^2. Secara astronomis, Kota Ternate terletak diantara 0°25'41,82"-1°21'21,78" Lintang Utara dan antara 126°7'32,14" - 127°26'23,12" Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kab. Halmahera Selatan
- Sebelah Timur : Pulau Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi

Kota Ternate merupakan daerah kepulauan terdiri dari 8 (delapan), 5 (lima) Pulau besar diantaranya adalah pulau berpenghuni (Ternate, Moti, Hiri, Mayau dan Tifure) sedangkan 3 (tiga) pulau kecil lainnya tidak dihuni yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida. Sebagaimana ciri daerah kepulauan yang banyak memiliki kelurahan yang memiliki pantai, wilayah ini juga memiliki ciri yang sama dimana dari 78 kelurahan yang tersebar di Kota Ternate, terdapat 56 kelurahan (71.79%) yang berada di daerah pesisir (*beach village*) dan 22 kelurahan lainnya (28,21%) berkarakter bukan daerah pesisir pantai (*non beach village*).

Tabel 1.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Data BPS	
		Luas Wilayah (Km^2)	Persentase (%)
1	Pulau Ternate	17,39	6,54
2	Moti	24.78	15.28

3	Pulau Batang Dua	29.03	17.90
4	Pulau Hiri	6.69	4.12
5	Ternate Barat	33,88	20,89
6	Ternate Selatan	20,22	12,47
7	Ternate Tengah	13,26	8,18
8	Ternate Utara	13,92	10,44
Jumlah		**162.17**	**100**

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Ternate

Sumber: RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032

1.2.2 Topografi dan Kemiringan Lahan

Kondisi topografi lahan kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak ditengah pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh disekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar diatas 40% yang mengerucut kearah puncak gunung Gamalama terletak ditengah-tengah pulau. Di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% sampai 8%.

Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi disekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 m dari garis pantai sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup dalam dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada. Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi topografi kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi lebih dari 700 M).

Tabel 1.2
Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kota Ternate

No	Nama Pulau	Kelurahan		Ketinggian (meter)		
		Pantai	Bukan Pantai	0 - 499	500 - 699	700 +
1	Pulau Ternate	5	1	6	-	-
2	Moti	6	-	6	-	-
3	Pulau Batang Dua	6	-	6	-	-
4	Ternate Selatan	11	6	17	-	-
5	Ternate Tengah	4	12	16	-	-
6	Ternate Utara	11	3	14	-	-
7	Ternate Barat	7	-	7	-	-
8	Pulau Hiri	6	-	6	-	-
Jumlah		**56**	**22**	**78**	**-**	**-**

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut:

1. Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
2. Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.

3. Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.
4. Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

1.2.3 Geologi

Pulau Ternate sebuah pulau yang terbentuk karena proses pembentukan gunung api yang muncul dari dasar laut, sebagian berada di bawah muka laut dan sebagian lagi muncul di permukaan laut. Pulau-pulau lain yang merupakan bagian dari gunung ini adalah Pulau Hiri, terletak di sebelah utara, Pulau Tidore dan Pulau Maitara, terletak bagian selatan. Bentuk Pulau Ternate yang merupakan bagian dari sebuah gunung, maka secara umum morfologinya dapat dibagi menjadi 3 satuan morfologi. Pembagian satuan morfologi tersebut sebagai berikut:

1. Morfologi Kaki Gunung Gamalama

   Merupakan daerah kaki gunung api yang datar sehingga hampir datar, terletak di kaki timur, utara dan selatan dari gunung Gamalama dan melampar memajang sejajar pantai. Dilihat dari bentuk pendataran pantai ini, proses awalnya adalah adanya proses erosi yang terjadi di permukaan tubuh gunung api tersebut, kemudian material yang tererosi diendapkan ke tempat yang kemiringan lerengnya agak landai, pada bagian tubuh gunung terjal material erosi akan masuk ke dalam laut sehingga terbentuk endapan. Kemiringan lereng gunung api ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pedataran di pulau Ternate yaitu yang paling luas adalah pedataran Timur sekarang menjadi pusat Kota Ternate, pedataran Selatan dan Utara yang relatif kecil. Berikut kondisi pedataran di pulau Ternate:

   a. Pedataran Kota Ternate Terletak dikaki Timur dengan kemiringan lereng relatif lebih kecil yaitu < 8%, sedangkang bagian Barat lebih terjal > 8%, hal ini memberi kesempatan pelapukan batuan terendapkan. Pedataran pantai di Timur terbentuk cukup luas memanjang sejajar pantai dengan arah Utara-Selatan, lebar sekitar 1.000 meter lebih. Karena kondisinya cukup strategis dari beberapa aspek maka dipilih sebagai pusat permukiman, perkantoran dan jasa perdagangan. Kota Ternate yang sudah berkembang sejak jaman dulu, perkembangan permukiman dan infrastruktur lainnya sekarang berkembang semakin ke Selatan dan Utara. Pedataran ini tersusun oleh material lumpur, lempung, pasir dan pelapukan dari batuan vulkanik.
   b. Pedataran Kastela Pedataran ini terletak di kaki Selatan gunung Gamalama memanjang sempit sejajar pantai dengan lebar sekitar 500 meter, kemiringan lereng < 5%, merupakan pesisir pantai disebelah Utaranya langsung berbatasan dengan perbukitan yang relatif terjal. Hal ini tersusun oleh batuan vulkanik jenis stufa.
   c. Pedataran Sulamadaha Pedataran ini terletak di kaki Utara gunung Gamalama, tidak terlalu luas hanya berupa pedataran mirip cekuk, disekitarnya ke arah daratan membentuk perbukitan relatif bergelombang. Pedataran ini tersusun oleh batuan vulkanik breksi dan stufa.

2. Morfologi Tubuh Gunung Gamalama

   Satuan ini merupakan bagian terbesar dari morfologi gunungapi di pulau Ternate, mulai dari kaki hingga tubuh pada elevasi 1000 meter, dengan kemiringan lereng antara 8% - 40%. Di bagian Timur – Utara tubuh gunung Gamalama kemiringan lereng relatif lebih landai dibandingkan di bagian Barat. Pada morfologi ini dijumpai 2 buah kaldera yang dikenal dengan danau Tolire dan Laguna, hal ini menunjukan bahwa gunung Gamalama pernah terbentuk kawah-kawah lain selain di puncak gunung. Batuan pembentuk morfologi ini adalah endapan vulkanik yang berasal dari gunungapi itu sendiri, yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa dan pasir. Antara ketiga batuan tersebut dijumpai dalam keadaan selang seling.
3. Morfologi Puncak Gunung Gamalama

   Satuan ini merupakan bagian paling atas puncak gunung, pada elevasi di atas 1.000 meter dengan kemiringan lereng > 40%, di daerah puncak memperlihatkan perpindah titik kegiatan dari Selatan ke Utara. Menurut Bronto S, 1990, sejarah gunung Gamalama awalnya dimulai terbentuknya pematang kawah terluar (tertua) berada di bagian tenggara disebut Bukit Melayu. Kemudian pematang kawah tengah membuka ke arah utara dikenal dengan nama Bukit Keramat atau Bukit Mediana (+1.669m), selanjutnya terbentuk kawah baru berada dibagian Utara berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 300 meter, puncak setinggi +1.715 m dikenal dengan nama Gunung Arfat atau Piek van Ternate. Pulau ternate dilihat dari statigrafinya, tersusun oleh Gunung Api Holosen terdiri dari breksi vulkanik, lava andesit, pasir dan tufa.

Jenis tanah mayoritas adalah tanah regosol di Pulau Ternate, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Sedangkan jenis tanah rensina ada di Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, dan Pulau Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah Pulau vulkanis dan pulau karang.

1.2.4 Hidrologi

Kota Ternate memiliki 2 buah danau air tawar yaitu danau Laguna yang terletak dipesisir pantai timur pulau Ternate (sebelah Selatan pusat Kota Ternate) dan danau Tolire Jaha terletak arah Barat Daya Kota Ternate. Keberadaan danau Laguna dan danau Tolire Jaha di Kota Ternate merupakan suatu anugerah bagi masyarakat Kota Ternate. Namun pemanfaatannya hingga kini belum semaksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dengan volume air yang begitu besar (data danau Laguna ± 3.547,894 m3 atau ± 3,55 Milyar Liter), maka danau ini memiliki potensi sebagai sumber air bersih yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate. Untuk danau Laguna saat ini telah dilakukan eksplorasi pemanfaatannya sebagai sumber air bersih oleh pemerintah daerah dimana telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yaitu instalasi Produksi, Transmisi dan Distribusi.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber air bersih di pulau Ternate saat ini masih mengandalkan sumber air tanah dalam (sumur dalam) dan sebagian kecil lagi berupa mata air. Hal ini cukup riskan dimana pertumbuhan pembangunan di Kota Ternate sangat pesat yang diikuti oleh laju pertambahan penduduk yang signifikan setiap tahun, dikhawatirkan 10 tahun lagi lahan terbuka sebagai daerah resapan air telah berubah fungsi sebagai kawasan terbangun/hunian yang menyebabkan potensi air tanah akan semakin berkurang. Diharapkan setelah beroperasinya IPAM ini maka sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate dapat

terpenuhi saat ini maupun masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah riil berupa tindakan penyelamatan untuk menjaga kelestarian ekosistim hutan di kawasan sekitar danau Laguna dan danau Tolire Jaha.

Selain potensi sumber daya air danau, Kota Ternate memiliki sumber mata air antara lain Mata Air Ake Gaale, Mata Air Santosa, Mata Air Tege-Tege, Mata Air Ake Rica, dan Mata Air Minta.

1.2.5 Klimatologi

Musim di wilayah Kota Ternate beriklim tropis sehingga keadaan iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai ciri indikasi umum iklim tropis. Di wilayah ini juga mengenal dua musim yaitu musim utara-barat dan musim timur-selatan yang biasanya diselingi dengan dua kali masa pancaroba disetiap tahun. Melalui Stasiun Meteorologi dan Geofisika Ternate, selama tahun 2020 diperoleh informasi tentang klimatologi yakni; temperatur rata-rata 27°C, dengan suhu maksimum 32°C dan suhu minimum 24°C.

Tabel 1.3
Temperatur Rata-rata Kota Ternate Tahun 2016- 2020

Tahun	Temperatur		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2016	28	33	24
2017	27	31	24
2018	28	32	24
2019	27	33	24
2020	27	32	24

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Kelembaban udara rata-rata 86,00 %, tingkat penyinaran 64,00 % dan kecepatan angin rata-rata 8 km/jam dengan kecepatan maksimum mutlak rata-rata 31 knot terjadi di bulan November. Kelembaban udara paling tinggi terjadi pada yakni pada bulan November sebesar 96 % dan yang terendah terjadi pada bulan Februari yakni 83 %, sedangkan tingkat penyinaran paling sering terjadi pada bulan Februari yaitu 79 %.

Curah hujan tertinggi di Kota Ternate pada tahun 2020 terjadi di bulan Juli yaitu sebesar 291 mm^3, sementara curah hujan terendah terjadi di bulan Januari sebesar 45,1 mm^3. Begitu juga jumlah hari hujan tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu 21 hari dan terendah pada bulan Februari yakni 3 hari.

Tabel 1.4
Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Tingkat Penyinaran Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelembaban Udara (persen)					
- Maksimum	94	102	94	95	91
- Minimum	60	69	56	63	78
- Rata-rata	82	86	82	81	86

Tekanan Udara (mb)	1.012,3	1.011,7	1.011,7	1.011	1.108
Kecepatan Angin (knot)	4	5	4	6	8
Curah Hujan (mm^3)	228	151	228	146	179
Penyinaran Matahari (persen)	53	72	53	71	64

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

1.2.6 Penggunaan Lahan

Pola pemanfaatan lahan pada suatu wilayah merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan. Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Bagian wilayah Kota Ternate selain merupakan kawasan lindung juga merupakan kawasan budidaya yang telah disesuaikan dengan penggunaan lahan eksisting wilayah Kota Ternate.

Tabel 1.5
Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Fungsi Hutan
Kota Ternate (hektar), Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Hutan Lindung	4.403,83	4.342,11	4.403,82	4.392,01	4.392,01
Suaka Alam dan Pelestarian Alam	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Hutan Produksi Terbatas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Hutan Produksi Tetap	522,57	462,20	522,56	379,56	379,56
Hutan Produksi Dapat Dikonversi	5.424,23	5.398,92	5.424,23	5.366,65	2.494,93
Areal Penggunaan Lain / Tubuh Air	n/a	2.319,42	5.999,89	44,67	n/a
Jumlah Luas Hutan dan Perairan	**10.350,63**	**12.522,65**	**16.350,50**	**10.182,89**	**7.266,50**

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Sumber daya lahan di Kota Ternate dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kota Ternate terdiri atas lahan hutan, perkebunan rakyat, permukiman, padang rumput/alang-alang, danau dan lain sebagainya.

1.2.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Dari tinjauan aspek potensi pengembangan wilayah, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Kota Ternate memiliki nilai ekonomis yang tinggi, diantaranya potensi tanaman perkebunan yang telah ada sejak zaman kolonial. Dulu kota Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Selanjutnya potensi tanaman pangan seperti jagung dan ubi kayu. Kedua jenis tanaman ini diminati oleh masyarakat Kota Ternate sebagai makanan utama selain nasi. Pada tahun 2020 luas panen jagung adalah 83,3 Ha, sedangkan untuk tanaman Hortikultura pada tahun 2020, luas panen cabai sekitar 66 Ha dengan hasil produksi panen nya sebanyak 303 kwintal. Luas panen tomat sekitar 46 Ha dengan hasil produksi sebanyak 743 kwintal Tanaman Biofarmaka di Kota Ternate meliputi jahe, laos, kencur dan kunyit. Produksi tanaman jahe sebesar 915 kg, laos sebesar 2.127 kg, kencur sebesar 580 kg dan kunyit sebesar 834 kg. Tanaman biofarmaka banyak ditanam di

kecamatan Ternate Selatan dan Ternate Tengah. Produksi buah-buahan di Kota Ternate meliputi buah mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya, salak, rambutan, nenas, nangka, sukun, jambu, belimbing, duku, alpukat dan sirsak. Buah dengan produksi terbanyak yaitu mangga dengan hasil produksi sebanyak 1.206 kwintal.

Potensi wilayah berikutnya yaitu tanaman perkebunan antara lain adalah kelapa, kayu manis, kakao, cengkih dan pala. Berdasarkan data yang diterbitkan BPS tahun 2020, luas produksi perkebunan untuk kelapa 566,1 Ha, kayu manis 4,59 Ha, kakao 9 Ha, cengkih 330 Ha dan pala sebesar 1.006 Ha. Demikian pula potensi peternakan, di mana kebutuhan daging sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga untuk memenuhinya pemerintah masih harus memasok pasokan daging dari luar wilayah Kota Ternate terutama dari Pulau Halmahera dan dari luar Maluku Utara, pada tahun 2020 populasi ternak di Kota Ternate yang paling banyak adalah Sapi dan Kambing dengan populasi sapi pada tahun 2020 sebanyak 3.282 ekor dan kambing 24.692 ekor.

Potensi berikutnya yang dimiliki oleh Kota Ternate adalah perikanan. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, laut merupakan sumber penghidupan yang menjanjikan. Banyak masyarakat Kota Ternate yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu tradisi masyarakat Kota Ternate yang menjadikan ikan sebagai makanan pendamping nasi yang wajib dikonsumsi setiap hari, membuat nelayan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Untuk mendukung pengembangan potensi perikanan, di Kota Ternate terdapat dua pelabuhan perikanan yaitu pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate Selatan dan pelabuhan perikanan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate. Berdasarkan data yang ada, produksi perikanan Kota Ternate tahun 2020 yang terbesar adalah kecamatan Ternate Utara yaitu sebesar 7.642 ton dan kecamatan Ternate Selatan sebesar 7.166 ton.

Sementara itu, sebagai kota yang mengusung moto sebagai kota jasa, memfokuskan pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. Sektor UKM yang berkembang di Kota Ternate adalah sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, perikanan, pertanian dan peternakan. UKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate selama 2020 sebanyak 13.765 unit, dengan 21.723 orang tenaga kerja. UKM sektor Perdagangan merupakan UKM yang paling banyak di Ternate, yakni sebanyak 9.058 unit, dengan serapan tenaga kerja sebesar 12.683 orang.

Sementara itu, untuk mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, Pemerintah Kota Ternate berusaha membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang perdagangan tersebut, sehingga sarana perdagangan pun setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sektor perdagangan, maka selain dari segi sarana perlu juga dibantu dari segi permodalan. Dari data yang ada menunjukan, bahwa pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang berbadan hukum berjumlah 976, yang terdiri dari perseroan terbatas sebanyak 183 unit, CV sebanyak 421 unit, Koperasi sebanyak 46 unit, dan perorangan sebanyak 326 unit.

1.2.8 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam didefinisikan sebagai pelindungan kawasan dengan tujuan untuk melindungi manusia dan aktivitas kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung berapi dan tsunami.

Berdasarkan data pada RTRW Kota Ternate Tahun 2012-2032, untuk mengidentifikasi kawasan rawan bencana di Ternate, perlu dilakukan pengamatan terhadap kondisi geologi yang menunjukkan adanya daerah rawan terhadap bencana, agar dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar akibat adanya bencana. Rencana kawasan rawan bencana Kota Ternate meliputi:

1. Kawasan rawan bencana gempa terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.
2. Kawasan rawan tanah longsor di Kota Ternate, terdapat pada Pulau Ternate dengan total luas 40,58 Ha di Kel. Afetaduma, Kel. Dorpedu, Kel. Togafu, Kel. Kalumata (kawasan galian C), Kel. Ngade, Kel. Tabona, Kel. Dufa-Dufa Bagian Barat, Kel. Akehuda Bagian Barat dan Kel. Kayu Merah Bagian Barat. Untuk Pulau Hiri dengan luas 6,4 Ha di Kel. Tafraka dan Kel. Mado-Faudu-Tomajiko.
3. Kawasan rawan banjir terdapat di Kelurahan Mangga Dua yaitu jalan Raya Mangga Dua kurang lebih 0,11 ha, Kelurahan Bastiong Talangame yaitu kawasan terminal dan pasar Bastiong kurang lebih 0,21 Ha, Kelurahan Bastiong Karance yaitu jalan Raya Bastiong dan jalan Pelabuhan Fery kurang lebih 0,45 Ha, Kelurahan Gamalama yaitu jalan Pahlawan Revolusi dan jalan Busoiri kurang lebih 1,25 ha, Kelurahan Jati yaitu jalan depan Hotel Amara kurang lebih 0,24 ha, Kelurahan Santiong yaitu di kawasan kuburan Cina kurang lebih 0,12 ha, Kelurahan Mangga Dua kurang lebih 0,04 ha.
4. Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi daerah rawan I, rawan II dan rawan III, yang meliputi:
    1) Kawasan rawan bencana terhadap aliran masa, berupa lahar/banjir, kemungkinan perluasan awan panas serta aliran lava dan rawan bencana terhadap hujan abu, tanpa memperhatikan arah tiupan angin dan kemungkinan lontaran batu (pijar) dengan radius 4,5 Km. Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan I terdapat di Kelurahan Dufa-dufa, Tabam, Tubo, Kulaba, Bula, Tobololo, Takome, Lotto, dan Kelurahan Togafo. Khusus untuk Kelurahan Kulaba, harus diwaspadai terhadap bahaya banjir pada musim penghujan. Disamping itu, pemukiman yang juga harus waspada terhadap kemungkinan perluasan lahar adalah Kelurahan Taduma, Dorpedu, Kastela dan Kel. Toboko dengan luas kurang lebih 1.028,29 Ha.
    2) Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan II terdapat di Sungai/barangka tepatnya di Kelurahan Sulamadaha hingga bagian timur laut yang berbatasan dengan Sungai Togorara. Alur Sungai yang termasuk kedalam kawasan ini adalah Sungai Togorara, Sungai Kulaba, Sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Kelawa, Sungai Tareba, Sungai Piatoe, Sungai Taduma dan Sungai Kastela. Pemukiman yang mungkin terancam terhadap bahaya lahar adalah Kelurahan Tubo,

Tafure, Kulaba, Tobololo, Takome dan Kelurahan Loto, rawan bencana terhadap lontaran batu (pijar), Hujan abu lebat adalah kelurahan Foramadiahi, Marikurubu (Lingkungan Air Tege-Tege dan Lingkungan Tongole), Buku Bendera dan Kelurahan Moya dengan luas kurang lebih 1.525,18 Ha.

3) Kawasan bencana III adalah kawasan yang letaknya terdekat dengan sumber bahaya dan sering terlanda awan panas, lontaran atau guguran batu (pijar) dan aliran lava. Berhubung sangat tinggi tingkat kewaspadaannya maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian tetap. Sebagian alur sungai utama yang termasuk ke dalam daerah ini dan merupakan sarana air untuk material letusan yang bersifat aliran adalah: Sungai Piatoe, Sungai Tareba dan Sungai Takome, Sungai Sososma, Sungai Ruba, Sungai Kulaba, serta sungai Togorara.

5. Sedangkan untuk daerah sangat rawan terhadap material lontaran atau guguran batu (pijar), meliputi daerah puncak dengan radius 2,5 km dari pusat letusan (Kawah Gn. Arfat). Di dalam kawasan rawan bencana III ini tidak terdapat beberapa pemukiman penduduk, yaitu:

   1) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami di sepanjang tepian pantai Kota Ternate.

   2) Kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.

1.2.9 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pertumbuhan penduduk Kota Ternate secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk Kota Ternate tahun 2019 sebanyak 233.208 jiwa. dibandingkan dengan tahun 2018, penduduk Ternate mengalami pertumbuhan sebesar 2,21 persen. Data jumlah penduduk Kota Ternate 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun

2014 sebanyak 207.789 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 233.208 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya pertambahan jumlah penduduk sekitar 25.419 jiwa selama kurun waktu 6 (Tahun) tahun terakhir.

Tabel 1.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2014-2019

No	Kecamatan	Tahun Perkembangan					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pulau Ternate	16.209	16.553	16.892	17.233	8.720	8.914
2	Moti	4.814	4.909	5.001	5.094	5.404	5.525
3	Pulau Batang Dua	2.712	2.762	2,812	2.861	3.055	3.123
4	Pulau Hiri	3.003	3.064	3.124	3.183	3.359	3.434
5	Ternate Selatan	71.476	73.263	75.019	76.794	78.300	80.046
6	Ternate Tengah	58.698	60.312	61.839	63.385	63.960	65.403
7	Ternate Utara	50.877	52.134	53.341	54.561	55.981	57.229
8	Ternate Barat			-	-	9.326	9.534
Jumlah Penduduk (jiwa)		207.789	212.997	218.028	223.111	228.105	233.208
Pertumbuhan Penduduk (%)		2,50	2,51	2,34	2.35	2,24	2,21

Sumber: BPS Kota Ternate, 2021

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Sensus Penduduk, dengan tujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karaketristik penduduk Indonesia menurut *de facto* dan *de jure,* serta menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk. Jumlah penduduk Kota Ternate hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 205.001 jiwa yang terdiri atas 103.119 jiwa penduduk laki-laki dan 101.882 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2020

Kecamatan		Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pulau Ternate	4.440	4.295	8.735	103,4
2	Moti	2.397	2.414	4.811	99,3
3	Pulau Batang Dua	1.434	1.357	2.791	105,7
4	Pulau Hiri	1.481	1.441	2.922	102,8
5	Ternate Barat	4.420	4.368	8.788	101,2
6	Ternate Selatan	37.309	37.020	74.329	100,8
7	Ternate Tengah	26.993	26.650	53.643	101,3
8	Ternate Utara	24.645	24.337	48.982	101,3
Ternate		**103.119**	**101.882**	**205.001**	**101,2**

Sumber: Sensus Penduduk 2020, BPS Kota Ternate, 2021

Sementara itu, jumlah rasio jenis kelamin Penduduk Kota Ternate pada tahun 2020 adalah 101,2. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi berada pada kelompok umur 0-4 dan 10-14 (108,1), sedangkan Rasio jenis kelamin terendah berada pada kelompok umur di atas 75 tahun (67,7). Rincian data tentang karakteristik penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada suatu wilayah.

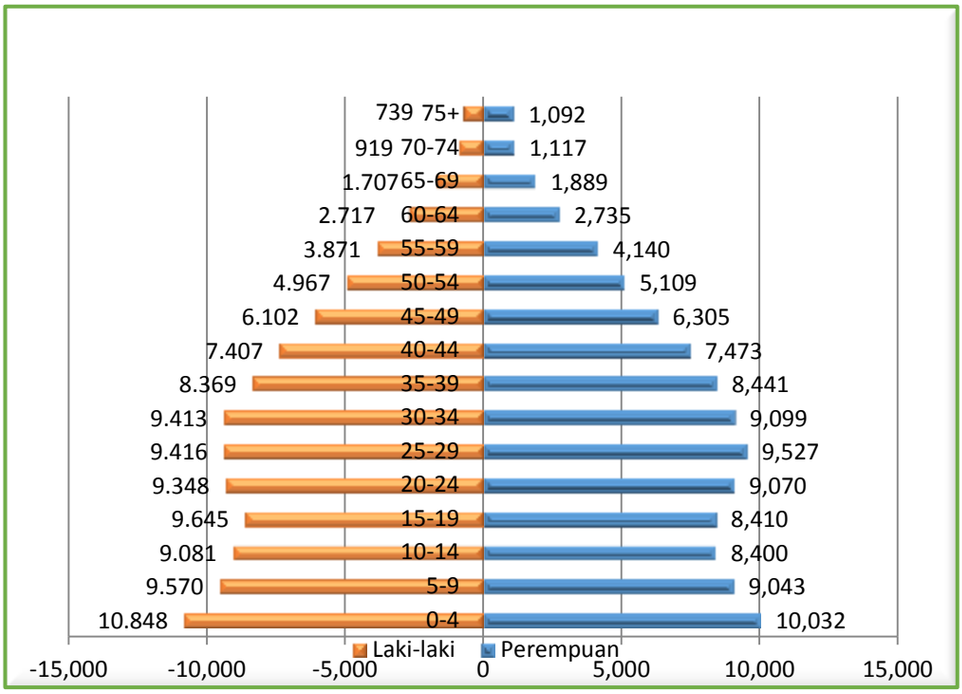

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Ditinjau dari angka kepadatan dan distribusi penduduk di Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh jumlah pertumbuhan penduduk dan luas wilayah daerah tersebut. Angka kepadatan penduduk ini bermanfaat untuk mengetahui daya tampung dari suatu daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta untuk menentukan strategi pembangunan yang dapat dikembangkan di masa datang.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Ternate pada tahun 2020 berjumlah 205.001 jiwa yang terditribusi pada 8 (delapan) kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah sebesar 74.329 jiwa atau sekitar 36,25% dari jumlah penduduk Kota Ternate, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.791 jiwa atau sekitar 1,36% dan Kecamatan Pulau Hiri dengan jumlah penduduk sekitar 2.922 jiwa atau sekitar 1,42% dari jumlah penduduk Kota Ternate.

Tabel 1.8
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2020

	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk Per km^2
1	Pulau Ternate	8.735	17,39	502,30
2	Moti	4.811	24,78	194,15
3	Pulau Batang Dua	2.791	29,03	96,14
4	Pulau Hiri	2.922	6,69	436,77
5	Ternate Barat	8.788	33,88	259,39
6	Ternate Selatan	74.329	20,22	3.676,01
7	Ternate Tengah	53.643	13,26	4.045,48
8	Ternate Utara	48.982	13,92	3.685,63
	Ternate	**205.001**	**162,17**	**1.264,11**

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Berdasarkan Tabel 1.8 menunjukkan distribusi dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata, akumulasi kepadatan penduduk Kota Ternate tahun 2020 mencapai 1.264,11 jiwa/Km^2. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ternate Tengah yaitu 4.045,48 jiwa/Km^2, kemudian disusul oleh Kecamatan Ternate Utara dengan kepadatan 3.685,63 jiwa/Km^2 dan Kecamatan Ternate Selatan dengan kepadatan 3.676,01 jiwa/Km^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan kepadatan rata-rata 96,14 jiwa/Km^2.

Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk tersebut dipengaruhi oleh perbandingan jumlah penduduk yang mendiami setiap kecamatan terhadap luasan wilayah kecamatan. Sedangkan secara keruangan, pada dasarnya distribusi dan kepadatan penduduk di Kota Ternate dipengaruhi oleh sistem pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta kemudahan aksesibilitas terhadap wilayah sekitarnya, sehingga distribusi penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Ternate Selatan.

1.3 GAMBARAN PEREKONOMIAN KOTA TERNATE

1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Ternate terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 2016-2020.

Grafik 1.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Ternate dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

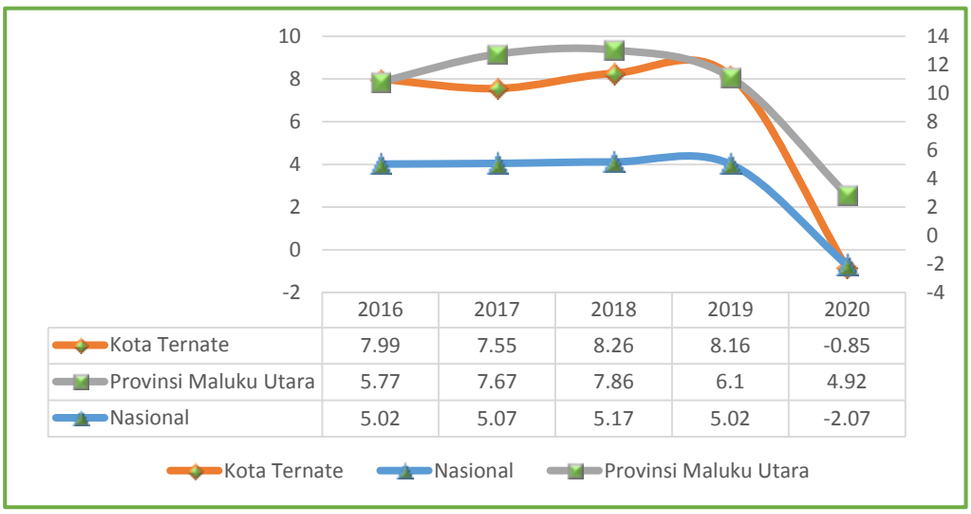

Sumber: Ternate Dalam Angka (diolah), 2021

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara

7,59% hingga 8,25%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 melambat sebesar -0,85%. Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Ternate sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kota Ternate selalu di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 8,26%, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar -0,85%.

1.3.2 Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Ternate tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 25,13% dan ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2019 yakni 26,42%, kemudian diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,15% dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 16,54% dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,13% dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 16,69%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 8 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel 1.9.

Tabel 1.9
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB
Kota Ternate Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,02	3,91	3,80	3,81	4,08
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
C	Industri Pengolahan	3,52	3,31	3,12	2,91	2,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,15	0,14	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	6,54	6,63	6,74	6,77	7,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,88	25,73	26,32	26,42	25,13
H	Transportasi dan Pergudangan	16,30	16,88	16,63	16,69	13,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,13	1,10	1,09	1,02
J	Informasi dan Komunikasi	7,77	7,73	7,72	7,58	8,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,98	6,95	6,84	6,68	7,31
L	Real Estate	0,22	0,23	0,24	0,23	0,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,74	0,75	0,74	0,75	0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,53	16,06	16,17	16,54	19,15
P	Jasa Pendidikan	5,05	5,27	5,13	5,04	5,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,14	3,22	3,23	3,28	3,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,90	1,89	1,91	1,93	1,98
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

1.3.3 Pertumbuhan PDRB

Indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2014 PDRB Kota Ternate sudah menggunakan tahun dasar terbaru yaitu tahun 2010. Selain itu, PDRB sudah di rinci menjadi 17 sektor lapangan usaha yang pada perhitungan sebelumnya hanya berdasarkan 9 sektor lapangan usaha. Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di suatu wilayah memberikan gambaran potensi perekonomian wilayah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ternate terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB ADHB Kota Ternate pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 10,54 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,07 triliun dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 10,61 triliun rupiah. Disamping itu, PDRB ADHK Kota Ternate tahun 2020 diperkirakan terjadi sedikit penurunan dibandingkan dengan PDRB ADHK tahun 2019. Pada tahun 2019, PDRB ADHK sebesar 7,28 triliun rupiah dan menurun pada tahun 2020 dengan perkiraan menjadi 7,22 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 0,85 persen. PDRB Kota Ternate disusun berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha. Kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki distribusi persentase terbesar dibanding kategori lainnya. Dengan kata lain, tiga kategori tersebut memiliki andil paling besar terhadap perekonomian Kota Ternate. Besaran distribusi persentase ketiga kategori tersebut pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 25,13 persen untuk kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, dan untuk kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 19,15 persen. Sementara kategori transportasi dan pergudangan mempunyai andil terhadap perekonomian Kota Ternate sebesar 13,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (Kategori G) masih menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian Kota Ternate.

Tabel 1.10
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha ADHB 2016-2020 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	316.733,5	399.765,0	368.410,7	404.980,5	430.481,8
Pertambangan dan Penggalian	5.375,1	6.175,1	6.938,2	7.721,3	7.974,3
Industri Pengolahan	277.049,2	287.769,5	302.309,8	309.052,7	283.566,6
Pengadaan Listrik dan Gas	11.132,1	13.161,9	13.714,0	14.742,8	15.537,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.976,8	6.504,2	6.842,0	7.233,3	7.835,6
Konstruksi	515.234,5	576.154,2	653.365,7	718.424,3	740.125,5
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.038.861,4	2.235.634,1	2.550.306,6	2.805.481,8	2.650.537,5
Transportasi dan Pergudangan	1.284.317,5	1.466.397,3	1.611.171,1	1.772.048,4	1.385.624,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.855,8	98.406,6	106.287,1	115.208,5	107.413,7
Informasi dan Komunikasi	612.285,6	671.765,2	748.147,6	804.823,1	861.723,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	549.659,4	603.705,1	662.804,7	709.227,6	770.839,4
Real Estate	17.654,5	20.147,5	22.878,5	24.691,5	23.585,6
Jasa Perusahaan	58.321,2	65.254,1	72.148,2	79.300,3	78.250,1
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.301.947,4	1.395.127,2	1.566.761,7	1.756.431,1	2.020.544,2
Jasa Pendidikan	397.678,8	457.845,3	497.183,7	534.633,2	562.017,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	247.483,5	280.124,3	313.233,6	348.276,4	394.130,2
Jasa Lainnya	149.653,1	164.534,2	185.324,2	205.212,7	209.103,4
TOTAL	**7.877.219,5**	**8.688.470,5**	**9.687.833,4**	**10.617.489,6**	**10.549.290,7**

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Tabel 1.11
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha ADHK 2016-2020 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	212.810,6	219.761,0	228.754,5	245.396,8	256.969,2
Pertambangan dan Penggalian	3.697,8	4.086,5	4.504,2	4.950,7	4.944,4
Industri Pengolahan	213.039,3	216.953,0	224.867,3	228.243,5	210.982,5
Pengadaan Listrik dan Gas	9.761,3	10.188,9	10.371,1	11.135,1	11.607,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.780,5	5.160,1	5.426,6	5.718,5	6.170,2
Konstruksi	390.561,1	423.212,2	465.002,7	507.542,3	517.141,4
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.491.361,8	1.614.531,6	1.765.969,7	1.938.210,8	1.793.908,0
Transportasi dan Pergudangan	877.991,4	962.332,2	1.046.436,3	1.122.408,7	892.949,8
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	64.360,0	70,949,5	76.105,1	82.024,0	76.559,6
Informasi dan Komunikasi	545.345,9	589.791,2	637.917,2	704.550,4	778.260,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	400.158,7	423.112,8	448.368,0	472.006,7	514.482,8
Real Estate	13.552,6	14.974,5	16.352,5	17.569,5	16.689,8
Jasa Perusahaan	46.181,5	50.412,1	54.023,0	57.665,3	56.510,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	930.913,2	989.113,3	1.078.581,4	1.167.562,4	1.330.430,4
Jasa Pendidikan	275.956,6	295.967,2	311.024,2	325.215,7	336.759,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187.749,1	206.125,4	224.600,4	244.264,3	266.240,5
Jasa Lainnya	117.213,2	125.783,4	138.002,4	151.542,5	153.176,5
TOTAL	**5.785.434,4**	**6.222.453,8**	**6.736.306,7**	**7.286.007,2**	**7.223.782,1**

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan data PDRB harga konstan, hal ini untuk menghindari terjadinya perubahan harga. Berdasarkan angka perkiraan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2020 menurun dibanding laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Pada tahun 2019, perekonomian Kota Ternate tumbuh sebesar 8,16 persen, dan menurun menjadi -0,85 persen di tahun 2020.

Tabel 1.12
Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate Tahun 2016 - 2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,89	3,27	4,05	7,28	4,72
B	Pertambangan dan Penggalian	8,06	10,51	10,22	9,91	-0,13
C	Industri Pengolahan	6,65	1,84	3,75	1,50	-7,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,02	4,38	1,79	7,37	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,31	7,94	5,11	5,38	7,90
F	Konstruksi	6,29	8,36	9,87	9,15	1,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,36	8,26	9,95	9,75	-7,45
H	Transportasi dan Pergudangan	9,25	9,61	7,80	7,26	-20,44
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	12,72	10,24	7,27	7,78	-6,66
J	Informasi dan Komunikasi	10,35	8,15	8,16	10,45	10,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,44	5,74	5,97	5,27	9,00
L	Real Estate	9,60	10,48	9,21	7,44	-5,01
M,N	Jasa Perusahaan	9,23	9,16	7,16	6,74	-2,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,30	6,25	9,05	8,25	13,95
P	Jasa Pendidikan	7,41	7,25	5,09	4,56	3,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,39	9,79	8,96	8,76	9,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,63	7,31	9,71	9,81	1,08
Produk Domestik Regional Bruto		**7,99**	**7,55**	**8,26**	**8,16**	**-0,85**

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

1.3.4 Laju Inflasi

Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga suatu barang dan jasa yang pada umumnya terjadi secara terus menerus. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Upaya stabilisasi harga saat ini memiliki tantangan yang cukup berat, tidak hanya pengendalian di sisi moneter namun diperlukan pula berbagai dukungan kebijakan di bidang fiskal. Secara umum, inflasi yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan permasalahan struktural yang membutuhkan koordinasi kebijakan, misalnya rentannya produksi pangan terhadap kondisi cuaca, struktur pasar dan berbagai masalah lainnya. Khusus untuk wilayah Maluku Utara, permasalahan infrastruktur, saluran distribusi dan kondisi geografis yang sulit menjadi faktor dominan dalam pengendalian inflasi.

Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang diinginkan.

Tingginya pendapatan perkapita masyarakat Ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflasi di Kota Ternate lima tahun terakhir mengalami fluktuaktif dimana pada tahun 2016 inflasi Kota Ternate adalah sebesar 1,91 persen. Tahun 2016 pergerakan inflasi Kota Ternate mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,91% (turun dari tahun 2015 yakni

sebesar 4,52%). Dan pada tahun 2017 laju inflasi sedikit meningkat menjadi 1,97%, sementara itu pada tahun 2018 inflasi Kota Ternate meningkat pada angka 4,12%. Sedangkan tahun 2019, inflasi Kota Ternate mengalami penurunan menjadi 2,02%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,13%. Gambar 2.4 berikut adalah gambaran perkembangan Inflasi Kota Ternate dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Grafik 1.3
Perkembangan Inflasi Kota Ternate
Tahun 2016-2020

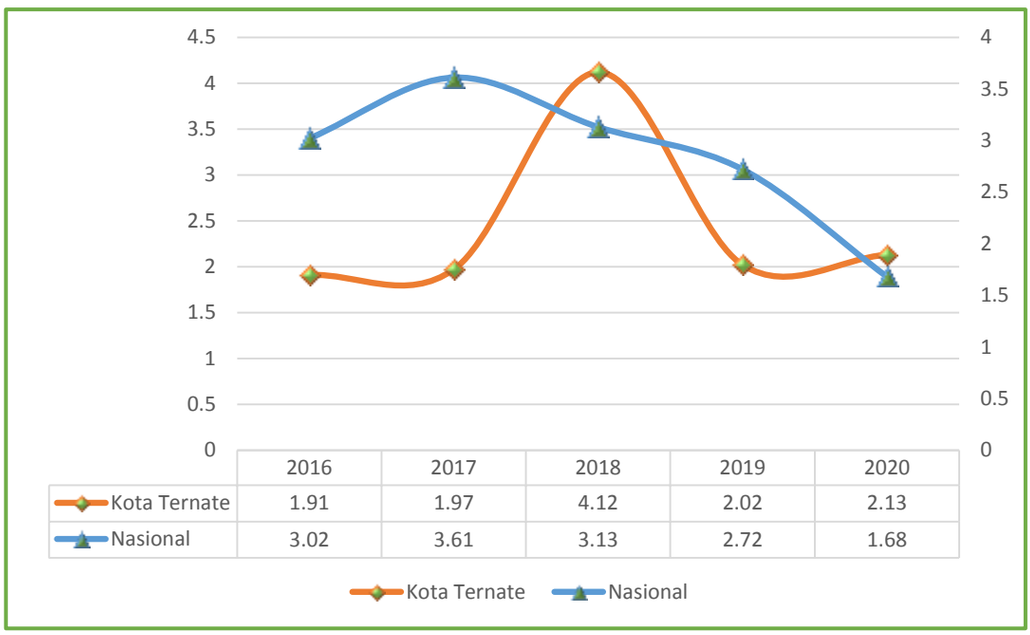

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Pada Desember 2020, Kota Ternate mengalami inflasi di enam kelompok pengeluaran dan deflasi di satu kelompok lainnya. Adapun inflasi di enam kelompok pengeluaran tersebut yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,54 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,03 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,70 persen dan kelompok Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,09 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,14 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,02; kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 0,18 dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,44.

1.3.5 Nilai PDRB Perkapita

PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Oleh karena itu, jika asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir ke luar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka nilai pendapatan regional diasumsikan sama besar dengan nilai PDRB.

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Ternate pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 51,45 juta rupiah atau meningkat sekitar 13,02 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 45,52 juta rupiah.

Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan. Nilai riil PDRB per kapita terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 31.242.526,84 pada tahun 2019 menjadi Rp 35.237.789,57 di tahun 2020, atau terjadi kenaikan sebesar 12,78 persen. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

PDRB perkapita yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2020, secara langsung telah berdampak pada perbaikan kemampuan atau daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan akan barang dan jasa. Pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan selama ini sangat berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Berdasarkan angka perkiraan, pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Ternate tahun 2020 rata-rata 51,45 juta rupiah/tahun, sedangkan pendapatan perkapita ADHB tahun 2019 rata-rata 45,52 juta rupiah/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kota Ternate meningkat dari tahun 2019 sampai 2020.

Nilai PDRB Perkapita Kota Ternate sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 1.13 di bawah ini.

Tabel 1.13
Nilai PDRB, PDRB per Kapita dan Pertumbuhan PDRB per Kapita
Kota Ternate Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
ADHB (milyar rupiah)	7.877,21	8.688,47	9.687,83	10.617,48	10.549,29
ADHK (milyar rupiah)	5.785,43	6.222,45	6.736,30	7.286,00	7.233,78
PDRB Per Kapita					
ADHB (rupiah)	36.129.393,93	38.942.367,25	42.470.938,38	45.527.981,89	51.459.703,61
ADHK (rupiah)	26.535.281,71	27.889.498,05	29.531.604,74	31.242.526,84	35.237.789,57
Pertumbuhan PDRB Per Kapita					
ADHB (persen)	8,47	7,79	9,06	7,20	13,03
ADHK (persen)	5,50	5,10	5,89	5,79	12,79

Sumber: Ternate Dalam Angka (diolah), 2021

1.3.6 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Ternate terus meningkat sepanjang 2016-2020. Pada tahun 2016 pengeluaran per kapita Kota Ternate sebesar Rp.12.643.000, kemudian meningkat menjadi Rp.12.989.000 pada tahun 2017. Di tahun 2018 berada di angka Rp.13.166.000, dan di tahun 2019 naik hingga Rp.13.632.000. Namun pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Ternate menurun sebesar Rp.13.091.000.

Grafik 1.4
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Ternate dan
Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

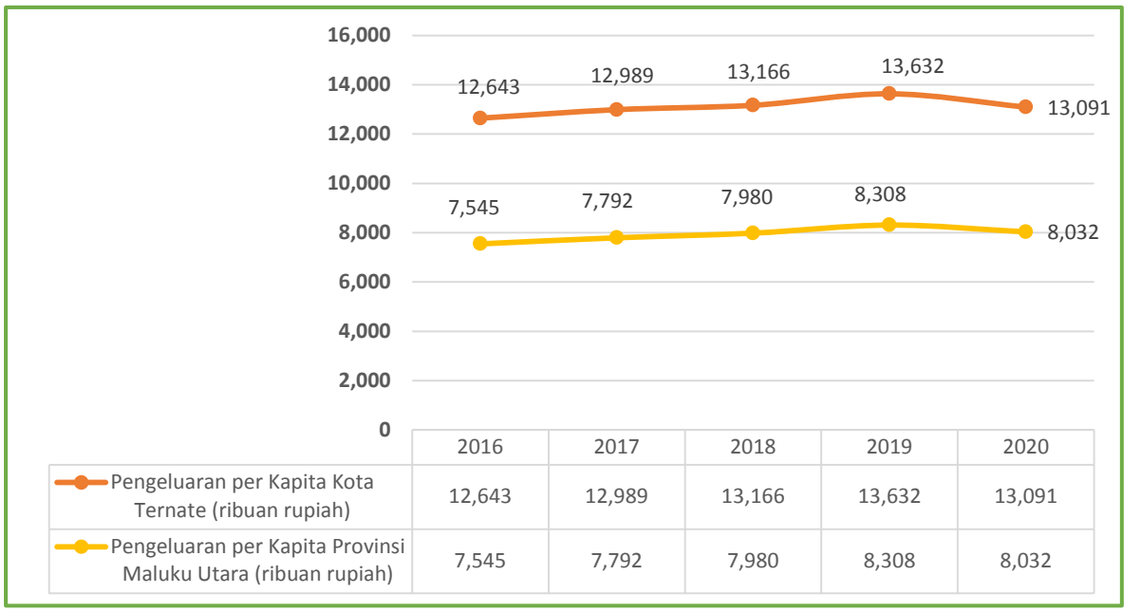

	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita Kota Ternate (ribuan rupiah)	12,643	12,989	13,166	13,632	13,091
Pengeluaran per Kapita Provinsi Maluku Utara (ribuan rupiah)	7,545	7,792	7,980	8,308	8,032

Sumber: www.bps.malut.go.id, 2021

1.3.7 Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Ternate Tahun 2020 tercatat sekitar 109.247 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja menurun dari 61,06% menjadi 59,88% atau turun 1,18 poin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) menurun. Sisanya, yaitu 40,12% adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2020 seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia kerja.

Grafik 1.6
Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja
Kota Ternate Tahun 2016-2020

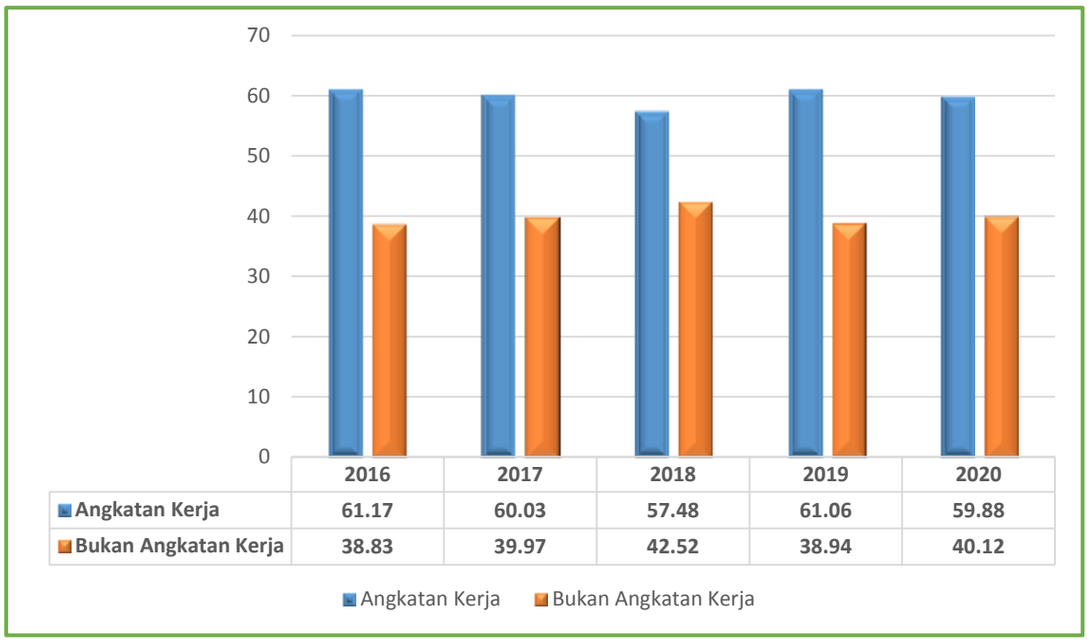

	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja	61.17	60.03	57.48	61.06	59.88
Bukan Angkatan Kerja	38.83	39.97	42.52	38.94	40.12

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Kemajuan perekonomian suatu daerah, ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Selama rentang tahun 2019-2020 terjadi penurunan TPT di Kota Ternate, dari 6,06 persen pada tahun 2019 menjadi 5,80 persen di tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu indikasi semakin baiknya lapangan usaha dalam menyerap ketersediaan tenaga kerja di Kota Ternate. Dari sisi jumlah orang yang bekerja juga terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2019 sebanyak 98.665 orang menjadi 102.906 pada tahun 2020.

Grafik 1.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate Tahun 2016-2020

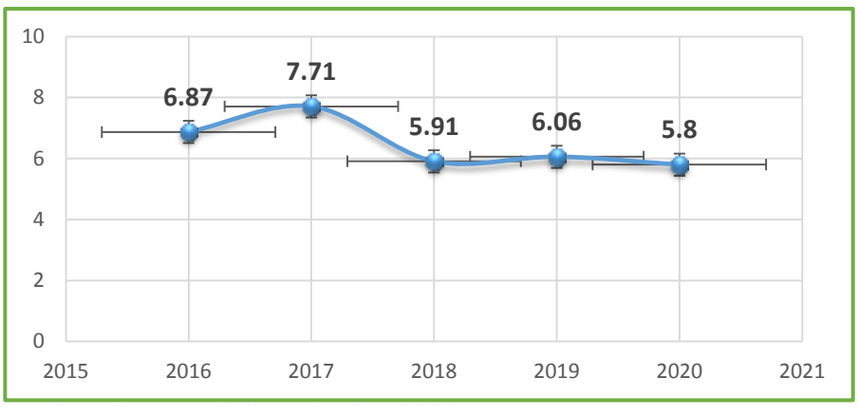

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

1.4 KONDISI INFRASTRUKTUR DAN KAWASAN STRATEGIS

1.4.1 Kondisi Infrastruktur

Kota Ternate merupakan pintu gerbang Provinsi Maluku Utara untuk menuju dan dari wilayah Halmahera, sehingga Kota Ternate merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Maluku Utara. Oleh sebab itu, kondisi infrastruktur dan fasilitas perkotaan di dalamnya sudah selayaknya memiliki kualitas yang baik.

1. Ketersediaan Air Bersih

PDAM Kota Ternate merupakan instansi yang melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Ternate. Pada awalnya pembentukan PDAM Kota Ternate berasal dari Badan Pengelola Air minum (BPAM) Kabupaten Maluku Utara berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 109/KPTS/CK/XI/1980 pada tanggal 26 Nopember 1980. Kemudian diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara berdasarkan PERDA Nomor 3 Tahun 1984 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Utara. Tahun 1987 Pemerintah Pusat menyerahkan kepemilikan BPAM kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Utara menjadi PDAM Kabupaten Maluku Utara.

Proses pengolahan dan produksi PDAM Kota Ternate, masih bersifat sederhana yaitu dengan hanya melakukan penambahan bahan kimia desinfektan (kaporit) kedalam air baku. Selanjutnya air hasil desinfekant tersebut disalukan dan ditampung ke dalam suatu wadah yang disebut reservoir sebelum didistribusikan kepada seluruh pelanggan PDAM.

Secara umum, pola distribusi air minum dari lokasi reservoir menuju ke pelanggan adalah dengan system pemompaan, hal ini mengingat sebaran pelanggan PDAM yang tidak merata dan tersebar dalam kawasan dengan topografi yang bergelombang (*undulating*) sehingga apabila memakai sistem gravitasi maka sebaran tekanan tidak sama di setiap lokasi pelanggan. Untuk beberapa wilayah atau blok pelayanan dan dengan tujuan untuk menghemat penggunaan daya listrik, maka PDAM melakukan pembangunan dan penempatan beberapa *reservoir* pada lokasi tinggian. Selanjutnya air bersih/air minum dari reservoir dilakukan pemompaan sampai fasilitas *reservoir* dengan ketinggian tertentu dan dari *reservoir* ini dilakukan distribusi dengan mekanisme gravitasi untuk pelayanan pelanggan dikawasan yang lebih rendah.
Menyiasati sebaran pelanggan yang menempati lokasi tertentu dengan topografi yang cukup tinggi, maka PDAM Kota Ternate melakukan distribusi dengan melakukan pemompaan langsung dari lokasi reservoir menuju ke lokasi rumah pelanggan secara langsung.

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Ternate dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun. Jumlah pelanggan, Jumlah Produksi, dan Nilai Penjualan air melalui PDAM Kota Ternate pada tahun 2016 hingga 2020, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.18
Jumlah pelanggan, Jumlah Produksi, dan Nilai Penjualan Air
PDAM Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah Produksi Air / M^2	Jumlah Penjualan Air / M^2
2016	27.425	763.280	3.464.018.200
2017	28.504	817.226	3.752.226.100
2018	29.437	763.864	4.101.614.450
2019	30.504	878.162	4.740.606.600
2020	31.569	834.360	4.495.453.600
TOTAL	**147.439**	**4.056.892**	**20.553.918.950**

Sumber: PDAM Kota Ternate, 2021

2. Jaringan Energi/Listrik

Salah satu sektor yang masuk dalam lingkup urusan energi dan sumber daya mineral adalah listrik. Listrik sudah menjadi kebutuhan primer untuk saat ini, karena listrik sangat menunjang kegiatan sehari-hari manusia. Jika tidak ada listrik, maka aktifitas sehari-hari akan menjadi terhambat dan ruang gerak manusia pun menjadi terbatas. PT. PLN (persero) sebagai BUMN yang mengurusi pelistrikan setiap tahunnya selalu berupaya untuk memperluas jaringan agar seluruh pelosok di wilayah Indonesia dapat terlayani listrik. Namun kendala letak geografis serta sarana dan prasarana yang belum mendukung dapat menghambat proses perluasan jaringan listrik tersebut. Di Kota Ternate, dari 8 kecamatan, semua kecamatan telah teraliri listrik melalui jaringan PT. PLN (Persero), namun untuk kecamatan Pulau Batang Dua belum dapat 24 jam teraliri listrik jaringan PLN, karena untuk Kecamatan Batang

Dua ketersediaan listriknya dikelola dengan bantuan mesin dari Pemerintah Kota Ternate maupun PT. PLN (Persero).

Tabel 1.19
Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Daya Tersambung Listrik
Kota Ternate Tahun 2016– 2020

No	Data Niaga PLN UP3 Ternate	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan	44.535	47.489	50.277	53.236	56.307
2	Daya Tersambung (VA)	79.495.760	85.812.060	94.253.010	100.808.060	109.312.960
3	Rumah Tangga Pengguna Listrik	38.357	41.031	43.582	47.409	50.387
4	Jumlah Rumah Tangga	41.874	47.381	48.286	49.837	51.289
5	Ratio Elektrifikasi (%)	91,60	86,60	90,26	95,13	98,24

Sumber: PLN Ternate, 2021

3. Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke suatu daerah.

Tabel 1.20
Panjang Jalan Menurut Kecamatan Profil Kondisi Jalan
Kota Ternate Tahun 2020

No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)
1	Pulau Ternate	15,695
2	Moti	22.467
3	Pulau Batang Dua	20.832
4	Pulau Hiri	12.763
5	Ternate Barat	24.510
6	Ternate Selatan	84.882
7	Ternate Tengah	78.684
8	Ternate Utara	59.956
Jumlah		**319.789**

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2021

Sarana jalan di Kota Ternate yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ternate sepanjang 319.789 km dengan kondisi yang relatif baik. Rasio panjang jalan dengan kondisi jalan baik mencapai 71,04%, kondisi sedang 5,22%, rusak ringan 18,54% dan rusak berat hanya sebesar 5,20%.

Tabel 1.21
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kota Ternate Tahun 2020

No	Kecamatan	Panjang Jalan (Km)	Persentase (%)
Jenis Permukaan			
1	Hotmix	284.569	88,99
2	Lapen	8.257	2,58
3	Tanah	8.369	2,62
4	Paving/Beton	18.594	5,81
Kondisi Jalan			
1	Baik	227.184	71,04
2	Sedang	16.690	5,22
3	Rusak Ringan	52.289	18,54

4	Rusak Berat	16.626	5,20

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2021

4. Jaringan Sanitasi Umum dan Drainase

Permasalahan drainase perkotaan, khususnya Kota pantai seperti Kota Ternate, bukanlah hal yang sederhana sebab sangat di pengaruhi oleh kondisi air laut namun keuntungan yang dimiliki Kota Ternate karena kondisi topografi dengan tingkat kemiringan yang sangat baik sehingga tidak perlu mempergunakan teknologi untuk mendraian (mengeringkan drainase). Oleh karenanya pengaturan kembali sistem drainase sehingga dapat membentuk sebuah jaringan drainase mulai dari hulu hingga hilir berdasarkan kapasitas drainase sangat diperlukan. Penggunaan lahan yang tak terkontrol terutama pada kawasan-kawasan pegunungan serta daerah sekitar aliran sungai sehingga kawasan yang tadinya merupakan tangkapan hujan (daerah resapan air) atau kawasan yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan bagi sungai terus mengalami mengalami penyempitan akibat laju pertumbuhan kota, dengan demikian tentunya hujan tidak lagi dapat terserap kedalam tanah atau sungai tidak mampu lagi berfungsi secara maksimal, sehingga air yang seharusnya mengalir mengikuti badan sungai meluap dan mengenangi daerah-daerah yang memiliki topografi yang rendah.

Drainase yang mengalami penurunan kapasitas akibat pendangkalan dan penyempitan yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi dan sampah. Selain itu pula, daya tampung drainase yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada akibat dari perencanaan drainase yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan Kota.

Penyebab dari terjadi genangan di Kota Ternate di akibatkan oleh faktor:

1) Penyebab alam, seperti lokasi yang cekung dan terisolir tanpa adanya *outlet* untuk mengeringkan daerah tersebut.
2) Bentuk, ukuran penampang saluran drainase yang tidak terencana dengan baik.
3) Pemeliharaan yang tidak memadai sehingga sering terjadi penyumbatan pada mulut gorong-gorong atau sedimentasi yang berlebihan pada dasar saluran.
4) Pendangkalan drainase akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase.

Berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan perumahan yang tidak terkendali.

Air Minum

Permasalahan Air besih di Kota Ternate salah satunya adalah air tanah yang dimanfaatkan oleh penyelengara air minum sebagai air baku air minum, dimana saat ini terdapat beberapa sumur milik PDAM sudah mengalami intrusi air laut, sehingga mengganggu pelayanan air minum terutama dari aspek kuantitas dan kualitas air minum yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama masyarakat bagian utara Kota Ternate.

Beberapa Isu dan Permasalahan Air Minum yang dihadapi Pemerintah Kota Ternate dalam rangka Peningkatan akses Aman Air Minum dan Penyediaan Air Baku, yaitu:

1) Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk.

2) Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun.
3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal.
4) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (JP) baru mencapai 62,13 % oleh PDAM.
5) Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali yaitu 27,6 % dan Air Tadah Hujan (ATH) yaitu 2,4 %.
6) Penggunaan BJP dan yang diselenggarakan masyarakat belum memadai dan tidak sesuai dengan standar kesehatan.
7) Penggunaan BJP seperti sumur pada beberapa kawasan Terjadi intrusi.
8) Tingkat kehilangan air yang cukup tinggi.
9) Kualitas dan kuantitas Sumber Air Baku untuk air minum masih belum memenuhi standar pelayanan dan menjangkau seluruh masyarakat Kota Ternate.

Air Limbah

Pertumbuhan penduduk Kota Ternate yang cukup tinggi akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan sarana prasara dan utilitas. Salah satu aspek kebutuhan yang penting adalah aspek sanitisasi terutama yang terkait dengan air limbah, yang jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap degradasi lingkungan dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat, memiliki permasalahan pada pembuangan limbah rumah tangga. Permukiman padat di perkotaan banyak yang tidak dilengkapi dengan sumur resapan untuk mengolah kembali air ataupun mengendapkan limbah cair rumah tangga yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, seperti: mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, cuci alat masak dan alat makan, cuci pakaian, cuci kendaraan ataupun aktivitas lainnya.

Berbagai dampak yang dihasilkan dari proses pembuangan air limbah rumah tangga ke alam bebas, antara lain:

1) Dampak dari Aspek Kesehatan, air limbah yang berasal toilet mengandung bakteri E. Coli yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti typhus, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur (apalagi bila jarak antara sumur dan septic-tank tidak sesuai baku mutu, seperti yang banyak ditemukan di permukiman padat). Bila air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses lain, seperti; cuci piring, mandi, gosok gigi dan kegiatan penggunaan air sumur lainnya tanpa melalui proses memasak.

2) Dampak dari Aspek Lingkungan, jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman/pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu.

Keadaan ini dapat merusak ekologi lingkungan secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan.

Jika air tercemar limbah seperti sampah ataupun bahan kimia, hal ini akan mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Tidak hanya hewan-hewan yang hidup di dalamnya, tumbuhan air pun akan terganggu produktivitasnya karena air berguna sebagai pembentuk protoplasma yang berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis.

3) Dampak dari Aspek Estetika, seperti halnya limbah padat, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang.

5. Fasilitas Sistem Transportasi

Kinerja urusan perhubungan tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

Seiring dengan bertambahnya panjang jalan yang berkondisi baik dan semakin mudahnya fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula angkutan darat maupun kendaraan pribadi di Kota Ternate. Berdasarkan laporan SAMSAT Kota Ternate pada tahun 2019 jenis kendaraan terbanyak di Kota Ternate yaitu jenis sepeda motor sebanyak 33.4331 unit, mobil sebanyak 5.654 unit dan truck sebanyak 2.060 unit (Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2021).

Sedangkan banyaknya penumpang yang bepergian ke wilayah di luar Maluku Utara melalui pelabuhan Ahmad Yani sebanyak 40.446 orang, dan penumpang yang datang sebanyak 44.699 orang. Di sisi lain, arus bongkar muat Trafik Peti Kemas barang angkutan dalam negeri yang terjadi di pelabuhan Ahmad Yani pada tahun 2020 sebanyak 518.750 ton (bongkar) sedangkan barang yang dimuat sebanyak 520.174 ton. Untuk kegiatan arus bongkar Trafik Non Peti Kemas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada tahun 2020 sebanyak 575.460 ton, sedangkan kegiatan muat sebesar 78.195 ton.

Untuk transportasi udara akan ditinjau dari perbandingan atau rasio antara penumpang dengan jumlah penerbangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Ternate, jumlah penumpang yang berangkat untuk penerbangan selama Tahun 2020 adalah sebanyak 174.661 orang, sedangkan penumpang yang datang sebanyak 181.770 orang dan transit sebanyak 19.846 orang. Adapun jumlah pesawat yang berangkat selama periode tahun 2020 adalah sebanyak 2.520 kali, sedangkan pesawat yang datang adalah sebanyak 2.520 kali.

Berkembangnya sektor jasa dan sektor lainnya yang secara akumulasi telah membuat pertumbuhan ekonomi Kota Ternate berada pada posisi tertinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan ini secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Tabel 1.23
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kota Ternate
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	55	50	70	80	80	68

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tahun 2021

1.4.2 Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan kawasan makro Kota Ternate baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selain itu, kawasan strategis juga akan berpengaruh terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kawasan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting maka diperlukan penetapan secara tegas dan rencana serta penanganan perkembangannya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sektor, sinergis dengan kawasan yang ada di sekitarnya, dan harmonis tetap mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, kawasan strategis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kawasan Strategis Kota Ternate

Sumber: RTRW Kota Ternate 2012-2032, 2021

1. Kawasan Strategis Pertahanan Dan Militer

Kawasan strategis pertahanan dan militer, merupakan kawasan yang dinilai Kawasan strategis pertahanan dan militer, merupakan kawasan yang dinilai memiliki nilai strategis dan prioritas untuk kegiatan pertahanan dan keamanan. Sistem kegiatan didalamnya memiliki spesifikasi dan aktivitas khusus terkait dengan sistem keamanan dan pertahanan negara. Perlunya ditetapkan deliniasi kawasan stratgeis ini, yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi kepentingan sistem pertahanan dan keamanan negara, lokasi kawasan ini antara lain; di Kelurahan Tubo (Lapangan tembak AD), Kelurahan Takome (Lapangan tembak AD), Kelurahan Akehuda (AL), Kelurahan Sangaji (KOREM), Kelurahan Manggadua Utara (KODIM), Kelurahan Salahudin (Kipan/AD), Kelurahan Takoma (Kepolisian/Polres). Sedangkan untuk pengembangan kawasan strategis pertahanan dan keamanan hingga tahun 2030, dapat memanfaatkan lahan yang dipandang memiliki nilai strategis untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara.

2. Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap kepentingan ekonomi Kota Ternate. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kota Ternate, dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, sehingga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh.
2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
3. Potensi ekspor.
4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang diarahkan pengembangannya di Kota Ternate meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Kota Baru Ternate di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau.
   Pengembangan kawasan kota baru pada dasarnya di peruntukan untuk pengembangan kawasan permukiman kurang lebih sebesar 60 % dari rencana luas lahan 600 Ha, yang meliputi wilayah Kelurahan Fitu sampai dengan Kelurahan Kastela. Sedangkan sisanya seluas 40 % diperuntukan untuk pengembangan kawasan Jasa dan Perdagangan, Kawasan Pendidikan, Kawasan Wisata dan lainnya.
2. Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate.
   Pengembangan kawasan minapolitan merupakan rencana pengembangan lahan untuk pengelolaan Hasil Perikanan.
3. Kawasan *Water Front City* (Kawasan Reklamasi) Kota Ternate.
   Ketersediaan lahan di Kota Ternate yang sangat terbatas tidak sebanding dengan dinamika pembangunan yang sangat pesat, sehingga salah satu alternatif yang dapat lakukan adalah dengan melakukan reklamasi pantai, yaitu reklamasi kawasan salero-dufa-dufa dan reklamasi kawasan Kayu merah-Sasa. Program pengembangan kawasan reklamasi ini diperuntukan untuk mendukung perkembangan kota ternate sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dan menyediakan ruang untuk sempadan pantai. Peruntukan ruang dikawasan reklamasi sebagian besar disediakan untuk pengembangan sarana prasarana dan fasilitas jasa perdagangan, sarana prasarana umum dan ruang terbuka publik.

4. Kawasan Lokasi Industri di Tafure dan Tabam.
5. Kawasan pengembangan lahan pertanian di Kecamatan Pulau Moti dan Batang Dua.
6. Kawasan Agrowisata di Foramadiahi dan Loto.

3. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Rawan Bencana ditetapkan sebagai bagian dari perlunya pertimbangan faktor kebencanaan di dalam pengembangan wilayah. Kawasan ini ditetapkan di pada Kawasan Gunung Gamalama utama, yaitu:

1. Hampir seluruh wilayah Kota Ternate untuk kawasan rawan letusan gunung.
2. Kawasan sepanjang pesisir pantai untuk kawasan rawan bencana tsunami, terutama di Kecamatan Batang Dua (Pulau Mayau dan Tifure).
3. Kawasan Danau Laguna dan sekitarnya.
4. Kawasan Danau Tolire dan Sekitarnya.
5. Kawasan Mata Air Ake Gale, Santosa, Tege-Tege, Ake Rica, Ake Minta, Ake Tubo.

Kawasan-kawasan tersebut perlu dilakukan pelestarian untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian lingkungan, yang berfungsi untuk menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.

4. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya, merupakan kawasan yang memiliki niai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, seperti:

1. Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara.
2. Pesta Rakyat yang disebut “Legu Gam” yang sudah menjadi agenda tahunan Kota Ternate yang setiap tahun dilaksanakan di Lapangan Ngaralamo.
3. Kawasan Benteng Kota Janji di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan.
4. Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah.
5. Kawasan Benteng Toloco/Holandia di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara.
6. Kawasan wisata budaya di Kawasan Kelurahan Soasio seperti Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyura, Baramasuwen (bambu Gila), Badabus, Soya-soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salajin dan Togal yang merupakan wisata budaya yang memiliki potensi sebagai atraksi budaya tradisional Ternate.

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sosial budaya termasuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri khas kota, serta sebagai daya tarik atraksi wisata budaya.

1.5 KONDISI SIDa KOTA TERNATE SAAT INI

1.5.1 Tema Prioritas Road Map SIDa Kota Ternate

Kota Ternate memiliki posisi yang strategis secara geografis karena berada di jalur lalu lintas utama perekonomian Maluku Utara, serta memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Kondisi demikian memungkinkan Kota Ternate memiliki peranan yang

penting dalam konteks pembangunan baik di tingkat regional maupun nasional.

Sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate memiliki keunggulan berupa laju pertumbuhan PDRB yang lebih pesat dibandingkan Maluku Utara secara keseluruhan, serta memiliki tren pertumbuhan angka PDRB yang cenderung positif jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Maluku Utara. Sesuai dengan analisis isu-isu strategis pembangunan Kota Ternate, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya wilayah, terutama di Kecamatan-Kecamatan yang masih perlu perhatian lebih maksimal lagi, sehingga secara merata dapat dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh Pemerintah Kota Ternate bagi peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kota Ternate 2021-2026.

Demikian pula, keseimbangan pembangunan daerah baik dari segi sosial budaya, perekonomian, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan Kota Ternate. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan di Kota Ternate lebih diarahkan pada model pembangunan yang bersifat kepentingan masyarakat, seperti kualitas lingkungan hidup, pelayanan dasar Air Bersih dan penanganan Sampah Perkotaan, hingga pelayanan publik yang efektif. Melalui pendekatan pembangunan yang demikian, diharapkan akan terciptanya suatu keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya, untuk menyalaraskan kebutuhan antara wilayah, agar terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih Mandiri dan Berkeadilan.

Peranan dari berbagai sektor di Kota Ternate sangat jelas, dengan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate periode tahun 2021- 2026, maka visi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah **"MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN"** atau **TERNATE ANDALAN**.

Untuk mencapai Visi Kota Ternate Yang Mandiri Dan Berkeadilan, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan diperlukan kolaborasi berbagai instrumen lainya sebagai modal pembangunan. Dukungan modal pembangunan dimaksud merupakan dimensi yang saling terkait antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian Visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 8 (delapan) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ke-delapan rumusan Misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Ternate di tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

Misi 1 Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Upaya pengembangan ekonomi daerah menjadi proses pembangunan yang memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tepat sasaran serta bertujuan untuk membuka keterisolasian. Kota Ternate, hingga saat ini

masih adanya pertumbuhan yang tidak seimbang karena masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan dan konsentrasi sentra perdagangan hanya berada di pusat kota. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, tingkat pengendalian inflasi yang masih belum berkualitas dan adanya potensi ekonomi kreatif yang belum diberdayakan.

Namun dalam beberapa kasus tujuan pembangunan yang demikian mulia, tidak dapat terealisasi secara optimal. Hasil pembangunan belum secara merata, adil dan transparan dapat menyentuh serta dinikmati oleh masyarakat secara proporsional. Hal ini terkait dengan adanya berbagai kendala, diantaranya kendala geografi, kendala transportasi, kendala budaya kerja dan etos kerja, kendala perencanaan dan penganggaran, serta kendala-kendala sosial lainnya.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan antar kawasan yang seimbang; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengoptimalkan pengendalian laju inflasi, dengan sasaran terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah; meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan optimalnya pengendalian inflasi.

Misi 2 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif

Tata kelola pemerintahan yang ekstratif dan responsif menjadi bagian yang paling terpenting dalam mengarahkan kebijakan yang terintegritas. Selama ini, Kota Ternate masih belum mengoptimalkan intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, masih adanya budaya yang patrimonialisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan belum efektifnya pengelolaan keungan daerah yang berbasis kinerja.

Misi ini bertujuan untuk menghilangkan budaya patrimonialisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; dan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik; optimalnya implementasi manajemen ASN; meningkatnya akuntabilitas kinerja; optimalnya penerapan zona integritas; meningkatnya akuntabilitas keuangan dan meningkatnya akuntabilitas pendapatan daerah.

Misi 3 Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Untuk mencapai Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan, maka salah satu hal yang harus diupayakan peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selama ini, kinerja birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh budaya patrimonialisme yang masih kuat yang mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorentasi pada kekuasaan daripada pelayanan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Dalam hal pelayanan kesehatan upaya peningkatan kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi juga menjadi perhatian utama, antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Ternate akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Ternate melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan publik.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sistem pengendalian internal dalam pelayanan publik, dengan sasaran optimalnya kualitas pelayanan publik (*smart governance*); meningkatnya mutu pendidikan Kota Ternate; optimalnya implementasi pendidikan karakter dan keagamaan, serta optimalnya capaian keluarga sehat.

Misi 4 Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)

Kota Ternate sebagai kota yang heterogen, dari perbedaan agama, etnis dan budaya, akan melestarikan dan mempertahankan asset dan identitas kota, melalui menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*), yang terdiri dari: 1) *Adat se Atorang*; 2) *Istiadat se Kabasarang*; 3) *Galib se Lakudi*; 4) *Cing se Cingare*; 5) *Bobaso se Rasai*; 6) *Ngale se Cara*; dan 7) *Sere se Duniru*.

Hingga kini, Kota Ternate belum secara menyeluruh mengoptimalkan dan menumbuhkembangkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya, dalam hal ini Kesultanan Ternate dengan lembaga sosial dan budaya lainnya. Kota Ternate juga menjadi anggota jejaring kota kreatif nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan juga dapat memberikan kontribusi, apabila di kolaborasikan pada potensi kearifan lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Ternate berbasis lokal. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Dan jika ditelaah lebih jauh lagi, Kota Ternate harus tetap dapat merawat dan menjaga nilai-nilai kultur Ternate dalam interaksi sosial masyarakat dan lembaga.

Misi ini bertujuan untuk menyediakan lembaga dan informasi kearsipan sejarah, sosial dan budaya, dengan sasaran optimalnya peran lembaga sosial budaya – Kesultanan Ternate, meningkatnya intensitas event seni dan budaya yang diselenggarakan dan optimalnya pembinaan kepemudaan dan olahraga.

Misi 5 Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur ekonomi dalam jumlah yang memadai. Ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Dampak positif yang paling penting dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas adalah masuknya investor untuk berinvestasi di Kota Ternate, yang berdampak pada penurunan angka pengangguran dan adanya kesempatan berekonomi, sehingga upaya

memberikan hak untuk masyarakat kota dalam berekonomi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. maka pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat dalam 5 (lima) tahun kedepan akan ditingkat dan disebar secara merata, adil dan proporsional.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyediakan sarana dan prasarana sektor informal, dengan sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.

Misi 6 Setiap Warga Masyarakat Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan

Pemerintah dan masyarakat Kota Ternate, secara saat ini dihadapkan pada pemenuhan layanan masyarakat. Konsitensi pelayanan sebagai norma dari sebuah kebijakan pemerintahan daerah. Semua warga Kota harus mendapatkan pelayanan yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang. Hingga kini, Kota Ternate dan belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang hak pelayanannya, mendapatkan pelayanan terhadap daya dukung lingkungan yang asri.

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Ternate, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak banjir yang diakibatkan drainase lingkungan yang kurang memadai dan tata kelola sampah perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh; optimalnya tutupan lahan; optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; optimalnya cakupan layanan air bersih; optimalnya cakupan layanan sampah perkotaan; optimalnya penataan sistem drainase dan optimalnya layanan transporasi perkotaan.

Misi 7 Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu

Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Kota Ternate hingga kini belum secara utuh mengoptimalisasi perlindungan hak bagi masyarakat yang kurang mampu, serta belum memaksimalkan pemetaan terhadap mitigasi kerawanan bencana alam hingga bencana non alam.

Misi ini bertujuan untuk melaksanakan tanggap darurat kerawanan bencana; melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dan melakukan penanganan dan penanggulangan dampak covid-19, dengan sasaran optimalnya mitigasi dan tanggap darurat bencana serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait; optimalnya pemantauan resiko bencana dan penetapan sistem peringatan dini; optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan kebencanaan dan kawasan rawan bencana; optimalnya penanganan covid-19;

optimalnya penanganan kemiskinan dan optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat.

Misi 8 Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial

Sejatinya, Heterogenitas Kota menjadi nilai tersendiri jika dioptimalkannya norma masyarakat. Jika potenesi nilai tersebut terabaikan, maka potensi konflik akan menjadi masalah bagi penghidupan masyarakat kota kedepannya. Selain itu, Kota Ternate hingga kini belum mengoptimalkan secara efektif terkait dengan pengarustamaan gender, hak anak, dan kota ramah terhadap disabilitas.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya yang ada di kota Ternate, dengan sasaran optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial; optimalnya pengarustamaan gender dan hak anak dan optimalnya kota inklusif ramah disabilitas.

Misi pembangunan Kota Ternate bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kunci dari sebuah kesuksesan misi pembangunan ialah kolaborasi pada setiap PD. Selain itu, pentingnya konsep *Pentahelix* antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya, yang bertujuan mendukung secara optimal program-program yang populis dan inklusif sebagai bentuk pembangunan kualitas SDM, dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi di Kota Ternate.

1.5.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kota Ternate

RPJMD dalam pencapaiannya akan memerlukan banyak inovasi. Demikian pula, untuk mengakomodasi potensi di Kota Ternate tentunya memerlukan perencanaan, ekspektasi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Oleh karena itu, Road Map SIDa sangat diperlukan guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan inovasi-inovasi baru dalam rangka pengembangan perekonomian dan pembangunan Kota Ternate.

Tabel 1.24
Tujuan Pembangunan Kota Ternate Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
Misi 1 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional				
Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang	Simpul Ekonomi Baru	Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi	1. Dinas Perindag 2. Dinas Koperasi dan UKM
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	PDRB Perkapita	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi	1. Dinas Pariwisata 2. Dinas Perindag 3. Diskomsandi 4. Dinas Koperasi dan UKM 5. Dinas PMPTSP 6. Dinas Kelautan dan Perikanan
Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi	Tingkat Inflasi	Optimalnya Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Ketahanan Pangan 3. Dinas Pertanian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
Misi 2 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif				
Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Diskomsandi
		Optimalnya Implementasi Manajemen ASN	Persentase Pengisian JPT Pratama Melalui Seleksi Terbuka	BKPSDMD
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Kota	1. Bappelitbangda 2. Sekretariat Daerah 3. Sekretariat DPRD
		Optimalnya Penerapan Zona Integritas	OPD yang Menyandang Predikat WBK/WBBM	Inspektorat
Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. BPKAD 2. Inspektorat
Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	BP2RD
Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas				
Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik	Indeks Pembangunan Manusia	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (*Smart Governance*)	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Kecamatan 2. DPMPTSP 3. Dinas Pemadam Kebakaran 4. Dinas Arsip dan Perpustkaan 5. Dinas Kependudukan dan Capil
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate	Rata-Rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi PAUD	
			Angka Putus Sekolah SD/MI	
			Angka Putus Sekolah SD/MI	
		Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Keagamaan	Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
Misi 4 : Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan Lokal (*Adat se-atorang*)				
Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya – Kesultanan Ternate	Persentase Lembaga Sosial yang Mandiri	1. Dinas Kebudayaan 2. Sekretariat Daerah 3. Badan Kesbangpol
		Meningkatnya Intensitas Event Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	Jumlah Event Seni dan Budaya yang diselengarakan	Dinas Kebudayaan
		Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Persentase OKP yang aktif	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
Misi 5 : Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi				
Menciptakan Lapangan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas PMPTSP 4. Dinas Koperasi dan UKM
Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal	Persentase Capaian Ketersediaan Sarana Prasarana	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Sektor Informal	Ketersediaan Sarana Prasarana Pendukung	1. Dinas Perindag 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
Misi 6 : Setiap Warga Masyarakat Memiliki Kedudukan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan				
Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Luasan Kumuh	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perkim
		Optimalnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PUPR
		Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih	Rasio Akses Air Minum Terhadap Jumlah Penduduk	Dinas PUPR
		Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	Persentase Layanan Persampahan	1. Dinas PUPR 2. Dinas Lingkungan Hidup
		Optimalnya Penataan Sistem Drainase	Luas Genangan Banjir dan Rob	Dinas PUPR
		Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (*Level Of Service*)	Dinas Perhubungan
Misi 7 : Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu				
Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Optimalnya Tanggap Darurat Bencana dan Koordinasi Antar Instansi Terkait	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	BPBD
Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana		Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini	Ketersediaan Sistem Peringatan Dini	BPBD
		Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana	Tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan	1. BPBD 2. Dinas Sosial
Melakukan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19	Indeks Kemiskinan	Optimalya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca)	Dinas Lingkungan Hidup
		Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Indeks Kerentanan Kota	1. Dinas Sosial 2. Dinas PPPA
		Optimalnya Penanganan Covid-19	Persentase Jumlah Penurunan Pasien Covid 19	1. Satpol PP 2. Dinas Kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Perangkat Daerah
Misi 8 : Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial				
Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate	Meningkatnya Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Persentase Jumlah Penurunan Konflik Sosial	1. Dinas Kebudayaan 2. Badan Kesbangpol
		Optimalnya Pengarustamaan Gender dan Hak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
			Indeks Pemberdayaan Gender	
		Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Dinas Sosial

Sumber: RPJMD Kota Ternate 2021-2026, 2021

Tabel 1.25
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2016-2021

Misi 1 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang	Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah	Peningkatan sinergitas kegiatan ekonomi antar pulau Ternate dan daya tarik pariwisata yang mendukung daya saing ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi
Meningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	
Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi	Optimalnya Pengendalian Inflasi	
Misi 2 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Ekstraktif dan Responsif		
Menghilangkan Budaya Patrimonialisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Implementasi reformasi birokrasi melalui optimalisasi pencapaian akuntabilitas kinerja berbasis digitalisasi sektor pemerintah
	Optimalnya Implementasi Manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	
	Optimalnya Penerapan Zona Integritas	
Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Peningkatan transparansi, fungsi kontrol dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah dan pendapatan daerah
Mengoptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pendapatan Daerah	
Misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		
Meningkatkan Pengawasan dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pelayanan Publik	Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik (*Smart Governance*)	Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat termasuk pelayanan dasar
	Meningkatnya Mutu Pendidikan Kota Ternate	Peningkatan akses pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan karakter dan keagamaan, yang di dukung dengan peningkatan kualitas keluarga sehat
	Optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter dan Keagamaan	
	Optimalnya Capaian Keluarga Sehat	
Misi 4 : Menumbuh-kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai Kearifan Lokal (*Adat se-atorang*)		
Menyediakan Lembaga dan Informasi Kearsipan Sejarah, Sosial dan Budaya	Optimalnya Peran Lembaga Sosial Budaya	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas serta peningkatan peran serta kepemudaan
	Meningkatnya Intensitas Event Seni dan Budaya Yang Diselenggarakan	
	Optimalnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	

Misi 5 : Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Menciptakan Lapangan Kerja	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pengurangan angka pengangguran dengan peningkatan kompetensi dan membangun semangat wirausaha melalui penyediaan sarana prasarana sektor infomal
Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung Sektor Informal	Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal	
Misi 6 : Setiap Warga Masyarakat Memiliki Kedudukan Yang Sama Dalam Memperoleh Pelayanan Sarana Prasarana Perkotaan		
Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Memetakan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Optimalnya Pemenuhan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan serta Masih Tingginya Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan layanan air bersih, penanganan limbah perkotaan dan drainase, melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan layanan transportasi perkotaan
	Optimalnya Tutupan Hutan	
	Optimalnya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Optimalnya Cakupan Layanan Air Bersih	
	Optimalnya Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	
	Optimalnya Penataan Sistem Drainase	
	Belum Optimalnya Layanan Transporasi Perkotaan	
Misi 7 : Daerah Melindungi Masyarakat Yang Kurang Mampu		
Melaksanakan Tanggap Darurat Kerawanan Bencana	Optimalnya Tanggap Darurat Bencana Serta Koordinasi Antar Instansi Terkait	Peningkatan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan kebencanaan melalui aksi terpadu dan peran aktif instansi dan *stakeholder* terkait
Melakukan Pemetaan Wilayah Rawan Bencana	Optimalnya Mitigasi, Pemantauan Resiko Bencana dan Penetapan Sistem Peringatan Dini	
	Optimalnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kebencanaan dan Kawasan Rawan Bencana	
	Optimalya Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim	
Melakukan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19	Optimalnya Penanganan Covid-19	Penanganan Covid-19 secara terpadu dan penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin, disertai perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat
	Optimalnya Penanganan Kemiskinan	
	Optimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	
Misi 8 : Daerah Memberikan Ruang Untuk Tumbuh Dan Berkembangnya Budaya Masyarakat Dengan Memperhatikan Sistem Nilai Dan Norma Sosial		
Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya Yang Ada di Kota Ternate	Optimalnya Pengelolaan Potensi Konflik Sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif, didukung pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak serta penyandang disabilitas, melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarustamaan Gender dan Hak Anak	
	Optimalnya Kota Inklusif Ramah Disabilitas	

Sumber: RPJMD Kota Ternate 2021-2026, 2021

1.5.3 Subtema SIDa Kota Ternate

Keberadaan instrumen kebijakan Kota Ternate dinilai sudah memiliki kondisi yang cukup baik dalam segi kesiapan untuk mengembangkan SIDa walaupun tentu saja kemanfaatan dan pelaksanaan SIDa harus tersusun secara eksplisit sebagai kebijakan pemerintah kota. Untuk mengembangkan potensi wilayah perlu didukung dengan iklim inovasi, maka perlu dilakukan penyusunan Road Map SIDa yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan setiap inisiatif strategis di daerah. Dari beberapa indikator kinerja yang telah ditentukan, bahwa sektor perdagangan dan jasa memiliki performa yang baik pada kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke belakang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan dapat diandalkan sebagai sektor prioritas yang akan dikembangkan melalui SID. Didapatkan pula sektor perdagangan dan jasa di Kota Ternate memiliki karakteristik khusus yang dapat dibagi ke dalam beberapa sub tema, yaitu Pariwisata, MICE, Jasa Pendukung Perkembangan Industri, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Berikut ini adalah kondisi perkembangan masing-masing subtema SIDa di Kota Ternate.

1. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang kini cukup berkembang di Kota Ternate. Hal ini dapat ditinjau dari mulai dikembangkan potensi-potensi pariwisata di Kota Ternate, termasuk di bidang Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Program pengembangan pariwisata ini menjadi sebuah ajang promosi Kota Ternate terhadap dunia luar sekaligus dapat menjadi promosi segala kegiatan UMKM yang mendukung wisata seperti kuliner dan pusat jajanan oleh-oleh yang khas dan terkenal dari Ternate. Ditinjau dari jumlah pengunjung, terjadi peningkatan dari tahun 2016 dan menurun di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

Tabel 1.26
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kota Ternate
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.678	5.226	4.870	2.331	1.501	314
Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal	Orang	200.015	294.780	278.200	278.230	208.871	153.289
Jumlah Lama Rata-rata Tinggal Wisatawan	Hari	2	2	3	4	4	3

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Ternate dan BPS Kota Ternate, 2020

Berdasarkan Data Dinas Pariwisata Kota Ternate, terdapat 35 objek wisata potensial yang tercatat sebagai objek wisata unggulan di Kota Ternate di antaranya Batu Angus, Pantai Sulamadaha, Pantai Jikomalamo, Danau Tolire, Benteng Orange, Kedaton Kesultanan Ternate dan sebagainya. Kota Ternate juga memiliki 33 event yang rutin diadakan baik tiap bulan maupun tiap tahun. Semuanya tercatat dalam *Calendar Event* yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate.

Beberapa di antara event yang menarik dan cukup popular seperti Festival Batu Angus, Festival Legu Gam, Festival Hiri, Festival Moti, yang merupakan program tahunan untuk mendukung kegiatan perdagangan serta dunia pariwisata di Kota Ternate. Sasarannya adalah seluruh wisatawan dari Indonesia dan juga wisatawan potensial dari luar negeri.

Pembangunan kepariwisataan Kota Ternate meliputi: a) pembangunan destinasi pariwisata, b) pemasaran pariwisata, c) pembangunan industri pariwisata, dan d) pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan dilakukan baik pada daya tarik wisata peninggalan sejarah, wisata atraksi seni dan budaya, daya tarik wisata alam, maupun daya tarik wisata buatan.

2. MICE

Subtema MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) dipisahkan dengan subtema pariwisata karena subtema ini merupakan perpaduan antara wisata dan bisnis yang mana keduanya tidak bisa dipisahkan. MICE merupakan salah satu industri pariwisata yang paling menjanjikan untuk dikembangkan di dunia pariwisata. Kegiatan MICE memiliki 4 bentuk utama, yaitu *Meeting* (Pertemuan)*, Incentive* (Insentif)*, Conference* (Konvensi), dan *Exhibition* (Pameran). Dalam industri pariwisata, kegiatan MICE merupakan suatu jenis kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu kelompok besar secara bersama-sama dengan matang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dunia MICE memiliki potensi bisnis yang besar, sehingga dapat yang menciptakan peluang uSentuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan dari diadakannya *event* MICE tersebut.

MICE berarti wisata konvensi, dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Meskipun bisnis dan wisata menggunakan infrastruktur yang sama, bisnis MICE telah membawa banyak keuntungan lainnya pada daerah tujuan wisata. Kegiatan MICE atau bisnis wisata merupakan bisnis yang *high cost* dan *high yield*. Dengan jumlah pengeluaran yang besar dari peserta kegiatan MICE berarti bisnis ini telah memberikan keuntungan yang tinggi secara ekonomi pada penyelenggara kegiatan MICE dan pelaku usaha yang terkait dengan adanya kegiatan MICE.

Secara fisik, tumbuhnya pembangunan hotel-hotel yang menyediakan ruang konferensi merupakan bukti bahwa Kota Ternate berpotensi menjadi kota MICE. Dari tahun ke tahun jumlah hotel berbintang di Kota Ternate terus meningkat.

Tabel 1.27
Perkembangan Sarana Wisata Kota Ternate Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Kamar	No	Uraian	Jumlah
1	Hotel Bintang 4	1	195	8	Restoran	27
2	Hotel Bintang 3	1	10	9	Rumah Makan	72
3	Hotel Bintang 2	5	215	10	Cafe	43
4	Hotel Bintang 1	1	50	11	Jasa Boga	33
5	Hotel Melati	60	1.090	12	Kedai	1
6	Rumah/Hunian Wisata	8	56			
7	Villa	1	20			
Total		**77**	**1.636**			**176**

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Ternate, 2021

3. Jasa Pendukung Perkembangan Industri

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perusahaan industri pengolahan di Indonesia ke dalam empat kategori : a) Industri kerajinan rumah tangga : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 1 – 4 orang, b) Industri kecil : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 5 – 19 orang, c) Industri sedang : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 20 – 99 orang dan d) Industri besar : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Hal tersebut lebih didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya (yang bekerja di perusahaan industri) tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi serta tidak memperhatikan model kapital yang digunakan.

Industri kecil mempunyai kedudukan yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan tidak berakta notaris, dan secara ekonomis mempunyai posisi tawar yang lemah dalam pasar karena sifat usahanya yang tidak terorganisir. Para pengusaha industri kecil kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi sebagai sarana untuk menggalang kekuatan usaha bersama, tetapi lebih suka bekerja sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang menjurus pada kompetisi yang merugikan, bahkan saling mematikan atau *cut throat competition*.

Sektor industri di wilayah Kota Ternate didominasi oleh kelompok indsutri kecil dan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya modal dan teknologi yang digunakan. Walaupun masih beskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang dilakukan cukup besar maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate.

Pengembangan jenis usaha sektor industri berdasarkan informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate pada tahun 2020 jumlah perusahaan industri sebanyak 1.447 perusahaan dan tenaga kerja sebanyak 4.082 orang, yang terbagi menjadi : bidang kimia dan bahan bangunan sebanyak 369 perusahaan; bidang logam sebanyak 251 perusahaan; bidang pangan berjumlah 578 perusahaan; bidang sandang sebanyak 150 perusahaan dan; serta bidang kerajinan umum sebanyak 99 buah.

Walaupun masih berskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang di lakukan cukup besar, maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate. Jenis usaha yang potensial tersebut berupa industri batik Tubo, industri kue atau oleh-oleh khas Ternate, Ikan Asap (cakalang fufu), Industri kursi bambu Tongole sertaberapa pelaku usaha industri kecil berskala rumah tangga atau home Industri. Industri jenis usaha ini sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai salah satu potensi yang dapat mendorong dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha industri.

Adapun kinerja urusan perindustrian dapat diukur melalui indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dan persentase pasar rakyat dalam kondisi baik. Capaian kinerja Urusan Perindustrian dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.28
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ternate
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	9,97	6,65	1,73	4,05	2,05	-7,56
Persentase Pasar Rakyat Dalam Kondisi Baik	%	100	76,5	72,7	83,3	73,3	85,19

Sumber: BPS Kota Ternate dan Dinas Perindag, 2021

4. Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang sangat dominan dalam menggerakan roda perekonomian Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut terlihat dalam struktur PDRB Kota Ternate di mana dari tahun ke tahun sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor kegiatan lainnya. Capaian kinerja urusan perdagangan, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.29
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Ternate
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	8,46	8,36	7,70	10,45	9,71	-7,45

Sumber: BPS Kota Ternate dan Dinas Perindag, 2021

1.5.4 Gambaran Kondisi SIDa Kota Ternate Saat ini

Gambaran kondisi SIDa memuat tentang kondisi Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI). Kerangka Kebijakan Inovasi merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (*common platform*) para pihak bagi pengambangan sinergisitas dan koherensi kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya. Langkah-langkah KKI diarahkan untuk memperkuat kolaborasi sinergis untuk meningkatkan koherensi. Prakarsa atau model berperan sebagai titik masuk atau miniatur, ditempatkan ke dalam kerangka bersistem sehingga tidak parsial atau berdiri sendiri. Kata kunci Kerangka Kebijakan Inovasi dikenal dengan Hexagon Kerangka Kebijakan Inovasi (Taufik, 2013), yaitu:

1) Kerangka Umum yang Kondusif bagi Inovasi dan Bisnis, yaitu analisis mengenai basis data inovasi dan bisnis, peraturan yang mendukung, infrastruktur, dan insentif inovasi dan bisnis.

2) Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbang serta Kemampuan Absorpsi Industri, khususnya UMKM. Meliputi penggambaran kapasitas dan daya dukung iptek/litbang dalam menyediakan inovasi-inovasi di bidang industri beserta tingkat absorpsi dalam hasil analisis kolaborasi yaitu lebih spesifiknya mengenai kolaborasi antara lembaga iptek/Litbang dengan industri/UMKM.

3) Kolaborasi bagi Inovasi dan Difusi Inovasi. Kolaborasi meliputi kemitraan strategis dan kolaboratif dengan menumbuhkan lembaga dan program yang strategis dan inovatif, peningkatan difusi inovasi, dan pelayanan berbasis teknologi.

4) Budaya Inovasi. Meliputi indikator-indikator seperti penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi, penguatan kohesi sosial, apresiasi dan kampanye inovasi, dan penumbuhan usaha baru inovatif.

5) Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Klaster Industri Daerah dan Nasional. Meliputi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sistem inovasi yang tersinkronisasi dari pusat hingga daerah.

6) Keselarasan dengan Perkembangan Global. Meliputi aspek yang terkait dengan isu perkembangan global yaitu aspek lingkungan, standardisasi, dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Melalui analisis SOAR (*Strength, Opportunity, Aspiration, Result*), gambaran awal kondisi umum SIDa Kota Ternate dapat tergambarkan. Kekuatan (*Strength*) yang diperkuat dengan Peluang (*Opportunity*) dalam SOAR digunakan untuk penggambaran kondisi secara umum. Terdapat beberapa kata kunci yang menjelaskan kondisi SIDa di Kota Ternate, yaitu:

1) Kondisi Geografis yang Strategis dan Unik, Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang termasuk dalam Provinsi Maluku Utara. Kondisi letaknya yang strategis tersebut menjadikan Kota Ternate selalu diramaikan dengan arus pergerakan manusia dan barang dari dan keluar Ternate. Letaknya yang berada di kawasan pesisir juga membuka akses untuk masuk melalui jalur laut. Selain itu, Kota Ternate memiliki potensi kelebihan yang pertama yaitu kondisi geografisnya yang unik. Walaupun bercirikan kota kepulauan, Kota Ternate masih memiliki kawasan hijau di Kecamatan Ternate Barat dan Pulau Ternate yang dapat dikembangkan sebagai Desa Adat. Topografinya yang membagi kota menjadi dua yaitu kota atas dan kota bawah juga merupakan keunikan tersendiri dari Kota Ternate yang berbeda dengan kota lainnya;

2) Status Kota yang Diiringi Kelengkapan Ketersediaan Infrastruktur, berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan perekonomiannya, Kota Ternate termasuk menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu, Kota Ternate merupakan pintu gerbang Maluku Utara, kondisi tersebut sudah didukung dengan fasilitas atau infrastruktur yang dimiliki Kota Ternate seperti bandara, pelabuhan penumpang dan peti kemas, dan ketersediaan jaringan jalan yang memadai;

3) Produk Lokal dan Potensi Pariwisata yang Bersaing, dalam hal produk lokal, kota Ternate terkenal potensinya dengan industri olahan makanan seperti Makron, Bagea, Manisan dan Sirup Pala, Kopi Rempah, Roti Kenari dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dalam produksi makanan olahan ini juga sudah cukup baik dengan adanya pengklasteran UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Di bidang pariwisata, Kota Ternate memiliki banyak potensi wisata baik alam, buatan, maupun sebagai lokasi wisata historis, Kesultanan Ternate dan Benteng juga menjadi saksi perjalanan sejarah Kota Ternate;

4) Peran Serta Akademisi/Peneliti/Pakar yang Besar dalam Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Kota Ternate

seringkali selalu melibatkan para pakar ahli untuk memberikan arahan agar sesuai dengan bidangnya.

Secara lebih detail, kondisi SIDa Kota Ternate pada tiap KKI (Kerangka Kebijakan Inovasi) secara terperinci dijelaskan di bawah ini.

1. Kondisi Kerangka Umum Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis

Kota Ternate saat ini dianggap sudah memiliki kerangka umum yang baik dalam penguatan SIDa. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal basis data tentang perkembangan inovasi dan bisnis di Kota Ternate. Terdapatnya perguruan tinggi yang berdiri dan beroperasi di Kota Ternate menjadikan kota ini memiliki banyak pembinaan masyarakat oleh para peneliti/pakar dari perguruan tinggi tersebut. Hal ini merupakan kelebihan dari Kota Ternate yang harus termanfaatkan dengan baik. Dari sisi regulasi, Kota Ternate sampai saat ini belum memiliki kebijakan yang eksplisit dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan walikota tentang penguatan SIDa, serta belum banyak atau terdata baik tentang insentif untuk kegiatan yang mengusung inovasi. Kemudahan yang sudah dilakukan berupa pemberian fasilitas sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa fasilitas merupakan kemudahan yang dapat diberikan pemerintah kepada badan penanam modal yang di antaranya melakukan:

- Penyerapan banyak tenaga kerja
- Melakukan alih teknologi
- Bermitra dengan UMKM
- Industri pionir
- Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Di dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 tersebut dijelaskan juga yang dimaksud dengan fasilitas adalah bentuk-bentuk kemudahan berupa pajak penghasilan pengurangan penghasilan neto, keringanan bea masuk dari faktor produksi yang belum diproduksi di dalam negeri, keringanan bea masuk bahan baku, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Dan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Kondisi terperinci dari kerangka umum bagi inovasi dan bisnis di Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Tabel 1.30
Kondisi Kerangka Umum bagi Inovasi dan Bisnis
di Kota Ternate saat ini

No	Variabel	Indikator	Kondisi Saat Ini
1	Basis Data Inovasi dan Bisnis	1. Persentase data inovasi dan bisnis yang tersedia 2. Pelayanan kebutuhan basis data inovasi dan bisnis oleh pemerintah daerah	1. Data terkait inovasi masih sangat terbatas. 2. Persentase bisnis salah satunya diukur melalui jumlah investasi sebesar Rp. 2.019.340 juta (Tahun 2020) dengan jumlah Investor sebanyak 561 PMA/PMDN dan menyerap 10.800 tenaga kerja. 3. Dalam melayani basis data, masih belum sepenuhnya terintegrasi.
2	Regulasi Yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis	1. Belum Tersedianya *Roadmap* SIDa 2. Ketersediaan Sistem Perijinan Bisnis dan Investasi yang jelas a. Waktu b. Biaya c. Jumlah ijin yang dikeluarkan per tahun	1. Roadmap SIDa Belum Ditetapkan Melalui Peraturan Walikota Ternate. 2. Keputusan Walikota Ternate Nomor 92/II.17/KT/2020 tentang SOP dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi pada DPMPTSP. 3. Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengajukan Perizinan ke DPMPTSP Kota Ternate adalah 3-5 hari dengan tidak dipungut biaya. Jumlah Perizinan Yang Dikeluarkan per tahun rata-rata adalah 3.194 izin usaha (Tahun 2020)
3	Infrastruktur Dasar Inovasi dan Bisnis	1. Adanya inkubator bisnis dan/atau teknologi 2. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	1. Inkubator bisnis dan teknologi saat ini banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi Kota Ternate seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNKHAIR, juga melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. 2. Kota Ternate Telah Mencanangkan Pelayanan Berbasis Elektronik Dengan Mengembangkan Web Pemerintah Kota dan DPMPTSP Yang Memuat Berbagai Informasi Serta Pengajuan Pelayanan Perizinan Melalui Website.
4	Insentif untuk Inovasi dan Bisnis	Jumlah Jenis Insentif Untuk Inovasi dan Bisnis	Insentif di Kota Ternate Saat Ini Berupa Pemberian Fasilitas Untuk Pelaku Usaha Yang Memenuhi Persyaratan Menurut UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Sumber : RPJMD Kota Ternate 2021-2026 dan berbagai sumber pendukung, 2021

2. Kondisi Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek/Litbang serta Kemampuan Absorpsi Industri, khususnya UMKM

Lembaga litbang (Penelitian dan Pengembangan) di Kota Tenate cukup banyak baik dari pemerintah, masyarakat, swasta, maupun akademisi. Litbang tersebut memiliki kapasitas yang cukup baik karena dalam operasionalnya selalu menyentuh masyarakat baik dalam proses penelitian/pengembangan maupun implementasi teknologi hasil penelitian.

Tabel 1.31
Kondisi Daya Dukung Litbang dan Kemampuan
Absorpsi oleh UMKM Saat ini

No	Variabel	Indikator	Kondisi Saat Ini
1	Kelembagaan Litbang	Jumlah Lembaga Litbang	Pemerintah Kota Ternate telah memiliki badan litbang daerah yang berada di dalam Bappelitbangda. Selain itu, berbagai universitas ternama telah memiliki lembaga litbang seperti LPPM Universitas Khairun, LP3M UMMU, LP2M IAIN, dan sebagainya.
2	Daya Dukung Iptek/ Litbang	1. Jumlah sumber daya manusia iptek 2. Persentase pengeluaran pemerintah daerah untuk iptek/litbang terhadap PDRB dan/atau APBD	1. Saat ini belum ada data tentang jumlah peneliti/perekayasa di Kota Ternate. Namun, bila ditinjau dari banyaknya perguruan tinggi yang berkembang di Kota Ternate menunjukkan bahwa SDM IPTEK di Kota Ternate cukup tinggi. 2. Tahun 2016-2020 berturut-turut, anggaran litbang berkisar 0,13-0,17% dari total APBD per tahun. Sedangkan pada tahun anggaran 2021 sebesar 0,197% (Rp. 1.953.509.734,-).
3	Daya Absorpsi UMKM	1. Adanya program pelatihan dan pendampingan untuk UMKM 2. Adanya pelayanan inkubasi bisnis bagi UMKM	1. Tercatat terdapat beberapa pelatihan yang dilakukan di tahun 2016-2020 seperti pelatihan web marketing, pelatihan manajemen usaha, pelatihan kewirausahaan, dll. 2. Pelayanan inkubasi bisnis secara kelembagaan disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan menggandeng berbagai stakeholder yang kompeten.

Sumber: RPJMD Kota Ternate 2016-2021 dan berbagai sumber pendukung, 2021

3. Kolaborasi Bagi Inovasi dan Difusi Inovasi

Kota Ternate memiliki keunggulan dalam hal kelitbangan karena terdapat perguruan tinggi yang berdiri di kota ini. Lembaga penelitian yang terdapat di beberapa perguruan tinggi terpilih di Kota Ternate ini memiliki fokus penelitian atau penelitian unggulannya masing-masing.

Tabel 1.32
Lembaga Litbang Perguruan Tinggi di Kota Ternate

No	Perguruan Tinggi	Lembaga	Kegiatan
1	Universitas Khairun	LPPM UNIVERSITAS KHAIRUN	▪ Assesment Pencapaian Pembangunan Berbasis *Millenium Development Goals* (MDGs) Kota Ternate ▪ Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Meningkatkan kapasitas Fiskal Akselerasi Pembangunan Daerah Kota Ternate ▪ Analisis Kemampuan Keuangan Daerah untuk Meningkatkan kapasitas Fiskal Akselerasi Pembangunan Daerah Kota Ternate ▪ Kajian Daya Beli Masyarakat Terhadap bahan pangan pokok di Kota Ternate ▪ Pemetaan dan Strategi Pengambangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate ▪ Strategi Pengembangan Ternak Ruminansia berbasis wilayah Kepulauan di Kota Ternate ▪ Pemetaan Potensi Ekowisata di Kota Ternate (Analisis Potensi dan kelayakan Pengembangannya) ▪ Indikasi dan Analisis Potensi Pendapatan Asli daerah melalui Optimalisasi Pajak daerah dan retribusi daerah di kota Ternate ▪ Model Pengembangan Kompetensi Ketenagakerjaan Kota Ternate ▪ Pemetaan Potensi Komoditas Unggulan sektor pertanian dan perikanan kota ternate ▪ Kajian Kualitas dan Peningkatan Nilai Tambah Produksi Pangan Ruminansia di Kota Ternate "Kajian Khusus Daging Sapi" ▪ Kajian Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kota Ternate Pasca Penerapan Kebijakan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ▪ Strategi Penanganan Dampak Covid-19 Terhadap Aktifitas Ekonimi Pertanian dan Perikanan di kota Ternate **Diseminasi Penelitian 2020:** ▪ Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, *Pro-Active Fraud Audit, dan Whistle Blowing System* Terhadap Pencegahan Fraud dalam pengelolaan dana BOS (Studi Empiris pd sekolah dasar Kota Ternate ▪ Analisis Input-Output Ekonomi kota Ternate ▪ Analis Deskriptif ISPA pada Anak dan Balita di Pulau Moti ▪ Penelurusan Tanaman Bunga Telang (*Clitoria Ternatea Linn*) Sebagai tanaman Asli Pulau Ternate melalui Kajian Etnobotani ▪ Pemetaan Partisipatif kondisi Sanitasi Lingkungan pada permukiman di atas air di Kota Ternate
2	IAIN TERNATE	LP2M IAIN TERNATE	**Diseminasi Penelitian 2020:** ▪ Analisis Morfometrik dan Meristik ikan air tawar di danau Laguna dan danau Galela

No	Perguruan Tinggi	Lembaga	Kegiatan
3	UMMU	LP3M UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA	▪ Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate **Diseminasi Penelitian 2020:** ▪ Tinjauan Sistem Pengelolaan, Pengalengan dan Nilai Gizi Ikan Tuna Kering Kayu dengan subsitusi tepung tulang ikan pada kegiatan PPUPIK Rumah ikan ▪ Hubungan pencegahan dan penularan Tuberkulosis yang ditularkan ke anggota keluarga (TB) di wilayah kerja puskesmas perawatan Siko Kota Ternate ▪ Destinasi Destinasi wisata di kota Ternate (Gambaran Umum, Sejarah, dan Prospek) ▪ Insiden Penularan TB Paru dalam anggota keluarga di wilayah kerja puskesmas Siko Kota Ternate 0

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2021

4. Budaya Inovasi

Kota Ternate memiliki potensi dari sisi SDM yang unggul. Oleh sebab itu budaya inovasi harus disosialisasikan kepada masyarakat Kota Ternate khususnya kepada generasi muda. Peran pendidikan dan pelatihan adalah sebagai media dalam difusi inovasi agar memiliki kemanfaatan yang lebih besar. Infrastuktur pendidikan dan pelatihan berguna sebagai sarana pelatihan kerja atau laboratorium penelitian.

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan nilai IPM Kota Ternate setiap tahun, menunjukkan kemajuan yang dicapai Kota Ternate dalam pembangunan manusia sangat signifikan. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu ukuran kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan konsep BPS, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) indikator, yakni angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan paritas daya beli.

Kecepatan pembangunan manusia di Ternate pada 2020 mengalami perlambatan ditandai dengan pertumbuhan IPM yang terkontraksi sebesar 0,21 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2019 yang mencapai 1,55 persen. IPM Kota Ternate tahun 2020 adalah sebesar 79,82 lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya tahun 2019 sebesar 80,03. Jika diamati, angka IPM Kota Ternate terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2019. Tercatat IPM Kota Ternate tahun 2016 sebesar 77,80 dan terus meningkat hingga tahun 2019 angka IPM Kota Ternate menjadi 80,03, namun mengalami kontraksi di tahun 2020. Bila dilihat dalam lingkup Provinsi Maluku Utara, IPM Kota Ternate masih menduduki posisi pertama selama lima tahun terakhir dibandingkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Bahkan IPM Kota Ternate lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Ternate lebih maju dibidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Ternate telah berhasil menjadikan masyarakat Kota Ternate menjadi masyarakat yang berkualitas. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate

dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 1.33 di bawah ini.

Tabel 1.33
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya
Kota Ternate Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000)	Indeks Pembangunan Manusia
2016	70,17	15,06	11,13	12.643	77,80
2017	70,27	15,30	11,25	12.989	78,48
2018	70,50	15,72	11,26	13.166	79,13
2019	70,85	15,73	11,58	13.632	80,03
2020	70,97	15,74	11,71	13.091	79,82

Sumber: Ternate Dalam Angka, 2021

Budaya Inovasi telah dikembangkan antara lain melalui pelatihan kewirausaan. Budaya inovasi adalah satu syarat penguatan SIDa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui pelatihan umum untuk pemuda maupun kurikulum yang diberikan ke sekolah menengah.

Tabel 1.34
Kondisi Budaya Inovasi Saat Ini

No	Variabel	Indikator	Kondisi Saat Ini
1	Penguatan Budaya Inovasi melalui Pendidikan dan Pelatihan	1. Persentase jumlah lembaga pendidikan formal yang sudah memiliki kurikulum kewirausahaan terhadap seluruh lembaga pendidikan formal yang ada. 2. Persentase muatan kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan formal. 3. Persentase jumlah lembaga pendidikan non formal yang mendukung kewirausahaan terhadap seluruh lembaga pendidikan non formal yang ada.	1. Kurikulum tentang kewirausahaan telah diberikan di seluruh (100%) SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi di Kota Ternate. 2. Muatan Kewirausahaan telah diberikan di SMA/MK (sesuai kurirkulum 2013) dengan jumlah waktu pembelajaran yang cukup. Seluruh perguruan tinggi telah memiliki mata kuliah kewirausahaan dengan 2-3 SKS. 3. Data ini belum tersedia. Namun secara deskriptif sudah banyak lembaga yang memberikan pendidikan kewirausahaan seperti Balai Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.
2	Penguatan Kohesi Sosial	1. Ketersediaan sistem pengelolaan teknologi masyarakat 2. Jumlah prakarsa masyarakat terkait pengembangan teknologi masyarakat yang didukung Pemda 3. Jumlah program *reversed brain-drain*	1. Teknologi Informasi seperti *web marketing* saat ini sudah sangat berkembang di UMKM Kota Ternate. Selain itu di Kecamatan Ternate Utara telah menerapkan teknologi Menabung Air Hujan untuk mengatasi krisis air bersih. 2. Saat ini belum diinventarisir terkait hal tersebut. 3. Saat ini belum dilakukan.
3	Apresiasi dan Kampanye Inovasi	1. Jumlah kegiatan apresiasi karya inovatif per tahun 2. Jumlah kegiatan kampanye budaya inovasi per tahun 3. Apresiasi dari pemerintah daerah terhadap pemeroleh HKI dan/atau inovator lokal	1. Terdapat Produk UMKM yang rutin diadakan setiap tahun. 2. Tercatat kegiatan sosialisasi budaya inovasi yang pernah dilakukan. 3. Apresiasi ini belum dilakukan

No	Variabel	Indikator	Kondisi Saat Ini
4	Penumbuhan Usaha Baru Inovatif	1. Rasio wirausaha terhadap jumlah penduduk 2. Jumlah wirausaha inovatif/teknoprener baru yang mendapatkan bantuan teknis 3. Jumlah wirausaha inovatif/teknoprener baru yang mendapatkan insentif pembiayaan 4. Jumlah wirausaha inovatif/teknoprener baru yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan teknobisnis	1. Belum ada data terkait. Namun, di Kota Ternate sudah terdapat HIPMI yang mewadahi dan bertujuan meningkatkan jumlah pewirausaha di Ternate. 2. Sudah ada bantuan teknis diberikan Kepada Pelaku UMKM. 3. Belum ada data terkait yang spesifik. 4. Belum ada data terkait yang spesifik.

Sumber: RPJMD Kota Ternate 2021-2026 dan berbagai sumber pendukung, 2021

5. Keterpaduan Pemajuan Sistem Inovasi dan Klaster Industri Daerah dan Nasional

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, sebagai kota yang mengusung moto sebagai kota jasa, memfokuskan pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. Sektor UKM yang berkembang di Kota Ternate adalah sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, perikanan, pertanian dan peternakan. UKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate selama 2020 sebanyak 13.765 unit, dengan 21.723 orang tenaga kerja. UKM sektor Perdagangan merupakan UKM yang paling banyak di Ternate, yakni sebanyak 9.058 unit, dengan serapan tenaga kerja sebesar 12.683 orang.

Dan untuk mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, Pemerintah Kota Ternate berusaha membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang perdagangan tersebut, sehingga sarana perdagangan pun setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sektor perdagangan, maka selain dari segi sarana perlu juga dibantu dari segi permodalan. Dari data yang ada menunjukan, bahwa pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang berbadan hukum berjumlah 976, yang terdiri dari perseroan terbatas sebanyak 183 unit, CV sebanyak 421 unit, Koperasi sebanyak 46 unit, dan perorangan sebanyak 326 unit.

Tabel 1.34
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kota Ternate
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi UMKM yang Memperoleh Penghargaan/Award	%	1	1	1	1	1	0
Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	7,14	8,33	7,06	8,99	5,56	7,32

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perusahaan industri pengolahan di Indonesia ke dalam empat kategori : a) Industri kerajinan rumah tangga : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 1 – 4 orang, b) Industri kecil : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 5 – 19 orang, c) Industri sedang : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 20 – 99 orang dan d) Industri besar : usaha industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Hal tersebut lebih didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya (yang bekerja di perusahaan industri) tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi serta tidak memperhatikan model kapital yang digunakan.

Industri kecil mempunyai kedudukan yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan tidak berakta notaris, dan secara ekonomis mempunyai posisi tawar yang lemah dalam pasar karena sifat usahanya yang tidak terorganisir. Para pengusaha industri kecil kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi sebagai sarana untuk menggalang kekuatan usaha bersama, tetapi lebih suka bekerja sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang menjurus pada kompetisi yang merugikan, bahkan saling mematikan atau *cut throat competition*. Sektor industri di wilayah Kota Ternate didominasi oleh kelompok indsutri kecil dan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya modal dan teknologi yang digunakan. Walaupun masih beskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang dilakukan cukup besar maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate.

Pengembangan jenis usaha sektor industri berdasarkan informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate pada tahun 2020 jumlah perusahaan industri sebanyak 1.447 perusahaan dan tenaga kerja sebanyak 4.082 orang, yang terbagi menjadi : bidang kimia dan bahan bangunan sebanyak 369 perusahaan; bidang logam sebanyak 251 perusahaan; bidang pangan berjumlah 578 perusahaan; bidang sandang sebanyak 150 perusahaan dan; serta bidang kerajinan umum sebanyak 99 buah.

Walaupun masih berskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang di lakukan cukup besar, maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate. Jenis usaha yang potensial tersebut berupa industri batik Tubo, industri kue atau oleh-oleh khas Ternate, Ikan Asap (cakalang fufu), Industri kursi bambu Tongole serta berapa pelaku usaha industri kecil berskala rumah tangga atau home Industri. Industri jenis usaha ini sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai salah satu potensi yang dapat mendorong dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha industri. Adapun kinerja urusan perindustrian dapat diukur melalui indikator kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dan persentase pasar rakyat dalam konisi baik.

Tabel 1.35
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kota Ternate
Tahun 2015-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2015	Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB	%	9,97	6,65	1,73	4,05	2,05	-7,56
Persentase Pasar Rakyat Dalam Kondisi Baik	%	100	76,5	72,7	83,3	73,3	85,19

Sumber: RPJMD Kota Ternate 2021-2026, 2021

6. Keselarasan dengan Perkembangan Global

Kota Ternate telah meraih berbagai penghargaan di berbagai bidang sehingga kota ini dianggap mampu berdaya saing hingga lingkup global. Penghargaan tersebut di antaranya adalah:

Tahun 2020-2021

- Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nasional dengan predikat Madya Tahun 2021;
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2021;
- Penghargaan Anugerah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Award Tahun 2021;
- Penghargaan SAKIP RB AWARD dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tahun 2021;
- Peringkat ke I untuk Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award Tahun 2020;
- Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAK ASASI MANUSIA Tingkat Nasional Tahun 2020;

Tahun 2019

- Penghargaan Nasional Kota Sehat, Swasti Saba Wistara Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Penghargaan Kepatuhan Tinggi Bidang Pelayanan oleh Ombudsman RI tahun 2019;
- Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nasional dengan predikat Madya;
- Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAK ASASI MANUSIA Tingkat Nasional;
- Juara II Kategori Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Teknologi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja Kanreg XI BKN;
- Juara III kategori Perencanaan Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja Kanreg XI BKN;
- Juara III untuk ketegori Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja Kanreg XI BKN.

Di bidang ketahanan iklim, Kota Ternate, Maluku Utara masuk sebagai 10 kota terpilih program percontohan CRIC atau *Climate Resilent and Inclusive* bersama Kota Mataram, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Pekanbaru, Gorontalo, Banjarmasin, Cirebon, Samarinda, Pekanbaru, dan Kupang. Kesepuluh kota tersebut berkomitmen memastikan pembangunan daerah berketahanan iklim inklusif, lewat pengitegrasian perubahan iklim dalam agenda pembangunan di wilayah masing-masing.

United Cities and Local Goverments Asia Pacific United Cities (UCLG ASPAC) sebagai asosiasi pemerintah daerah adalah aktor kunci sebagai pusat manajemen pengetahuan tentang masalah pemerintah daerah di wilayah Asia Pacific. UCLG ASPAC memiliki sumber kepemimpinan yang kuat yang membutuhkan dukungan kerangka kerja dan kombinasi langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang dibutuhkan.

UCLG ASPAC memprakarsai terbentuknya *Climate Resilience Inclusive Cities* (CRIC), yang merupakan proyek lima (5) tahun dengan tujuan keseluruhan untuk mengusulkan proyek kerja sama berjangka panjang dan unit melalui kerja sama segitiga antara Kota dan pusat penelitian di Eropa, Selatan Asia (India, Nepal, Bangladesh), dan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand). Proyek ini akan berkontribusi pada pembangunan perkotaan terpadu yang berkelanjutan, tata pemerintahan yang baik, dan iklim adaptasi/mitigasi melalui kemitraan jangka panjang, dan perangkat seperti rencana aksi lokal yang berkelanjutan, alat peringatan dini, kualitas udara dan pengelolaan limbah yang berkonsultasi dengan para panel ahli.

Kegiatan CRIC ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan CRIC kepada pemerintah daerah di Indonesia sebagai kota percontohan potensial untuk penerapan, memberikan pemahaman keadaan terkini tentang isu perubahan iklim dan ketahanan di tingkat nasional dan subnasional level di Indonesia.

Selain itu hal ini juga bertujuan untuk memetakan kesenjangan di tingkat pemerintah daerah pada masalah iklim dan ketahanan, untuk memetakan kegiatan mitra pembangunan lainnya di sektor ini sehingga dapat mengidentifikasi potensi kolaborasi kerja, untuk mempromosikan peran utama Uni Eropa dalam mendukung aksi lokal pada energi dan iklim serta masalah ketahanan. Penanganan isu perubahan iklim dan ketahanan kota secara efektif tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek kunci seperti, ketepatan perencanaan di tingkat kota, pengendalian perubahan iklim di sektor terdampak dan penyediaan manfaat ikutan (*co-benefit*) terhadap sektor lain, menyasar kelompok-kelompok rentan dan lokasi yang berisiko, aksi yang terukur dan ketersediaan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

BAB II
TANTANGAN DAN PELUANG SIDa

Tantangan dan peluang yang dihadapi Kota Ternate dapat diketahui dengan mengkaji kondisi SOARs (*Strength, Opportunity, Aspiration, Result*) Road Map SIDa Kota Ternate. Tantangan didapatkan melalui analisis yang tergambarkan pada kelompok Kekuatan (*strength*).

Gambar 2.1
Pemanfaatan SOAR untuk Penggambaran Tantangan dan Peluang

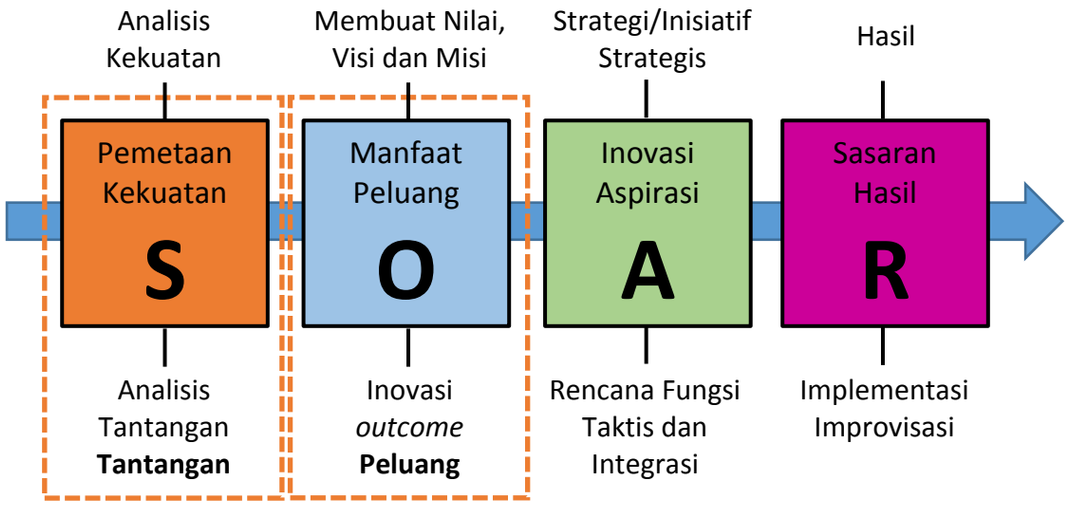

Sesuai dengan tema prioritas Road Map SIDa Kota Ternate yaitu perdagangan dan jasa, peluang dan tantangan yang ada difokuskan kepada 10 aspek yang berkaitan dengan tema prioritas tersebut. Penentuan peluang dan tantangan ini tetap mengacu pada 6 KKI (Kerangka Kebijakan Inovasi) yang menjadi pilar penguatan SIDa Kota Ternate. Peluang dan tantangan Road Map SIDa Kota Ternate tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Peluang dan Tantangan Penguatan SIDa Tema Perdagangan dan Jasa
Di Kota Ternate

No	Aspek	Kondisi	Peluang	Tantangan
MICE dan Pariwisata				
1	Pariwisata dan MICE	Perkembangan sektor pariwisata semakin baik dilihat dari pertumbuhan hotel, peningkatan jumlah wisatawan, dan aktivitas konferensi	▪ Kota Ternate berkomitmen sebagai kota MICE andalan Maluku Utara merupakan peluang dukungan dari Pemerintah Provinsi ▪ Sebagai pintu gerbang provinsi Maluku Utara, Kota Ternate juga menjadi pusat aktivitas Pemerintahan, baik kegiatan pertemuan maupun event.	Dalam skala nasional, Kota Ternate masih kalah unggul dibanding kota lain seperti Manado, Makassar dan lainnya

No	Aspek	Kondisi	Peluang	Tantangan
2	*City Branding*	Kota Ternate sudah memiliki *City Branding* yang perlu lebih dipromosikan	Geliat pariwisata domestik dan tidak menutup kemungkinan internasional yang sedang tinggi dapat dijadikan peluang Kota Ternate untuk mengembangkan inovasi dengan berbagai macam event yang mencitrakan Kota Ternate	Klaster-klaster UMKM harus bersaing dengan UMKM di kota lain yang tidak kalah kreatif bahkan lebih unggul dan berkarakter khas
MICE dan Pariwisata				
3	Koperasi dan UMKM	Pembinaan klaster UMKM masih harus ditingkatkan lagi	▪ Adanya penghargaan Bakti Koperasi dan UMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan semangat pelaku usaha untuk semakin meningkatkan kualitas. ▪ Persaingan untuk berwirausaha di Kota Ternate yang belum terlalu “negatif”, hal ini dapat dijadikan peluang kemudahan untuk mengembangkan inovasi ▪ Keterlibatan yang besar dari lembaga-lembaga akademisi untuk membina UMKM	Kota-kota lain telah membina dan mengembangkan UMKM sebagai ekonomi kreatif yang dapat menjadi pesaing bagi UMKM Kota Ternate
4	Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran rendah dan akses tenaga kerja terbilang sudah baik, pemanfaatannya yang perlu ditingkatkan	▪ Pemberdayaan kewirausahaan di Kota Ternate yang cukup baik (pendampingan oleh Pemerintah dan stakeholder lainnya) dapat dijadikan modal sosial peningkatan usaha-usaha kreatif dan inovatif sekaligus menurunkan tingkat pengangguran karena terjadi penyerapan tenaga kerja ▪ Akses terhadap lowongan pekerjaan secara online perlu dipromosikan	▪ Keberadaan pendatang dari kota lain yang lebih unggul apabila tidak diantisipasi dapat mengancam keberadaan tenaga kerja lokal ▪ Persaingan tenaga kerja mulai merambah dunia digital
5	Sarana dan Prasarana Penunjang	Upaya Pemerintah Kota Ternate dalam penyediaan sarana prasarana pendukung perdagangan sudah sangat baik, tetapi masih perlu peningkatan dalam hal kualitas pelayanan	▪ Akses Kota Ternate yang lengkap baik udara, darat dan laut ▪ Penelitian-penelitian akademisi tentang sarana prasarana di Kota Ternate dapat dijadikan bahan evaluasi	▪ Perubahan iklim yang sulit diprediksi menyebabkan bencana bisa datang sewaktu-waktu, sehingga dapat mengancam iklim investasi dan pariwisata ▪ Kualitas layanan bandara masih perlu ditingkatkan, sehingga mempengaruhi tingkat pelayanan dan kepuasan pengunjung

No	Aspek	Kondisi	Peluang	Tantangan
6	Iklim Investasi	Iklim investasi di Kota Ternate semakin baik dari tahun ke tahun. Namun, perlindungan hukum belum ada dan informasi secara online masih belum memuaskan	▪ Masih adanya pengembangan kawasan di Kota Ternate, dapat menarik minat investor ▪ Website BKPM dan DPMPTSP Kota Ternate yang sudah tersedia dapat ditingkatkan kemanfaatannya sehingga informasi yang ditampilkan dapat lebih banyak dan mendetail	▪ Kota Ternate telah memiliki Perda tentang penanaman modal dan investasi. ▪ Persentase Pertumbuhan Investasi di Kota Ternate Ternate (dibanding tahun sebelumnya) cenderung menurun, hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19.
7	Lembaga Keuangan	Keberadaan Lembaga Keuangan sudah sangat mendukung perdagangan dan jasa	Ada banyak lembaga keuangan yang siap memberikan bantuan permodalan sehingga memudahkan dalam pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM, sehingga peran pemerintah adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat	Perlu ada pelatihan dan pembinaan agar UMKM dapat memanfaatkan atau memanajemen bantuan permodalan dengan baik
8	Pelayanan Pemerintah	Pelayanan pemerintah dalam hal penyediaan cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan dengan berbagai inovasi kemudahan dalam perizinan dan pengaduan	Ada banyak lembaga keuangan yang siap memberikan bantuan permodalan sehingga memudahkan dalam pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM, sehingga peran pemerintah adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat	▪ Belum maksimalnya penerapan fasilitas *e-government* yang masih bisa untuk dikembangkan ▪ Ketersediaan infrastruktur internet yang cukup baik di Kota Ternate mendukung program *e-government* untuk disosialisasikan kepada masyarakat
9	Pasar Tradisional dan Modern	Inisiasi telah muncul dan beberapa program telah berjalan. Namun, masih banyak kendala yang terjadi seperti keterlambatan implementasi dan belum ada promosi kreatif untuk pasar tradisional	▪ Pasar-pasar yang sudah direvitalisasi dapat menjadi peluang sebagai objek wisata tempat menjual oleh-oleh khas Ternate ▪ Telah adanya kebijakan tentang toko modern dapat dimaksimalkan implementasinya untuk melindungi pasar tradisional	▪ Revitalisasi pasar yang tidak berjalan sesuai rencana dapat mematikan aktivitas pasar yang dampak jangka panjangnya akan menurunkan tingkat perekonomian Kota Ternate ▪ Semakin tingginya pembangunan toko modern dapat mematikan aktivitas pasar tradisional apabila tidak ada inovasi dalam mempromosikan keunggulan pasar tradisional

No	Aspek	Kondisi	Peluang	Tantangan
10	PKL (Pedagang Kaki Lima)	Penataan di pusat aktivitas sudah baik. Perlu ada perluasan area dan perlu ada inovasi tematik dalam penataan PKL	PKL di Kota Ternate dapat dijadikan sebagai area wisata kuliner Kota Ternate seperti di Belakang Mall Jatiland	Apabila tidak ada regulasi dan pengawasan, keberadaan PKL dapat menjadi masalah estetika kota

Terdapat isu-isu strategis yang penting dan sangat menentukan dalam Penguatan SIDa di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penguatan SIDa dalam tema prioritas perdagangan dan jasa, maka ada beberapa hal yang menjadi peluang seperti kondisi perkembangan pariwisata dan MICE yang baik, iklim investasi yang kondusif, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung, dan ketersediaan bantuan permodalan yang cukup beragam. Adanya lembaga pendidikan atau perguruan tinggi di Kota Ternate juga menjadi poin keunggulan bagi Kota Ternate, karena Pemerintah Kota Ternate dapat bekerja sama dalam hal penelitian-peneltiian yang mendukung pembangunan. Keberadaan kerja sama antar daerah melalui Kerjasama Segitiga Emas, antara Kab. Halmahera Barat, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, juga memberikan peluang yang sangat baik yang harus terus disinergiskan kemanfaatannya.

Selain peluang tersebut, penguatan SIDa di Kota Ternate juga memiliki tantangan. Persaingan dengan kota-kota besar lainnya merupakan tantangan yang cukup penting dalam pengembangan perdagangan dan jasa khususnya dari faktor eksternal. Sedangkan dari faktor internal, secara umum tantangan bagi Kota Ternate adalah keterbatasan kualitas layanan dari fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Ternate, misalnya kapasitas layanan bandara, investasi yang kondusif yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan, dan pengoptimalan layanan *e-government* yang belum maksimal. Dapat dikatakan, Kota Ternate telah memiliki seluruh elemen yang dibutuhkan untuk melakukan penguatan SIDa terutama terkait perdagangan dan jasa, tetapi permasalahan utamanya adalah pemanfaatannya yang belum maksimal.

BAB III
KONDISI UMUM SIDa YANG AKAN DICAPAI

3.1 KONDISI UMUM SIDa YANG AKAN DICAPAI

Dalam mewujudkan SIDa di Kota Ternate, maka keenam KKI yang menjadi pilar dari SIDa harus dibangun terlebih dahulu. Dan berdasarka hal tersebut, berikut ini adalah kondisi SIDa secara umum yang akan dicapai.

Gambar 3.1
Analisis SOAR dalam Menggambarkan Kondisi SIDa yang Akan Dicapai

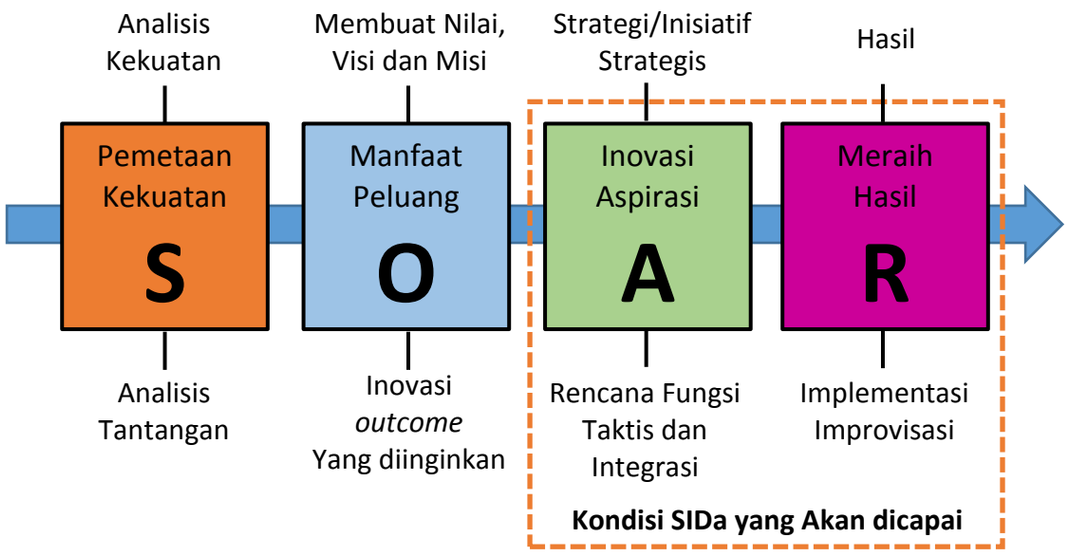

Tabel 3.1
Aspirasi dan Hasil Kondisi SIDa Yang Akan Dicapai

Aspirasi (Aspiration)	Hasil (Result)
▪ Pengembangan Pariwisata. ▪ Kemudahan Berusaha (Perizinan) ▪ Pemberian Insentif Pajak Bagi Usaha. Yang Meningkatkan Citra Kota Ternate ▪ Inovasi Produk Makanan. ▪ Dukungan Kebijakan dari Pemerintah, Dunia Usaha, dan Perbankan. (pemberdayaan ekonomi masyarakat) ▪ Pemetaan investasi Kota Ternate.	▪ Terwujudnya Kampung Wisata Sebagai Inovasi Pariwisata Kota Ternate. ▪ Berkembangnya Jasa Pendukung Wisata Lainnya (MICE dan Perdagangan Besar-Eceran). ▪ Penyederhanaan Persyaratan Dan Pengembangan IT Untuk Transparasi Layanan. ▪ Terciptanya Aneka Makanan Olahan Berciri Khas Ternate. ▪ Berkembangnya UMKM Olahan Makanan Khas Ternate. ▪ Kota Ternate Menjadi Ramah Investasi.

Sumber : Kajian Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Ternate, 2021

Kota Ternate oleh para pemangku kepentingan diharapkan menjadi salah satu kota yang mampu menyediakan jasa pariwisata dengan potensi inovasi yaitu Kampung Wisata. Selain itu Kota Ternate diharapkan dapat memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai baik akses dalam hal transportasi maupun akses daring untuk pelayanan pemerintah. Dengan begitu, diharapkan adanya kemudahan serta transparasi pelayanan masyarakat.

Potensi lain yang disebut-sebut menjadi ciri khas Kota Ternate adalah produk aneka makanan olahan khas. Diharapkan inovasi Kota Ternate juga dapat berkembang dalam hal produksi dan pemasaran makanan olahan khas seperti bagea kenari, air guraka, manisan pala, kue makron, pisang mulut bebek, ikan fufu, kopi rempahdan lain-lain.

Pelayanan pemerintah yang harus ditingkatkan di antaranya adalah kemudahan dalam perizinan untuk berinvestasi dan berkegiatan usaha di Kota Ternate. Untuk memudahkan investasi, perlu adanya peta peluang investasi di Kota Ternate, yang dapat sangat membantu investor untuk merencanakan dan memiliki jenis dan lokasi investasi yang sesuai dengan kondisi Kota Ternate. Selain itu perlu juga didorong dengan adanya insentif untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan potensi Kota Ternate pada periode tertentu.

Implementasi sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi juga harus diwujudkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya di sektor-sektor yang mendukung kegiatan usaha perdagangan dan jasa. Sesuai dengan hasil yang diharapkan yaitu produk makanan olahan khas Kota Ternate, maka masyarakat dapat dibina untuk mengembangkan inovasi dan TTG (Teknologi Tepat Guna) dalam pengembangan produk makanan olahan khas. angan produk makanan olahan khas.

Tabel 3.2
Kondisi Umum SIDa Yang Akan Dicapai

No	KKI	Variabel	Kondisi Umum yang Akan Dicapai
1	Kerangka Umum Inovasi dan Bisnis	1. Basis Data Inovasi dan Bisnis 2. Regulasi yang Kondusif bagi Inovasi dan Bisnis 3. Infrastruktur Dasar Inovasi dan Bisnis 4. Insentif untuk Inovasi dan Bisnis	1. Peningkatan inventarisasi data-data terkait inovasi dan bisnis di Kota Ternate dengan sistem satu pintu seperti di bawah koordinasi Litbang/Bappeda Kota 2. Penetapan regulasi yang memudahkan masyarakat dan investor dalam berinovasi dan berbisnis 3. Peningkatan dukungan inovasi berupa incubator, pendanaan, dan laboratorium, serta peningkatan pemanfaatan pelayanan e-gov 4. Pengadaan insentif untuk kegiatan inovasi yang memajukan produk lokal Kota Ternate
2	Kolaborasi Inovasi dan Difusi Teknologi	1. Kemitraan Strategis dan Kolaboratif untuk Inovasi 2. Peningkatan Difusi Inovasi 3. Perkembangan wahana interaksi pelaku inovasi 4. Pelayanan berbasis teknologi	1. Kerjasama Litbang Kota dengan berbagai pihak meningkat 2. Iklim riset dan pemanfaatan pakar di Kota Ternate meningkat 3. Kota Ternate mampu menjadikan teknologi dan memanfaatkan riset dalam setiap rencana pembangunan 4. Peningkatan pemberian layanan e-gov dan jumlah penggunanya.
3	Daya Dukung Litbang dan Absorpsi UMKM	1. Kelembagaan Litbang 2. Daya dukung Litbang 3. Daya Absorpsi UMKM	1. Peran Litbang Kota semakin kuat untuk menciptakan iklim riset di Kota Ternate 2. Peningkatan % APBD untuk riset mencapai 1% dari total PBD 3. UMKM mampu memanfaatkan teknologi tepat guna dalam peningkatan produksi

No	KKI	Variabel	Kondisi Umum yang Akan Dicapai
4	Budaya Inovasi	1. Penguatan budaya inovasi melalui pendidikan dan pelatihan 2. Penguatan Kohesi Sosial 3. Apresiasi dan ampanye Inovasi 4. Penumbuhan Usaha Baru Inovatif	1. Materi kewirausahaan telah ada di 100% SMA, SMK, dan PT. 2. Pemerintah Kota Ternate bersama-sama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat memberikan dukungan baik pendanaan, pembinaan, dan promosi TTG hasil temuan masyarakat. 3. Penyelenggaraan pameran inovasi dan UMKM rutin tiap tahun. 4. Peningkatan jumlah wirausaha meningkat menjadi minimal 2% dari jumlah penduduk Kota Ternate.
5	Keterpaduan Sistem Inovasi dan Perkembangan Klaster	1. Prakarsa Klaster Industri Unggulan Daerah dan/atau Prakarsa Sistem Inovasi 2. Koordinasi Kebijakan Daerah-Nasional 3. Penguatan Kelembagaan Khusus klaster industri	1. Prakarsa Klaster Industri Unggulan Daerah dan/atau Prakarsa Sistem inovasi 2. Koordinasi Kebijakan Daerah-Nasional 3. Penguatan Kelembagaan Khusus klaster industri
6	Keselarasan dengan Perkembangan Global	1. Lingkungan 2. Standardisasi 3. HKI 4. Ketenagakerjaan	1. Kota Ternate konsisten dalam keikutsertaan di bidang pelestarian lingkungan 2. Seluruh teknologi industri dan produk lokal inovatif telah memiliki standardisasi internasional 3. HKI dan paten mulai dilakukan oleh para pelaku usaha 4. Tenaga kerja di Kota Ternate sudah bersertifikasi kompetensi

3.2 KONDISI PERDAGANGAN DAN JASA YANG AKAN DICAPAI

Untuk mengetahui kondisi SIDa Bertema Perdagangan dan Jasa yang akan dicapai di Kota Ternate, maka perlu dilakukan analisis komparatif dan kompetitif wilayah untuk melihat kondisi sektor yang saat ini telah mengalami ketidakefisienan, sehingga terjadi peralihan kontribusi terhadap kinerja perekonomian wilayah. Berbagai metode perhitungan yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis yang ada dalam suatu perekonomian. Salah satu metode yang bisa dipergunakan adalah metode *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ ini merupakan suatu metode statistik yang menggunakan karakteristik output/nilai tambah untuk menganalisis dan menentukan keberagaman dari basis ekonomi (*economic base*) masyarakat daerah/lokal. Dengan menggunakan data PDRB sebagai indikator, analisis *Location Quotient* dilakukan untuk melihat keberadaan sektor maupun komoditas sebagai sektor basis di wilayah Kota Ternate.

Analisis basis ekonomi atau komparatif wilayah Kota Ternate melalui analisis LQ dipandang perlu untuk mengetahui sektor unggulan. Analisis LQ sering digunakan untuk mengestimasi sektor yang memiliki karakteristik yang dapat membawa sejumlah unit uang kepada masyarakat melalui ekspor barang dan jasa. Berdasar hasil analisis LQ dari setiap subsektor yang ada pada PDRB Kota Ternate tahun 2017, ternyata dari 17 sektor PDRB terdapat sekitar 5 sektor yang bukan merupakan sektor basis karena memiliki nilai LQ lebih kecil dari 1 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor

pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sedangkan 12 sektor lainnya merupakan sektor basis. Pada tahun 2018 sektor bukan basis menurun menjadi 4 sektor yakni terjadi perubahan pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang pada tahun 2017 bukan merupakan sektor basis tapi pada tahun 2018 mengalami perubahan struktur dan menjadi sektor basis. Sehingga sektor basis menjadi 13 sektor. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Hasil Analisis LQ di Kota Ternate Tahun 2017 dan 2018

Lapangan Usaha	*Location Quotient* (LQ)	
	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0.1540	0.1594
Pertambangan dan Penggalian	0.0070	0.0067
Industri Pengolahan	0.5958	0.4297
Pengadaan Listrik dan Gas	**1.5114**	**1.4826**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.9102	0.9195
Kontruksi	**1.0207**	**1.0237**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**1.4281**	**1.4535**
Transportasi, Pergudangan	**2.6677**	**2.6760**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**2.4795**	**2.4088**
Informasi dan Komunikasi	**2.1193**	**2.1725**
Jasa Keuangan dan Asuransi	**2.1826**	**2.2332**
Real Estate	**2.0061**	**2.0273**
Jasa Perusahaan	**2.3686**	**2.4078**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.9922	**1.0227**
Jasa Pendidikan	**1.3744**	**1.3977**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	**1.5294**	**1.5599**
Jasa Lainnya	**2.3903**	**2.4642**

Sumber: Olahan Data Sekunder PDRB Kota Ternate, 2020

Berdasarkan hasil analisis LQ diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017 dan 2018, peranan sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa keuangan serta beberapa sektor lainnya merupakan sektor basis, ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut dalam perekonomian wilayah Kota Ternate mempunyai kemampuan menarik pendapatan yang berasal dari luar daerah, sehingga mampu memberikan peningkatan pada perputaran konsumsi yang ada di wilayah Kota Ternate, yang pada akhirnya akan meningkatkan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah. Karena besarnya peran sektor tersebut terhadap proses peningkatan output suatu wilayah, melalui proses *multiplier*, maka subsektor dimaksud dapat di sebut sebagai *leading sector* bagi perekonomian daerah. Berdasarkan pemahaman tersebut sektor-sektor basis diidentikkan dengan sektor yang mampu dikirim keluar daerah dan dapat menciptakan aliran pendapatan yang berasal dari luar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai siklus konsumsi di wilayah itu.

Sebagai gambaran umum untuk wilayah Kota Ternate, secara spasial memiliki posisi strategis karena merupakan daerah penghubung antar wilayah di Provinsi Maluku Utara sehingga memiliki keterkaitan baik dalam mobilitas

penduduk maupun mobilitas barang dan jasa yang cukup besar. Kondisi demikian menyebabkan Kota Ternate memiliki keuntungan lokasi yang dapat dimanfaatkannya sebagai salah satu sumber tambahan aliran uang ke daerahnya atau dikenal dengan *intervening opportunity*. Ternyata *intervening opportunity* dimanfaatkan oleh Kota Ternate, hal ini terlihat dari peranan sektor sektor transportasi dan sektor informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu sektor basis, selain sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa, sektor perdagangan, sektor penyediaan akomodasi serta sektor jasa keuangan, sektor jasa perusahaan yang juga merupakan sektor basis.

Kaitan dengan aspek pertanian, kehutanan dan perikanan, walaupun bukan merupakan sektor basis tetapi bila ditunjang oleh sektor andalan wilayah kota dalam hal ini dari sektor transportasi dan pergudangan, serta perdagangan dan jasa diharapkan dapat menunjang pengembangan sektor pertanian dan dijadikan wilayah inti yang menerima pasokan bahan pangan dari wilayah *hinterland* (sentra produksi), yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB.

Penjelasan dengan menggunakan analisis LQ tersebut dapat didukung dengan analisis *shift-share* (SSA) yang dapat menggambarkan pergeseran suatu sektor pada wilayah Kota Ternate dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang setingkat diatasnya (dalam hal ini wilayah Propinsi Maluku Utara). Analisis menggunakan dua titik tahun yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Dalam analisis *shift share* ini terdiri dari nilai komponen *growth economic*, nilai komponen proporsional (*proportional shift)*, dan nilai komponen diferensial (*differential share)*. Hasil analisis *shift share* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* Kota Ternate
Tahun 2017 dan Tahun 2018

Lapangan Usaha	Pergeseran Proporsional	Pergeseran Diferensial
	Propinsi Maluku Utara	Kota Ternate
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	-0.088	-0.047
Pertambangan dan Penggalian	**0.077**	**0.019**
Industri Pengolahan	**0.399**	-0.034
Pengadaan Listrik dan Gas	-0.049	-0.065
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.037	-0.024
Kontruksi	**0.018**	**0.020**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.004	**0.015**
Transportasi, Pergudangan	-0.001	**0.002**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**0.007**	-0.024
Informasi dan Komunikasi	-0.030	-0.001
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0.051	-0.023
Real Estate	-0.010	**0.002**
Jasa Perusahaan	-0.031	-0.011
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.034	**0.001**
Jasa Pendidikan	-0.057	-0.036
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.016	**0.007**
Jasa Lainnya	**0.005**	**0.038**

Sumber: Olahan Data Sekunder PDRB Kota Ternate dan Maluku Utara, 2020

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis SSA menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara secara agregat sebesar 0,162. Artinya bahwa secara agregat tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki

perkembangan positif atau dapat dikatakan produktivitas kinerja ekonomi Propinsi Maluku Utara pada dua periode tahun tersebut mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena komponen *share* dari sektor-sektor penting atau penentu juga mengalami peningkatan.

Laju pertumbuhan yang dihasilkan dari kontribusi berbagai sektor PDRB cenderung bersifat lamban. Hasil ini menunjukkan secara spasial dapat dilihat nilai komponen *proportional shift* hampir semua sektor dapat dikatakan berjalan lambat, walaupun nilai komponen *share* memiliki nilai positif, bahkan ada dari sektor penyumbang PDRB yang menghasilkan nilai negatif jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan total yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (-0.088), sektor Pengadaan Listrik dan Gas (-0.049), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah dan daur ulang (-0.037), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (-0.004), sektor transportasi dan pergudangan (-0.001), sektor informasi dan komunikasi (-0.030),sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (-0.051), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0.034) serta sektor jasa pendidikan (-0.057) dan sektor lainnya (lihat tabel diatas). Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar terdapat pada sektor Industri Pengolahan (0.399), sektor pertambangan dan penggalian (0.077), serta sektor konstruksi (0.018) dibandingkan pertumbuhan sub sektor secara keseluruhan. Khususnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan, sesuai hasil analisis nilai *proporsional shift* negatif, kondisi ini bertolak belakang dengan nilai pertumbuhan ekonominya. Hal ini memperlihatkan *performance* yang menurun terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami pergeseran yang proporsional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai proporsional *share* yang negatif. Fenomena pergeseran ini diduga terjadi karena ketidakefisienan dalam pengelolaan potensi sumberdaya.

Sedangkan jika ditinjau dari aspek nilai *differential share* PDRB khususnya di Kota Ternate, nilai tertinggi dan memiliki kontribusi positif terdapat pada sektor Jasa Lainnya yaitu sebesar 0,038, kemudian dikuti oleh sektor Kontruksi sebesar 0,020 dan sektor Pertambangan dan Penggalian yakni 0,019, serta beberapa sektor lainnya. Sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan dan beberapa sektor lainnya bernilai negatif (lihat tabel analisa). Hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan perekonomian wilayah yakni kesulitan mendapatkan faktor-faktor produksi seperti benih/bibit unggul, pupuk, serta sarana produksi lainnya sehingga hanya petani/nelayan dengan teknologi tinggi dan bermodal besar yang memperoleh keuntungan maksimal atas kondisi demikian. Sementara itu, banyak dari para petani ataupun pelaku pertanian yang meninggalkan aktivitas pertanian (dalam hal ini untuk komoditas) karena adanya konversi lahan ataupun rendahnya kualitas dalam pengelolaan lahan secara produktif. Hal yang sama juga berlaku untuk sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa pendidikan, serta sektor penyediaan makan dan minum serta beberapa sektor lainnya yang menunjukkan nilai negatif dalam sumbangan terhadap perekonomian Kota Ternate. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dikatakan bahwa perkembangan subsektor tersebut di wilayah Kota Ternate berjalan dengan lambat, bahkan telah mengalami pergeseran, belum memberikan sumbangan yang berarti serta tidak memiliki keunggulan kompetitif terhadap pembangunan di Kota Ternate.

Berdasarkan gambaran program kerja secara umum yang tercantum dalam RPJMD tentang perdagangan dan jasa dan klasifikasi oleh Manning dan Aswicahyono (2012), berikut ini adalah 10 aspek-aspek yang terkait dengan sektor perdagangan dan jasa yang perlu menjadi perhatian.

Tabel 3.5
Aspek Perdagangan dan Jasa yang Dibahas dalam Road Map SIDa

Subtema	Aspek Terkait
MICE dan Pariwisata	1. *City Branding*; sentra-sentra ekonomi potensial berkarakteristik khusus, informasi produk dan kegiatan pariwisata hingga tingkat internasional, kunjungan wisatawan, event-event budaya dan aset kekayaan budaya. 2. *Pariwisata dan MICE*; jumlah kamar hotel dan akomodasi lainnya, jumlah pertemuan bisnis, tujuan destinasi wisata, daya saing dan daya jual destinasi wisata.
Jasa Pendukung Industri	3. *Tenaga Kerja*; sistem informasi untuk wirausahawan baru, pelatihan wirausaha, fasilitas permodalan, pemanfaatan tekonologi dalam produksi, angka pengangguran. 4. *Iklim Investasi*; data dan informasi yang jelas bagi investor, kepastian hukum dalam investasi, pelayanan perijinan investasi, peta potensi investasi. 5. *Sarana Prasarana Kota Penunjang Perdagangan*; ruang publik bagi pejalan kaki, penanganan dan pengendalian banjir, kebutuhan transportasi masyarakat skala regional, nasional maupun internasional, penanganan dampak perubahan iklim, sarana prasarana transportasi massal. 6. *Lembaga Keuangan*; jumlah lembaga bank maupun nonbank, bantuan permodalan. 7. *Pelayanan Pemerintah*; indeks kepuasan masyarakat, standar mutu pelayanan, sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan publik. 8. *Koperasi dan UMKM*; jumlah koperasi dan UMKM, akses permodalan, tenaga kerja di masing-masing sektor.
Perdagangan Besar dan Eceran	9. *Pasar Tradisional dan Modern*; revitalisasi, sarana dan prasarana pasar, kerjasama antara retail dan pedagang tradisional, jumlah pasar tradisional modern, promosi pedagang dan pasar tradisional. 10. *PKL (Pedagang Kaki Lima)*; penataan PKL, revitalisasi ruang publik.

Sumber: Olahan RPJMD Kota Ternate 2021-2026; Manning dan Aswicahyono (2012)

Sepuluh aspek tersebut dibahas dalam kaitannya dengan keenam Kerangka Kebijakan Inovasi yaitu (1) Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, (2) Kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM, (3) Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi, (4) Budaya inovasi (5) Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional, dan (6) Keselarasan dengan perkembangan global. Pembahasan tersebut dibahas secara deskriptif kualitatif dengan pemberian penilaian berdasarkan data-data sekunder dan pendapat berbagai pihak. Penilaian capaian dalam analisis ini digolongkan menjadi beberapa yaitu:

- Sangat Baik: Capaian Kota Ternate lebih unggul atau sama baiknya dengan kota pembanding.
- Baik: Capaian Kota Ternate sudah cukup dan setara dengan kota pembanding, walaupun kota pembanding lebih unggul.
- Capaian dengan deskripsi: Capaian Kota Ternate masih perlu ditingkatkan dan jika diperlukan dapat mencontoh kota pembanding.

Berikut ini adalah penilaian tentang harapan dan capaian Kota Ternate dalam melakukan penguatan inovasi di bidang perdagangan dan jasa, untuk masing-masing sub tema Road Map SIDa Kota Ternate.

3.2.1 Subtema MICE dan Subtema Pariwisata

Kini Kota Ternate baru memiliki branding "*Ternate Kota Rempah*", sehingga gema *branding* Kota Ternate tersebut masih belum terlihat. Hal ini dapat terlihat dari masih kurangnya pemanfaatan branding tersebut untuk mempromosikan Ternate dalam berbagai kegiatan. Selain itu, klaster UMKM Kota Ternate yang masih belum memiliki ciri khas yang terkait dengan branding Kota Ternate tersebut. Perencanaan konsep *city branding* ini dilakukan sejak tahun 2019. *City branding* memiliki arti tentang identitas dari suatu kota untuk memasarkan segala aktivitas dari kota tersebut, terutama pada potensi wisata dan budayanya. Dari hasil kajian, ada dua tanaman yang mendunia, yaitu cengkih dan pala, sehingga rempah menjadi sebuah kekuatan Kota Ternate. Dengan demikian, bisa ditetapkan branding Ternate adalah Kota Rempah. *City Branding* tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus ada gerakan kerja sama dan dukungan program serta aksi-aksi di lapangan yang mendukung, sehingga branding Kota Ternate yang bisa dikenal dunia.

Tabel 3.6
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek *City Branding*

Harapan	Capaian
Terdapat Sentra Ekonomi Berkarakteristik Khusus	Pemerintah Kota Ternate belum secara menyeluruh mengoptimalkan dan menumbuhkembangkan kerjasama antar lembaga sosial dan budaya, dalam hal ini Kesultanan Ternate dengan lembaga sosial dan budaya lainnya. Kota Ternate juga menjadi anggota jejaring kota kreatif nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi kreatif berbasis komunitas kepemudaan juga dapat memberikan kontribusi, apabila di kolaborasikan pada potensi kearifan lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Ternate berbasis lokal. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Dan jika ditelaah lebih jauh lagi, Kota Ternate harus tetap dapat merawat dan menjaga nilai-nilai kultur Ternate dalam interaksi sosial masyarakat dan lembaga.
Terdapat Informasi Produk Dan Kegiatan Pariwisata Hingga Tingkat Internasional	TERNATE Kota Rempah Di ulang tahun Kota Ternate ke-771, pada tanggal 29 Desember 2021 Kota Ternate me-launching *city branding* yaitu "Ternate Kota Rempah". Sejarah mencatat bahwa Ternate pada masa lampau merupakan Kota bandar internasional yang menjadi salah satu pusat kawasan rempah dunia bersama Tidore, Moti, Bacan dan lainnya yang secara mundial dikenal sebagai Dunia Maluku. Ternate sebagai bagian dari kepulauan Maluku pada saat itu menjadi titik temu dan perkenalan nusantara dengan dunia luar bermula.

Walaupun begitu, Kota Ternate tidak berjalan di tempat dan mulai berkembang sedikit demi sedikit. Upaya Pemerintah Kota Ternate yang didukung juga oleh komunitas-komunitas dan intitusi swasta dalam membranding Kota Ternate perlu diapresiasi. Hal ini yang dapat dijadikan kekuatan unggulan Kota Ternate dalam *city branding* yang harus terus ditingkatkan. Kondisi pariwisata dan MICE di Kota Ternate cukup berkembang.. Hal ini dibuktikan dengan berbagai event yang inovatif dan kreatif yang mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Adanya peningkatan jumlah hotel berbintang yang menyediakan ruang pertemuan juga menunjukan bahwa Kota Ternate semakin diminati sebagai tujuan MICE. Sesuai dengan subtema yang akan dikembangkan sebagai tema prioritas SIDa Kota Ternate, pariwisata dan MICE memiliki potensi yang cukup menjanjikan di Kota Ternate.

Tabel 3.7
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek Pariwisata dan MICE

Harapan	Capaian
Terdapat Sentra Ekonomi Berkarakteristik Khusus	Potensi budaya yang menonjol adalah kekayaan kuliner, event budaya, pagelaran seni tari, musik dan pertunjukan budaya. Festival Legugam dan Pesta Komunitas adalah salah satu event budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, yang salah satu tujuannya adalah untuk memperingati hari Ulang Tahun Sultan Ternate dan Hari Jadi Ternate (HAJAT). Ternate memiliki berbagai organisasi kesenian yang menambah khasanah kunjungan wisatawan ke Kota Ternate. Capaian: Sangat baik dan berkembang
Peningkatan Jumlah Akomodasi (hotel, wisma, dll) dan Okupansinya	Sebagai salah satu daerah tujuan wisata maupun bisnis, pada tahun 2020 terdapat 77 usaha akomodasi di Kota Ternate dengan 1.636 kamar. Mulai dari kinerja awal tahun 2015, sudah menunjukan tren pertumbuhan kunjungan yang tetap stabil, walaupun ada penurunan kunjungan namun tidak terlalu signifikan. Hal ini sejalan dengan strategi pemulihan pariwisata di pasca pandemi Covid-19 ini, yaitu lebih mengotimalkan pasar wisatawan lokal. Kedepan pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pariwisata terus melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Capaian: Baik, tetapi perlu ditingkatkan dengan kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha hotel dan pihak-pihak lainnya untuk mendorong event-event yang menarik minat wisatawan.

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pada 2018 dan 2019 kunjungan wisatawan masih menunjukan tren yang baik, yaitu 2.331 kunjungan wisatawan mancanegara dan 278.230 kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 1.501 kunjungan wisatawan mancanegara dan 208.871 kunjungan wisatawan domestik. Dan untuk kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu menjadi 314 kunjungan dan kunjungan wisatawan domestik mencapai 153.289 kunjungan. Hal ini disebabkan terjadinya wabah Covid 19 yang melanda dunia. Capaian: Baik, namun masih perlu ditingkatkan upaya peningkatan kunjungan wisatawan.

3.2.2 Subtema Jasa Pendukung Industri

Aspek-aspek yang masuk dalam Jasa Pendukung Industri seperti saranaprasarana kota, lembaga keuangan, dan layanan pemerintah merupakan aspek-aspek penting yang tidak bisa terlepas dalam Tema Perdagangan dan Jasa.

Tabel 3.8
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek Koperasi dan UMKM

Harapan	Capaian
Peningkatan Kuantitas Koperasi	Jumlah koperasi di Ternate ada 46 unit usaha aktif pada tahun 2020. Pada tahun 2017, Kota Ternate mendapat penghargaan Bakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Capaian: Baik, namun perlu ditingkatkan
Peningkatan Persentase Jumlah UMKM Per Tahun	Ternate sebagai kota yang mengusung moto sebagai kota jasa, memfokuskan pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. Sektor UKM yang berkembang di Kota Ternate adalah sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, perikanan, pertanian dan peternakan. UKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate selama 2020 sebanyak 13.765 unit, dengan 21.723 orang tenaga kerja. UKM sektor Perdagangan merupakan UKM yang paling banyak di Ternate, yakni sebanyak 9.058 unit, dengan serapan tenaga kerja sebesar 12.683 orang. Capaian: Baik, namun perlu dilakukan peningkatan.

Jika dilihat dari aspek koperasi dan UMKM, Kota Ternate memiliki kondisi yang cukup baik dalam hal pengembangan inovasi. Namun, di bidang UMKM Kota Ternate dapat mencontoh beberapa kota lainnya, yang mengembangkan prinsip inovasi sehingga UMKM sangat berkembang sebagai industri kreatif.

Tabel 3.9
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek Tenaga Kerja

Harapan	Capaian
Penurunan Angka Pengangguran	 Capaian: Sangat Baik, namun perlu ditingkatkan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pasar Kerja Yang Mudah Diakses Masyarakat	Terdapat penyelenggaraan bursa kerja untuk umum yang diadakan setiap tahunnya dan penyediaan aplikasi Bursa Kerja Online oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, yang memudahkan masyarakat pencari kerja. Capaian: Baik dan perlu ditingkatkan
Harapan	**Capaian**
Pengadaan Pelatihan Kewirausahaan	Terdapat Balai Latihan Kerja Ternate yang dibina Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, Asosiasi Pengusaha, dan Beberapa Perguruan Tinggi yang mengadakan pelatihan kewirausahaan. Capaian: Baik dan perlu peningkatan

Ketenagakerjaan yang ada di Kota Ternate memiliki kualitas yang cukup baik. Dengan tingkat pengangguran yang kecil yaitu 5,80% pada tahun 2020, Kota Ternate memiliki SDM yang tergolong aktif bekerja. Dalam hal penyediaan informasi, Pemerintah Kota Ternate juga telah menyediakan pelatihan dan akses lowongan pekerjaan yang memadai. Tantangannya adalah lebih kepada kemanfaatannya yang harus ditingkatkan. Adanya peran asosiasi pengusaha sekaligus tidak menutup kemungkinan peran swasta lainnya dan juga perguruan tinggi dalam hal pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat menjadi sebuah nilai sinergisitas yang positif. Hal ini tentu sangat sesuai dengan kerangka kebijakan inovasi dari SIDa yang diharapkan.

Tabel 3.10
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek Iklim Investasi

Harapan	Capaian
Peningkatan Persentase Investasi	Membaiknya kondisi ekonomi Kota Ternate itu juga dibuktikan dengan tren investasi selama 2021. Sebagai mana data yang dirilis Badan Koordinasi Penaman Modal (NKPM) nilai realisasi investasi Kota Ternate pada 2021 mencapai 274,119 miliar dengan jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.168 orang. Investasi tersebut dominan adalah PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri). Data NSWI yang dicatat DPMPTSP Kota Ternate, pada Triwulan I 2021, ada 30 perusahaan yang berinvestasi di Kota Ternate, 1 di antaranya PMA (Penanaman Modal Asing) dengan total investasi Rp 234.077.600. Pada Triwulan II, sebanyak 27 perusahaan yang berinvestasi, 3 di antaranya PMA dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.134.200.000. Sementara Triwulan III tercatat 27 perusahaan, 4 di antaranya PMA dengan total nilai investasi sebesar Rp 35.907.160.150. Capaian: Sangat Baik, namun perlu ditingkatkan
Adanya Kepastian Hukum Dalam Pelayanan Investasi	a. Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal. b. Telah Diterbitkannya Peraturan Walikota Ternate tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate. Capaian: Sangat baik, karena kepastian hukum dapat memberikan kenyamanan investor di Kota Ternate.
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Investasi	Sudah dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Ternate Capaian: Sangat baik
Tersedianya Data dan Informasi yang Dibutuhkan Investor Berupa Peta Investasi	Kota Ternate sudah memiliki rincian investasi dalam situs DPMTPSP Kota Ternate. Peta Investasi sudah tersedia namun belum ada ditayangkan di situs dan beberapa link masih perlu penyempurnaan. Capaian: perlu peningkatan informasi agar investor semakin mudah dalam merencanakan investasi di Kota Ternate.

Pada tahun 2021 Kota Ternate mengalami kenaikan nilai rupiah investasi. Namun, dalam sistem penyediaan informasi, Kota Ternate masih harus meningkatkan akses pelayanannya. Dalam mendukung inovasi layanan pemerintahan, Pemerintah Kota Ternate malalui DPMPTSP dapat mengembangkan sistem informasi yang lebih mendetail pada website perizinan dengan tampilan pemetaan wilayah spot-spot lokasi yang potensial untuk dijadikan area investasi.

Tabel 3.11
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek Sarana Prasarana

Harapan	Capaian
	Program Penanggulangan Bencana dilakukan melalui kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Sementara kegiatan Penanganan Pascabencana dilakukan melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud Penahan Tanah di Kelurahan Tadenas Moti, Kelurahan Kastela, Kelurahan Rua, Kelurahan Salahuddin, Kelurahan Sangaji Utara, Kelurahan Tanah Tinggi, dan Kelurahan Kalumata.
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Dalam Pengelolaan Bencana	Di samping itu, BPBD Kota Ternate juga melaksanakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.Membaiknya kondisi ekonomi Kota Ternate itu juga dibuktikan dengan tren investasi selama 2021. Sebagai mana data yang dirilis Badan Koordinasi Penaman Modal (NKPM) nilai realisasi investasi Kota Ternate pada 2021 mencapai 274,119 miliar dengan jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.168 orang. Investasi tersebut dominan adalah PMDN (Penanaman Modal dalam Negeri). Capaian: Sangat Baik, namun perlu ditingkatkan
Akses Transportasi Memadai Mulai Dari Lokal, Regional Hingga Nasional	Seiring dengan bertambahnya panjang jalan berkondisi baik yang mencapai 74,34 persen di tahun 2020, maka semakin banyak pula angkutan darat maupun kendaraan pribadi di Kota Ternate. Berdasarkan laporan SAMSAT Kota Ternate pada tahun 2019 jenis kendaraan terbanyak di Kota Ternate yaitu jenis sepeda motor sebanyak 33.4331 unit, mobil sebanyak 5.654 unit dan truck sebanyak 2.060 unit. Sedangkan banyaknya penumpang yang bepergian ke wilayah di luar Maluku Utara melalui pelabuhan Ahmad Yani sebanyak 40.446 orang, dan penumpang yang datang sebanyak 44.699 orang. Di sisi lain, arus bongkar muat Trafik Peti Kemas barang angkutan dalam negeri yang terjadi di pelabuhan Ahmad Yani pada tahun 2020 sebanyak 518.750 ton (bongkar) sedangkan barang yang dimuat sebanyak 520.174 ton. Untuk kegiatan arus bongkar Trafik Non Peti Kemas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada tahun 2020 sebanyak 575.460 ton, sedangkan kegiatan muat sebesar 78.195 ton. Untuk transportasi udara akan ditinjau dari perbandingan atau rasio antara penumpang dengan jumlah penerbangan. Jumlah penumpang yang berangkat untuk penerbangan selama Tahun 2020 adalah sebanyak 174.661 orang, sedangkan penumpang yang datang sebanyak 181.770 orang dan transit sebanyak 19.846 orang. Adapun jumlah pesawat yang berangkat selama periode tahun 2020 adalah sebanyak 2.520 kali, sedangkan pesawat yang datang adalah sebanyak 2.520 kali. Capaian: baik secara ketersediaan aksesibilitas.

Kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung perdagangan dan jasa dapat dikatakan sudah tersedia cukup baik di Kota Ternate. Pemkot Ternate telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, wisatawan, maupun investor untuk beraktivitas di Kota Ternate. Adanya akses laut menjadikan salah satu kekuatan utama bagi Kota Ternate sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara. Peluang wisata kapal pesiar dan

investasi industri skala besar yang membutuhkan angkutan peti kemas tentu dapat terwadahi dengan baik di Kota Ternate. Hal tersebut harus ditanggapi Pemerintah Kota Ternate untuk menyediakan kesinambungan antara transportasi udara, darat, dan laut yang memadai seperti akses transportasi umum yang terintegrasi dan penyediaan sarana jalan yang kondisinya bagus.

Selain dalam hal transportasi, adanya penanganan banjir di Kota Ternate merupakan langkah yang baik karena menambah kenyamanan masyarakat, wisatawan, maupun investor untuk berkunjung ke Ternate. Kondisi tersebut juga dapat dijadikan sebuah implementasi sistem inovasi yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan akademisi.

Tabel 3.12
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek Lembaga Keuangan

Harapan	Capaian
Peningkatan Jumlah Lembaga Keuangan	PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate, sepanjang Januari-Desember 2021 telah mencatat jumlah aset yang dimiliki saat ini mencapai Rp, 116 miliar, ditambah modal yang saat ini dimiliki senilai Rp 18 miliar. Capaian: Sangat Baik, namun perlu ditingkatkan
Terdapat Skema Bantuan Keuangan dari Lembaga Keuangan	Pendanaan sudah ada baik dari pemerintah daerah maupun lembaga keuangan. Dasar pelaksanaan: Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil. Capaian: Baik

Lembaga keuangan di Kota Ternate dapat terbilang cukup baik dan berkembang. Akses permodalan juga tidak mengalami kendala mengingat Kota Ternate merupakan pusat perekonomian di provinsi Maluku Utara yang menjadi pusat pelayanan provinsi. Ke depannya, penyediaan bantuan permodalan dari lembaga keuangan baik bank, BPR, maupun lembaga keuangan lainnya dapat lebih menyentuh UMKM dengan maksud dapat meningkatkan industri kreatif di Kota Ternate.

Tabel 3.13
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek Pelayanan Pemerintah

Harapan	Capaian
Peningkatan Persentase Indeks Kepercayaan Masyarakat	Berdasarkan LAKIP Kota Ternate, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kota Ternate meningkat menjadi BB di tahun 2020. Capaian: Baik, dan perlu ditingkatkan
Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus berkembang hingga saat ini. Berbagai SKPD sudah meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi dimulai dari menampilkan informasi, pendaftaran, pengaduan, penilaian kepuasan, dan lain-lain. Capaian: Baik

Pelayanan Pemerintah Kota Ternate sudah cukup baik. Akan tetapi, pelayanan Kota Ternate masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal kemudahan akses perizinan dan pengaduan masyarakat. Adanya sistem online harus dijadikan sebuah inovasi pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan masyarakat.

3.2.3 Subtema Perdagangan Besar dan Eceran

Perdagangan di Kota Ternate merupakan komoditas utama karena di kota ini banyak bergerak di bidang jasa komersial. Bahkan jika ditinjau dari nilai PDRB, subsektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran selalu menyumbangkan nilai tertinggi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.14
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam
Aspek Pasar Tradisional dan Modern

Harapan	Capaian
Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional	Revitalisasi dan penataan pasar di Kota Ternate dilakukan secara kontinu, dengan memperhatikan beberapa titik pasar yang belum dipergunakan dengan baik. Capaian: Baik, dan perlu ditingkatkan
Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Pasar Tradisional Dan modern	Adanya revitalisasi pasar perlu memperhatikan sarana prasarana pendukung seperti tempat parkir, toilet, dan sirkulasi udara yang lebih baik. Capaian: Baik
Adanya Regulasi Keberadaan Pasar tradisional dengan pasar Modern	Telah ada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan Zona Perdagangan, yang menjamin iklim usaha yang kondusif, memberikan rasa keadilan, berkepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup yang nyaman, aman dan tertib Capaian: Baik, namun implementasi Peraturan Daerah masih perlu dimaksimalkan
Peningkatan Promosi	Telah diterbitkannya Peraturan Walikota Ternate Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penggunaan Produk Lokal Khas Daerah, dan Gerakan belanja produk lokal oleh Ketua TP PKK Kota Ternate, Ny. Marliza M. Tauhid. Capaian: Baik, namun perlu ditingkatkan

Dalam hal revitaliasi pasar tradisional, Kota perlu diapreasiasi dan ke depannya harus lebih diprioritaskan. Hal ini perlu dilakukan agar pasar tradisional dapat mendukung pengembangan inovasi di Kota Ternate dalam hal perdagangan dan jasa, seperti dijadikan objek wisata baik domestik maupun mancanegara.

Tabel 3.15
Harapan dan Capaian Kota Ternate dalam Aspek PKL

Harapan	Capaian
Penataan PKL Sebagai Revitalisasi Ruang Publik	Penataan PKL telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, , contohnya pada areal Pasar Higienis, Jl. Sultan M. Djabir, Jl. Pahlawan Revolusi dan Jl. Reklamasi Mangga Dua – Toboko. Namun, penataan masih terfokus pada pusat aktivitas strategis saja. Masih terdapat beberapat titik yang kawasan PKLnya belum tertata rapi. Capaian: Baik, namun perlu peningkatan dan perluasan area penataan

Penataan PKL di Kota Ternate diharapkan dapat dikoordinasikan dengan baik serta dilakukan dengan pendekatan humanis dan penataan PKL tidak selalu dianggap sebagai langkah yang anarkis. Keberadaan PKL diharapkan mampu menjadi sektor perekonomian kerakyatan yang menjadi salah satu daya tarik khususnya kuliner Kota Ternate.

Secara keseluruhan, capaian 10 aspek perdagangan dan jasa di Kota Ternate memiliki kondisi yang cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu dan harus ditingkatkan. Pengembangan inovasi dalam hal pelayanan masyarakat seperti keberadaan sarana prasana perkotaan yang mendukung perdagangan dan jasa, akses permodalan, kemudahan perizinan, dan lain-lainnya harus terus dilakukan.

Adanya SIDa diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi kemajuan inovasi sektor perdagangan dan jasa dan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan itu. Salah satu kuncinya adalah perwujudan kerja sama antara seluruh *stakeholder*.

3.3 TARGET CAPAIAN SIDA KOTA TERNATE BERTEMA PERDAGANGAN DAN JASA

Kajian terhadap jarak yang tercipta antara kondisi capaian SIDa saat ini dengan harapan yang akan dicapai dari pengembangan SIDa merupakan langkah lanjutan untuk mengukur sejauh mana capaian SIDa. Perbandingan antara indikator target/sasaran SIDa dengan kondisi indikator yang bersangkutan pada saat akan mencerminkan kebutuhan penguatannya. Berikut ini merupakan gap yang ditemukan berdasarkan kajian yang dilakukan Bappelitbangda Kota Ternate (2021) tentang Kajian Roadmap Pengembangan SIDa Kota Ternate.

Tabel 3.14
Target Capaian SIDa Kota Ternate Sektor Perdagangan dan Jasa

No	Aspek	Kerangka Umum Inovasi dan Bisnis	Kolaborasi Inovasi dan Difusi Teknologi	Daya Dukung Litbang Dan Absorpsi UMKM	Budaya Inovasi	Keterpaduan Sistem Inovasi dan Perkembangan Klaster	Keselarasan dengan Perkembangan Global
MICE dan Pariwisata							
1	Pariwisata dan MICE	Meningkatnya persentase jumlah wisatawan sebesar 20% dan jumlah destinasi wisata dengan promosi online dan inovasi wisata (Kampung Wisata)				Adanya klaster wisata di lokasi-lokasi potensi wisata strategis	
2	City Branding				Terdapat informasi produk dan kegiatan pariwisata hingga tingkat internasional. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Meningkatnya event-event budaya dan aset kekayaan budaya yang terorganisir	Terdapat sentra-sentra ekonomi potensial ber-karakteristik khusus	Citra Kota Ternate diperkua dengan pengakuan dan penghargaan dari dunia internasional
Jasa Pendukung Industri							
3	Tenaga Kerja		Penyeleng-garaan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat.	Peningkat an jumlah pakar di Kota Ternate. Tercipta tenaga kerja yang terdidik dan inovatif	Terdapat serangkaian pelatihan kewirausahaan sehingga menurunkan tingkat pengangguran		Tenaga kerja yang tersertifikasi dan ter-standarisasi internasional

No	Aspek	Kerangka Umum Inovasi dan Bisnis	Kolaborasi Inovasi dan Difusi Teknologi	Daya Dukung Litbang Dan Absorpsi UMKM	Budaya Inovasi	Keterpaduan Sistem Inovasi dan Perkembangan Klaster	Keselarasan dengan Perkembangan Global
4	Iklim Investasi	Adanya kepastian hukum dalam pelayanan investasi	Meningkat-nya persentase iklim investasi yang kondusif di Kota Ternate mencapai 80%. Tersedia-nya data dan informasi yang dibutuhkan investor berupa peta investasi				Peningkatan potensi investasi dengan penyesuaian standar internasional
5	Sarana Prasarana Kota Penunjang Perdagangan	Adanya kebijakan peningkatan sistem transportasi massal yang lebih nyaman	Terbangun nya sarana prasarana dalam mendukung akses online, pembangun an infrastruktur	Semakin meningkat nya kapasitas dan kapabilitas dalam penanga-nan dan pengendali an banjir dan penghamb at lainnya	Tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam menggunakan layanan transportasi umum		Penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan standar internasional
6	Lembaga Keuangan	Meningkatnya pemberian dana untuk bantuan riset dan pengem-bangan produk inovasi lokal					
7	Pelayanan Pemerintah	Data-data terkait inovasi dan bisnis terinventarisas idengan baik, Tersusun regulasi yang mendukung inovasi	Pelayanan pemerintah di tiap SKPD berbasis e-gov termasuk dalam pelayanan investasi			Sinergitas pelayanan dan informasi antara Pemkot dengan Pemprov	Peningkatan pelayanan HAKI atau paten
8	Koperasi dan UMKM	Meningkatnya akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM seperti bantuan pinjaman dana APBD	Meningkat-nya penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor koperasi dan UMKM sebesar 2%/tahun	Meningkat nya daya serap teknologi oleh koperasi dan UMKM	Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk-produk UMKM	Terdapat jaringan usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi produknya	Produk UMKM mampu memenuhi standar internasional dan bersaing secara internasional

No	Aspek	Kerangka Umum Inovasi dan Bisnis	Kolaborasi Inovasi dan Difusi Teknologi	Daya Dukung Litbang Dan Absorpsi UMKM	Budaya Inovasi	Keterpaduan Sistem Inovasi dan Perkembangan Klaster	Keselarasan dengan Perkembangan Global
Perdagangan Besar dan Eceran							
9	Pasar Tradisional dan Modern	Terdapat kerjasama diantara pedagang tradisional dengan pedagang eceran maupun besar	Meningkat-nya persentase revitalisasi pasar tradisional sebesar 12%		Terdapat promosi bagi pasar tradisional		
10	(Pedagang) g)g)g	Terdapat Perda tentang penataan PKL					

Keterangan:

Tidak ada keterkaitan

Dapat disimpulkan pula bahwa perkembangan perdagangan dan jasa di Kota Ternate jika dilihat dari pengembangan SIDa masih terbatas pada pengembangan infrastruktur. Masih minimnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa pada sisi *budaya inovasi*, *kapasitas lembaga iptek*, serta *perkembangan klaster* baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberlanjutan Kota Ternate sebagai kota erdagangan dan jasa.

Hampir setiap aspek perdagangan membutuhkan penyediaan infrastruktur serta inovasi di dalamnya. Hal ini disebabkan bahwa infrastruktur adalah kebutuhan dasar untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa. Ketika infrastruktur sudah memadai, maka variabel-variabel SIDa lain seharusnya dapat dipenuhi untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa di Kota Ternate. Melihat dari sisi yang lain, variabel yang paling sulit untuk diterapkan adalah perkembangan klaster serta kapasitas lembaga iptek. Kurangnya pemahaman pemerintah daerah serta berbagai *stakeholder* terkait dengan SIDa membuat proses perkembangannya berjalan lambat. Masih sangat sedikit inovasi dan risetriset yang dilakukan untuk membawa angin perubahan dalam menunjang Ternate sebagai Kota Perdagangan dan Jasa.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN

Kota Ternate menetapkan tema prioritas dalam Penguatan SIDa yaitu Perdagangan dan Jasa. Dari beberapa indikator kinerja yang telah ditentukan, diketahui bahwa sektor perdagangan dan jasa memiliki performa yang baik pada kurun waktu 5 tahun ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dapat diandalkan sebagai sektor prioritas yang akan dikembangkan melalui SIDa. Perdagangan dan jasa di Kota Ternate memiliki karakteristik khusus yang dapat dibagi ke dalam beberapa sub tema, yaitu:

- MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*)
- Pariwisata
- Jasa Pendukung Perkembangan Industri (di luar sektor industrinya sendiri)
- Perdagangan besar dan eceran

Keempat subtema ini merupakan empat pilar pengembangan SIDa Kota Ternate yang terangkum sebagai "SIDa RAHA". Konsep dari SIDa RAHA ini adalah pengembangan dari 4 subtema yang harus dikembangkan sebagai sistem aktivitas yang saling bersinergi antar unsur dalam mewujudkan Kota Ternate sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang berbasis Inovasi.

Gambar 4.1
SIDa RAHA sebagai Konsep Tujuan Penguatan SIDa Kota Ternate

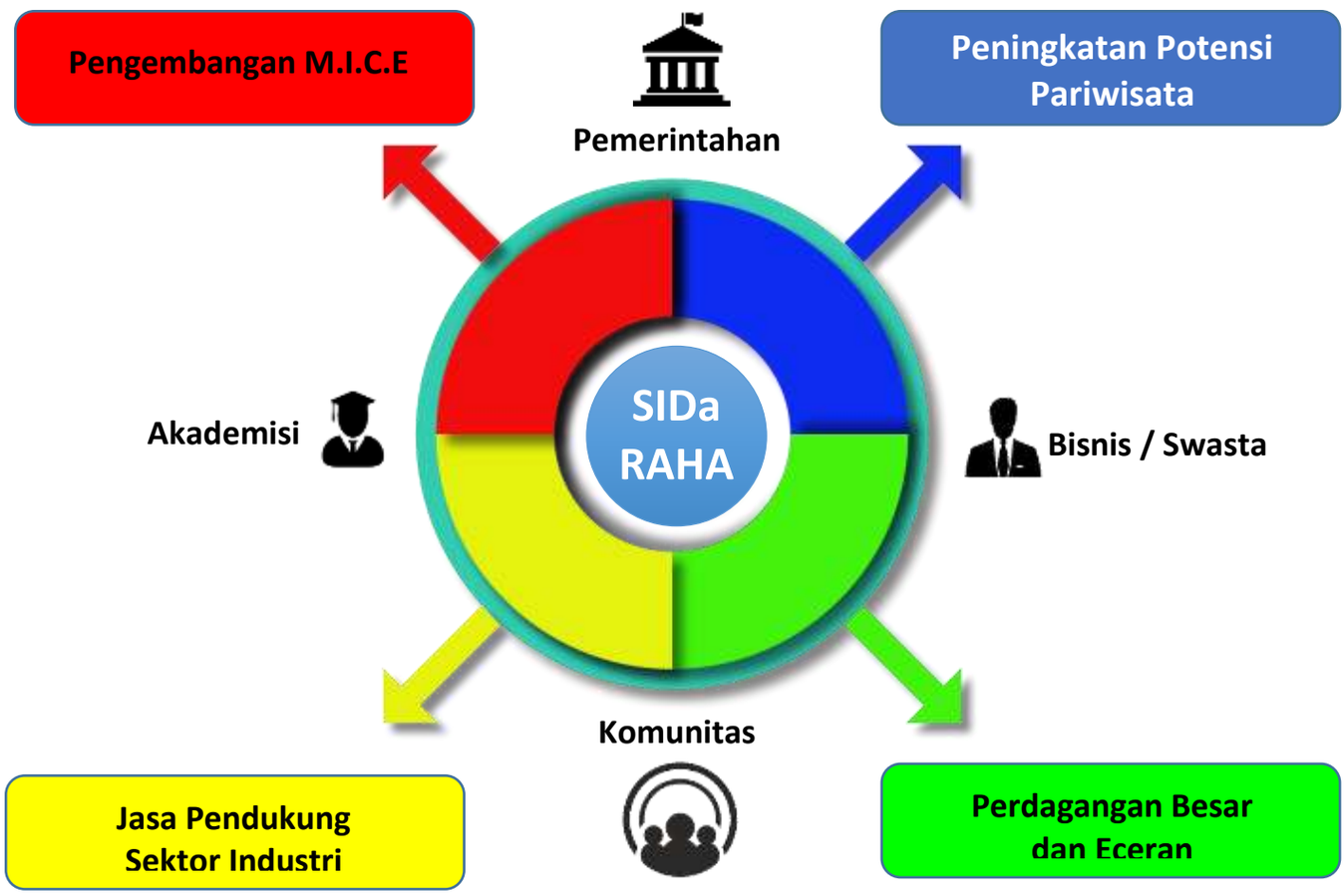

Implementasi sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta/bisnis, dan akademisi/pakar dalam pembangunan Kota Ternate, khususnya dalam pembangunan ekonomi pada sektor-sektor yang mendukung kegiatan usaha perdagangan dan jasa menjadi hal yang ditekankan dalam Road Map SIDa Kota Ternate, maka tujuan RoadMap SIDa Kota Ternate adalah: Terwujudnya SIDa Kota Ternate berbasis Perdagangan dan Jasa yang didukung kerja sama sinergis Pemerintah, Bisnis, Akademisi dan Masyarakat.

4.2 SASARAN

Untuk mencapai tujuan dalam SIDa Kota Ternate, terdapat 6 (enam) sasaran yang harus dilakukan. Sasaran tersebut telah disesuaiakan dengan kerangka kebijakan inovasi SIDa. Keenam sasaran tersebut adalah:

1. Tersusunnya Kerangka Umum Inovasi dan Bisnis melalui inventarisasi, regulasi, dan insentif yang mendukung Perdagangan dan Jasa.
2. Menguatnya kerjasama dan sinergisitas antara lembaga litbang pemerintah, swasta, lembaga akademik, dan masyarakat dengan UMKM/pelaku usaha.
3. Meningkatnya difusi inovasi antarpemangku kepentingan dengan penggunaan teknologi informasi.
4. Menguatnya budaya inovasi melalui pengembangan kewirausahaan.
5. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan yang mendorong kemandirian dan pengembangan inovasi klaster usaha.
6. Berkembangnya inovasi layanan pariwisata dan jasa pendukung industri yang berdaya saing dan berkualitas internasional.

4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3.1 Strategi Road Map SIDa

Strategi Road Map SIDa merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi Road Map SIDa Kota Ternate disusun dengan mempertimbangkan Kerangka Kebijakan Inovasi SIDa yang telah terangkum dalam sasaran pencapaian Road Map SIDa dan kondisi Kota Ternate dalam lingkup tema perdagangan dan jasa.

10 (sepuluh) strategi yang dikembangkan dalam upaya mewujudkan penguatan SIDa di Kota Ternate, yaitu:

1. Membangun basis data inovasi daerah.
2. Menyusun regulasi yang mendukung inovasi.
3. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai upaya untuk mendorong kegiatan yang inovatif.
4. Melaksanakan kegiatan bersama yang dapat menguatkan jejaring antarpemangku kepentingan.
5. Membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antarpemangku kepentingan.
6. Menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal hingga tingkat akar rumput.
7. Membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif.

8. Membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
9. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional.
10. Meningkatkan pemahamanan dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.

Secara umum konsep strategi dan arah kebijakan Road Map SIDa Kota Ternate tergambarkan pada diagram Gambar 4.2. Keseluruhan program memiliki kesinambungan satu sama lain. Dalam jangka panjang, capaian SIDa yang diharapkan adalah tumbuh dan berkembangnya budaya inovasi di masyarakat. Dalam diagram di bawah ini, keseluruhan program dapat berjalan apabila berada dalam lingkup infrastruktur yang memadai.

Gambar 4.2
Konsep Strategi dan Arah Kebijakan Road Map SIDa Kota Ternate

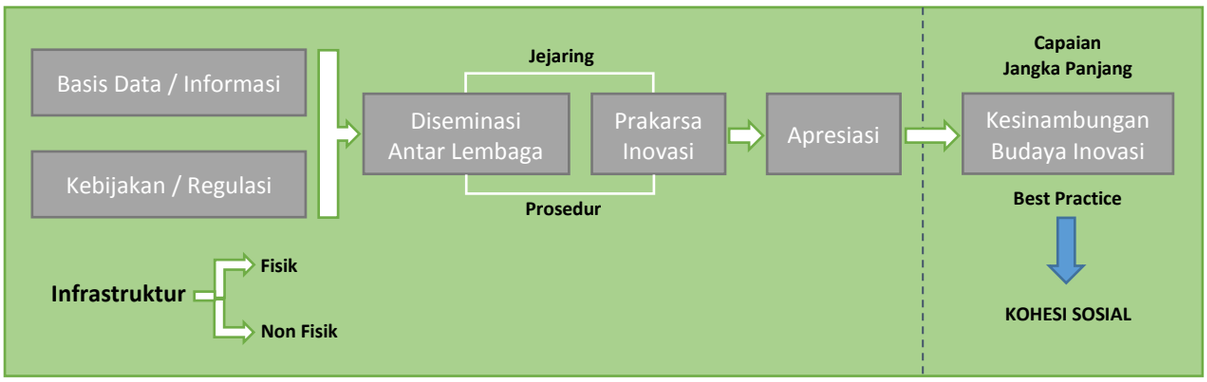

4.3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Road Map SIDa. Penyusunan arah kebijakan menyesuaikan dengan sasaran Road Map SIDa yang memuat kerangka kebijakan inovasi dan strategi yang terkait.

Tabel 4.1
Arah Kebijakan Road Map SIDa Kota Ternate

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersusunnya Kerangka Umum Inovasi dan Bisnis Melalui Inventarisasi, Regulasi, Dan Insentif Yang Mendukung Perdagangan Dan Jasa	**Strategi 1** Membangun basis data inovasi daerah	1. **Menjamin Kemudahan Akses Data/Informasi Antarlembaga** Kebijakan ini dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi antar lembaga sehingga mudah untuk di akses oleh berbagai pihak khususnya dalam menggambarkan posisi daya saing Kota Ternate. 2. **Membangun Sistem Dokumentasi Dan Distribusi Data** Kebijakan ini dimaksudkan agar sistem dokumentasi dan distribusi data dapat lebih teratur atau terorganisir baik dalam hal inventarisasi data maupun penanggung jawab pengarsipan.
	Strategi 2 Menyusun regulasi yang mendukung inovasi	**Menjamin Kemudahan Birokrasi Dalam Melayani Kegiatan Usaha** Memastikan bahwa lembaga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien baik biaya dan waktu kepada masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Strategi 3 Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai upaya untuk mendorong kegiatan yang inovatif	**Memberikan Insentif Bagi Kegiatan Usaha Yang Inovatif** Insentif bertujuan agar kegiatan inovasi dapat terdorong sehingga masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya terbiasa dengan budaya inovasi
2. Menguatnya Kerjasama Dan Sinergisitas Antara Lembaga Litbang Pemerintah, Swasta, Lembaga Akademik, Dan Masyarakat Dengan UMKM/Pelaku Usaha	**Strategi 4** Melaksanakan kegiatan bersama yang dapat menguatkan jejaring antarpemangku kepentingan	**Memperluas Akses Jejaring Litbang Antarpemangku Kepentingan** Kebijakan ini dimaksudkan agar seluruh lembaga litbang dapat saling bersinergi memajukan iklim inovasi di Kota Ternate
3. Meningkatknya Difusi Inovasi Antarpemangku Kepentingan Dengan Penggunaan Teknologi Informasi	**Strategi 5** Membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antarpemangku kepentingan	**Menjamin Intensitas Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Yang Berdayaguna Dan Berhasil Guna** Pelayanan berbasis teknologi diharapkan mampu menyebar dan mengakar ke seluruh pemangku kepentingan di Kota Ternate
4. Menguatnya Budaya Inovasi Melalui Pengembangan Kewirausahaan	**Strategi 6** Menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal hingga tingkat bawah	**Menjamin Prakarsa Yang Lebih Luas Dari Dan Untuk Seluruh Pemangku Kepentingan** Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengembangkan iklim kewirausahaan sebagai syarat Road Map SIDa di Kota Ternate
	Strategi 7 Membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif	**Menindaklanjuti Prakarsa Yang inovatif Untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Para Pemangku Kepentingan** Adanya apreasiasi bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja seluruh pemangku kepentingan yang selalu mengedepankan inovasi
5. Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Yang Mendorong Kemandirian Dan Pengembangan Inovasi Klaster Usaha	**Strategi 8** Membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga	1. **Membangun Prosedur Yang Mampu Mewadahi Penguatan Komunikasi Dan Koordinasi Antarlembaga** Kebijakan ini bermaksud untuk memperjelas dan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antarpemerintah daerah 2. **Menjamin transparansi penerapan prosedur komunikasi dan koordinasi** Transparansi diharapkan menjadi suatu wadah agar setiap pihak dapat mengawasi dan memberikan masukan untuk perbaikan prosedur komunikasi dan koordinasi
6. Berkembangnya Inovasi Layanan Pariwisata Dan Jasa Pendukung Industri Yang Berdaya Saing Dan Berkualitas Internasional	**Strategi 9** Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional	**Menyempurnakan Layanan Dan Membangun Kelengkapan Infrastruktur Berstandar Internasional** Keberadaan infrastruktur yang memadai merupakan kuncian suatu aktivitas dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penyempuranaan layanan dan kelengkapan infrastruktur diharapkan dapat dilakukan di Kota Ternate
	Strategi 10 Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa	**Menumbuhkembangkan Kapasitas Masyarakat Yang Menjamin Kesinambungan Inovasi** Masyarakat harus didorong untuk dapat mengembangkan keramahtamahan dan perilaku yang mendukung aktivitas perdagangan dan jasa di Kota Ternate agar mampu bersaing secara global

BAB V
FOKUS, PRIORITAS DAN PROGRAM

5.1 FOKUS DAN PRIORITAS ROAD MAP SIDa

Fokus Road Map Sistem Inovasi Daerah adalah kebijakan umum yang merupakan sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai kegiatan yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Prioritas dirumuskan dengan memperhitungkan bahwa program merupakan salah satu elemen dalam pencapaian Road Map SIDa. Selain itu, program bermanfaat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari berbagai pemangku kepentingan terkait untuk bersama-bersama mencapai tujuan atau juga melakukan mekanisme monitoring terhadap kinerja program. Fokus dan prioritas dihasilkan dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahapan selanjutnya, fokus dan prioritas dalam rangka Road Map SIDa akan diimplementasikan dan dioperasionalkan dalam bentuk program/kegiatan pembangunan daerah.

Dalam RPJMD, perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah menetapkan beberapa program unggulanyang menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penetapan program pembangunan disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan program yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam rangka Road Map SIDa agar implementatif dan operasional harus selaras dan sinkron dengan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Sehubungan dengan hal ini, maka penyusunan program yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam rangka Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 harus selaras dan sinkron dengan program-program pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1.
Fokus, Prioritas dan Program dalam Road Map SIDa Kota Ternate

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Prioritas	Program (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
1. Tersusunnya Kerangka Umum dan Bisnis melalui inventarisasi, regulasi dan insentif yang mendukung Perdagangan dan Jasa	Strategi 1 Membangun basis data inovasi daerah	1. Menjamin kemudahan akses 2. Membangun sistem dokumentasi dan distribusi data	Kemudahan akses data inovasi	Peningkatan sarana prasarana layanan informasi dan arsip inovasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua PD tekait
					Program Pengelolaan Arsip	PD Urusan Kearsipan
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
					Program Promosi Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
					Program Pelayanan Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
			Inventarisasi data	Pembangunan sistem/data base inovasi daerah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	PD Komunikasi dan Informatika
					Program Aplikasi Informatika	PD Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	PD Komunikasi dan Informatika
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	PD Urusan Kearsipan
					Program Perijinan Penggunaan Arsip	PD Urusan Kearsipan
					Program Pemasaran Pariwisata	PD Pariwisata
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PD Pariwisata
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PD Perindustrian
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
					Program Aplikasi Informatika	PD Komunikasi dan Informatika
					Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD Tenaga kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja	PD Tenaga kerja
				Pembangunan data base kependudukan yang	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	PD Administrasi Kependudukan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Prioritas	Program (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
				komperehensif		dan Capil serta PD yang Terkait
	Strategi 2 Menyusun regulasi yang mendukung inovasi	1. Menjamin kemudahan birokrasi dalam melayani kegiatan usaha	Perizinan yang efektif dan efisien	Pengembangan pranata sistem Informasi Pelayanan Bisnis	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
				Pengembangan sistem dan standar pelaksanaan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Litbang atau Perencanaan
				Penguatan inovasi daerah	Program Pengembangan UMKM	PD Koperasi dan UKM
	Strategi 3 Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif sebagai upaya untuk mendorong kegiatan yang inovatif	1. Memberikan insentif bagi kegiatan usaha yang inovatif	Dukungan hardware dan software untuk inovasi	Peningkatan akses modal ventura dan inkubator teknologi dan bisnis	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	PD Perindustrian
				Pembinaan dan peningkatan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	PD Perindustrian
				Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif industri kecil dan menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PD Perindustrian
				Pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui CSR	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Koperasi dan UKM
2. Menguatnya Kerjasama Dan Sinergisitas Antara Lembaga Litbang Pemerintah, Swasta, Lembaga Akademik, Dan Masyarakat Dengan UMKM/ Pelaku Usaha	Strategi 4 Melaksanakan kegiatan litbang bersama yang dapat menguatkan jejaring antarpemangku kepentingan	1. Memperluas akses jejaring litbang antarpemangku kepentingan	Perluasan akses jejaring akademisi, bisnis, pemerintah, masyarakat dalam implementasi hasil litbang	Pengembangan dan penguatan penelitian, pengembangan (litbang)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Litbang atau Perencanaan
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PD Pariwisata
				Peningkatan kerjasama Usaha Mikro Kecil Menengah dengan lembaga kelitbangan	Program Pengembangan UMKM	PD Koperasi dan UKM
3. Meningkatnya difusi inovasi antarpemangku kepentingan dengan	Strategi 5 Membangun sistem difusi inovasi	1. Menjamin intensitas diseminasi informasi dan komunikasi yang berdayaguna dan berhasil guna	Difusi Inovasi	Peningkatan publikasi dan promosi hasil penelitian lembaga kelitbangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Litbang atau Perencanaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Prioritas	Program (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
penggunaan teknologi informasi	berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antarpemangku kepentingan			Peningkatan promosi produk inovasi terpadu	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Litbang atau Perencanaan
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	PD Pertanian
				Pembinaan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PD Pariwisata
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	PD Komunikasi dan Informatika
				Peningkatan promosi dan kerjasama bidang HAKI	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Litbang atau Perencanaan
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PD Pariwisata
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Pariwisata
					Program Pengembangan UMKM	PD Koperasi dan UKM
4. Menguatnya budaya inovasi melalui pengembangan kewirausahaan	Strategi 6 Menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal hingga tingkat akar rumput	1. Menjamin prakarsa yang lebih luas dari dan untuk seluruh pemangku kepentingan	Prakarsa kreativitas pemangku kepentingan	Pengembangan kewirausahaan dan kreativitas	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Litbang atau Perencanaan
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PD Pemuda dan Olah Raga
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	PD Pariwisata
					Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PD Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja	PD Tenaga Kerja
				Pengembangan inovasi dan aplikasi TTG (Teknologi Tepat Guna) untuk mendukung kewirausahaan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	PD Sekretariat Daerah
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PD Lingkungan Hidup
	Strategi 7 Membangun system apresiasi kreativitas yang inovatif	1. Menindaklanjuti prakarsa yang inovatif untuk meningkatkan capaian kinerja pemangku kepentingan	Apresiasi inovasi	Pengembangan apresiasi inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	PD Litbang atau Perencanaan
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PD Pemuda dan Olah Raga

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Prioritas	Program (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
5. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan yang mendorong kemandirian dan pengembangan inovasi klaster usaha	Strategi 8 Membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga	1. Membangun prosedur yang mampu mewadahi penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga 2. Menjamin transparansi penerapan prosedur komunikasi dan koordinasi	Komunikasi dan koordinasi antarlembaga dan pengklasteran	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster usaha baik di tingkat kota maupun provinsi	Program Pengembangan UMKM	PD Koperasi dan UKM
				Pengembangan forum kerjasama klaster industri, UMKM Kota Ternate	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Koperasi dan UKM
					Program Pengembangan UMKM	PD Koperasi dan UKM
					Program Pemasaran Pariwisata	PD Pariwisata
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PD Pariwisata
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
					Program Promosi Penanaman Modal	PD Penanaman Modal
				Peningkatan kerjasama internasional dalam mengembangkan inovasi (*sister city*)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Kerjasama PD Sekretariat Daerah
			Transparansi prosedur	Koordinasi perumusan kebijakan nasional, provinsi, dan kota	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	PD Sekretariat Daerah
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	PD Sekretariat Daerah
6. Berkembangnya inovasi layanan pariwisata dan jasa pendukung industri yang berdaya saing dan berkualitas internasional	Strategi 9 Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional	1. Menyempurnakan layanan dan membangun kelengkapan infrastruktur berstandar internasional	Infrastruktur berstandar internasional	Pengembangan Infrastruktur terstandarisasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD Perdagangan
					Program Pengembangan Ekspor	PD Perdagangan
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	PD Perdagangan
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PD PUPR
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PD PUPR
					Program Penyelenggaraan Jalan	PD PUPR
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PD Perhubungan
					Program Pengelolaan Pelayaran	PD Perhubungan
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PD PUPR

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Prioritas	Program (Sesuai RPJMD Tahun 2021-2026)	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	PD Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD PUPR
					Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	PD PUPR
					Program Pengelolaan Persampahan	PD Lingkungan Hidup
				Pengembangan ruang publik kreatif	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PD Lingkungan Hidup
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD PUPR
				Peningkatan sarana & prasarana MICE	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PD PUPR
	Strategi 10 Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa	1. Menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat yang menjamin kesinambungan inovasi	Dukungan kapasitas masyarakat	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang perdagangan dan jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PD Perdagangan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	PD Koperasi dan UKM
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	PD Pendidikan
				Pengembangan kemitraan kepariwisataan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PD Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	PD Pariwisata

5.2 PENETAPAN INDIKATOR ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH KOTA TERNATE

5.2.1 Indikator Umum Road Map SIDa (2021-2026)

Penetapan indikator kinerja Road Map Sistem Inovasi Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Road Map SIDa pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program Road Map Sistem Inovasi Daerah setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai.

Indikator kinerja Road Map Sistem Inovasi Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis keluaran (*output*) dari program dan kegiatan terhadap terhadap tingkat capaian indikator kinerja Road Map Sistem Inovasi Daerah yang ditentukan. Indikator Umum dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah di Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Indikator Umum Road Map SIDa Kota Ternate

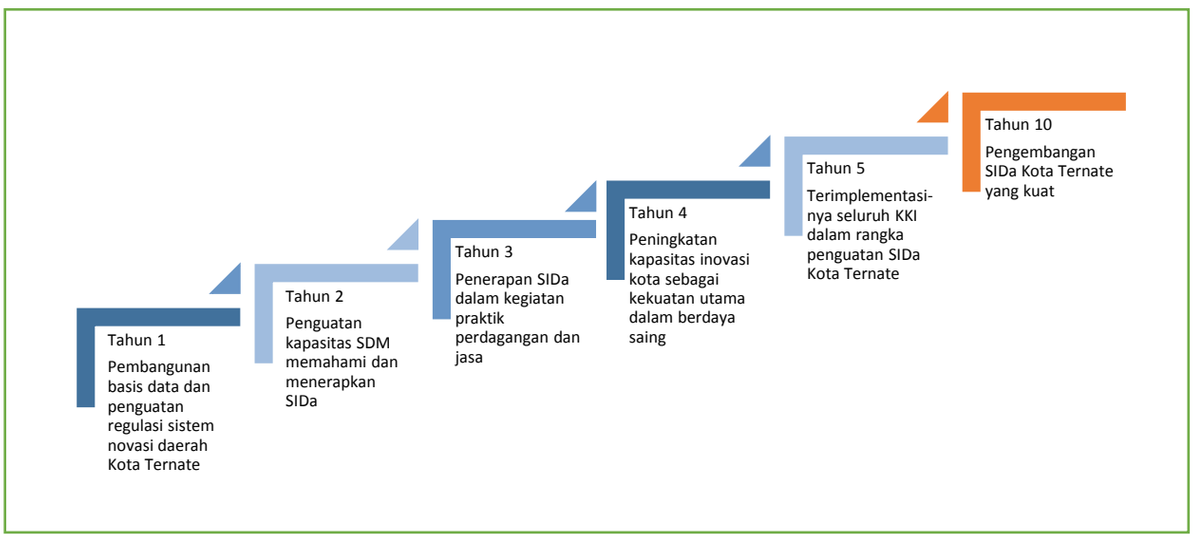

Dalam jangka waktu 5 tahun (2021-2026), ditargetkan Kota Ternate telah mampu mencapai Road Map Sistem Inovasi Daerah dengan pencapaian seluruh indikator yang telah ditentukan. Hingga pada tahun kelima ditargetkan telah terimplementasinya seluruh Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI) dalam rangka Road Map SIDa Kota Ternate. Pada 5 tahun pertama Road Map SIDa Kota Ternate (2021-2026) akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan inovasi di Kota Ternate.

Selain pencapaian dalam jangka waktu menengah 5 tahun, Road Map SIDa Kota Ternate, diharapkan mampu terus berjalan hingga target pencapaian 5 tahun berikutnya atau tahun ke-10. Pada tahun ke-10 tersebut diharapkan SIDa yang ada di Kota Ternate sudah dalam tahap pengembangan inovasi yaitu tahapan lanjutan untuk kota yang telah memiliki landasan sistem inovasi daerah yang kuat. Pada tahun ke-10 tersebut, indikator umum dari pengembangan SIDa di Kota Ternate terwujud antara lain:

a. Terbangun dan berjalannya inovasi sebagai salah wahana komunikasi, koordinasi dan sinergi antara para pemangku kepentingan dalam membangun dan mengembangan ekosistem inovasi di Kota Ternate dengan menghasilkan berbagai bentuk dan jenis inovasi. Hasil inovasi ini

diharapkan akan meningkatkan daya saing daerah, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

b. Peningkatan akses elektronik untuk berbagai pelayanan baik di tingkat pemerintah (dari level kelurahan hingga kota), layanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

c. Pencapaian Kota Ternate sebagai Kota Teknopolitan bertema Perdagangan dan Jasa yang berdaya saing tinggi.

5.2.2 Indikator Kinerja Program Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026

Program yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam rangka Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026, harus selaras dan sinkron dengan program-program pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan hal ini, maka indikator program dan target capaian kinerja program dalam rangka Road Map SIDa Kota Ternate 2021-2026, mengacu kepada indikator program maupun capaian kenerja program tiap tahun dalam dokumen RPJMD Kota Ternate 2021-2026. Indikator Kinerja Program dalam rangka Road Map SIDa Kota Ternate tercantum dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Program Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
						2022	2023	2024	2025	2026	
STRATEGI 1 : MEMBANGUN BASIS DATA INOVASI DAERAH											
1. Tersusunnya Kerangka Umum dan Bisnis melalui inventarisasi, regulasi dan insentif yang mendukung Perdagangan dan Jasa	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Semua PD tekait
	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Kearsipan
	3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	50	55	60	65	70	75	PD Penanaman Modal
	4	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal	%	50	50	55	60	65	75	PD Penanaman Modal
	5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	PD Penanaman Modal
	6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahaan Yang Dihadapi Pelaku Usaha	%	60	50	45	38	35	25	PD Penanaman Modal
	7	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase layanan Publik Dan Layanan Administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	70	75	80	85	90	90	PD Komunikasi dan Informatika
	8	Program Aplikasi Informatika	Presentase Pemanfaatan Aplikasi elektronika dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat	%	60	65	70	75	80	85	PD Komunikasi dan Informatika
	9	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Sektoral	%	70	73	76	79	82	85	PD Komunikasi dan Informatika
	10	Program	Persentase	%	100	100	100	100	100	100	PD Urusan

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Penyelenggaraan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip								Kearsipan
	11	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Penerbitan Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Kearsipan
	12	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	PD Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
	13	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	100	100	100	PD Pariwisata
	14	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Ketersediaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	15	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
	16	Program Aplikasi Informatika	Presentase Pemanfaatan Aplikasi elektronika dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat	%	60	65	70	75	80	85	PD Komunikasi dan Informatika
	17	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga kerja
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	
	18	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Ternate	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga kerja
	19	Program Pengelolaan Informasi	Persentase Ketersediaan Data. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	%	80	90	90	90	90	95	PD Administrasi Kependudukan

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan								dan Capil serta PD yang Terkait
			Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	23	78	85	93	100	100	
STRATEGI 2 : MENYUSUN REGULASI YANG MENDUKUNG INOVASI											
	1	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	PD Penanaman Modal
	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	3	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
STRATEGI 3 : MENGEMBANGKAN MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG KEGIATAN YANG INOVATIF											
	1	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Ketersediaan Penerbitan IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Ketersediaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	4	Program	Rasio Usaha Mikro Yang	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diberikan Fasilitas Pelatihan								dan UKM
STRATEGI 4 : MELAKSANAKAN KEGIATAN LITBANG BERSAMA YANG DAPAT MENGUATKAN JEJARING ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN											
2. Menguatnya Kerjasama Dan Sinergisitas Antara Lembaga Litbang Pemerintah, Swasta, Lembaga Akademik, Dan Masyarakat Dengan UMKM/ Pelaku Usaha	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Orang	300	350	400	450	500	550	PD Pariwisata
	3	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
STRATEGI 5 : MEMBANGUN SISTEM DIFUSI INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN FORUM KOMUNIKASI ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN											
3. Meningkatnya difusi inovasi antarpemangku kepentingan dengan penggunaan teknologi informasi	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	50	55	60	65	70	75	PD Penanaman Modal
	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Diberikan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pertanian
	4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Orang	300	350	400	450	500	550	PD Pariwisata
	5	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase layanan Publik Dan Layanan Administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	70	75	80	85	90	90	PD Komunikasi dan Informatika
	6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Presentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	PD Pariwisata

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual								
	7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari	2	2	3	3	4	4	PD Pariwisata
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2	2	3	3	4	4	
	8	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
STRATEGI 6 : MENUMBUHKAN PRAKARSA KREATIVITAS PENEMUAN BARU MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL HINGGA TINGKAT AKAR RUMPUT											
4. Menguatnya budaya inovasi melalui pengembangan kewirausahaan	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pemuda dan Olah Raga
	3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari	2	2	3	3	4	4	PD Pariwisata
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2	2	3	3	4	4	
	4	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	PD Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
	5	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga Kerja
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	
	6	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Ternate	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga Kerja
	7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	PD Sekretariat Daerah
	8	Program	Persentase Pengendalian	%	5,5	11	16	16	22	22	PD

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup								Lingkungan Hidup
STRATEGI 7 : MEMBANGUN SISTEM APRESIASI KREATIVITAS YANG INOVATIF											
	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pemuda dan Olah Raga
STRATEGI 8 : MEMBANGUN PENGUATAN KELEMBAGAAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL MELALUI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA											
5. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan yang mendorong kemandirian dan pengembangan inovasi klaster usaha	1	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
	2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	PD Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
	4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari	2	2	3	3	4	4	PD Pariwisata
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2	2	3	3	4	4	
	5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	50	55	60	65	70	75	PD Penanaman Modal
	6	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal	%	50	50	55	60	65	75	PD Penanaman Modal

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
	7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	PD Sekretariat Daerah
	8	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	PD Sekretariat Daerah
STRATEGI 9 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR FISIK YANG BERSTANDAR INTERNASIONAL											
6. Berkembangnya inovasi layanan pariwisata dan jasa pendukung industri yang berdaya saing dan berkualitas internasional	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	%	100	100	100	100	100	100	PD Perdagangan
	2	Program Pengembangan Ekspor	Presentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	%	100	100	100	100	100	100	PD Perdagangan
	3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Promosi Pemasaran. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	100	100	100	100	100	100	PD Perdagangan
	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	PD PUPR
	5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	%	55,5	60	65	70	75	80	PD PUPR
	6	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kota Ternate Yang Terbangun	Km	319.789	319.816	319.843	319.870	319.897	319.924	PD PUPR

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
	7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	%	70	75	85	87	90	100	PD Perhubungan
	8	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Standar Keselamatan Pelayaran	%	80	80	80	80	80	80	PD Perhubungan
	9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah domestik	%	89,34	89,5	89,75	90	90,25	90,5	PD PUPR
	10	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penyelenggaraan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbaya dan beracun (LB3)	%	100	100	100	100	100	100	PD Lingkungan Hidup
	11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	%	-	50	100	100	100	100	PD PUPR
	12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	%	5,13	6,41	7,69	8,97	10,26	11,54	PD PUPR
	13	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	9,4	9,51	9,62	9,73	9,84	9,95	PD Lingkungan Hidup
	14	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	12,6	13	14	14,4	15	15	PD Lingkungan Hidup
STRATEGI 10 : MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN JASA											
	1	Program	Persentase	%	100	100	100	100	100	100	PD

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan dan Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya								Perdagangan
	2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
	3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pendidikan
	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	100	100	100	PD Pariwisata
	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Orang	300	350	400	450	500	550	PD Pariwisata

BAB VI
RENCANA AKSI ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Road Map SIDa di Kota Ternate dirumuskan berdasarkan strategi, arah kebijakan, sasaran, fokus, dan program prioritas Road Map SIDa Kota Ternate. Kegiatan dimaksud akan memuat keenam kerangka kebijakan dalam Road Map SIDa. Sesuai dengan indikator yang disusun pada bagian sebelumnya, seluruh kegiatan-kegiatan dalam bagian ini merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026.

Rencana Aksi Road Map SIDa Kota Ternate tahun 2021-2026 merupakan wujud implementasi strategi dalam jangka waktu perencanaan yang mencakup strategi, arah kebijakan, fokus, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan. Dalam penyusunan rencana kegiatan Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 juga diselaraskan dan disinkronkan dengan renstra pada perangkat daerah di lingkungan Kota Ternate. Penyelarasan dan sinkronisasi kegiatan Road Map SIDa terhadap kegiatan pada perangkat daerah merupakan wujud keterpaduan Renstra Road Map SIDa dan Renstra perangkat daerah.

Dalam rencana aksi Road Map SIDa akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tema dan sub tema Road Map SIDa Kota Ternate, yakni tema Perdagangan dan Jasa dengan sub tema Pariwisata, MICE, Jasa Pendukung Industri, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Kegiatan akan diimplementasikan dengan menekankanketerpaduan dan sinergitas antar pemangku kepentingan pembangunan Kota Ternate baik dari akademisi, bisnis (swasta), komunitas (masyarakat) dan pemerintah (government). Rencana Aksi Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Aksi Kegiatan Road Map SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
						2022	2023	2024	2025	2026	
STRATEGI 1 : MEMBANGUN BASIS DATA INOVASI DAERAH											
1. Tersusunnya Kerangka Umum dan Bisnis melalui inventarisasi, regulasi dan insentif yang mendukung Perdagangan dan Jasa	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	Semua PD tekait
	2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Kearsipan
	3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	50	55	60	65	70	75	PD Penanaman Modal
	4	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal	%	50	50	55	60	65	75	PD Penanaman Modal
	5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	3.5 skala 4	PD Penanaman Modal
	6	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahaan Yang Dihadapi Pelaku Usaha	%	60	50	45	38	35	25	PD Penanaman Modal

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
	7	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase layanan Publik Dan Layanan Administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	70	75	80	85	90	90	PD Komunikasi dan Informatika
	8	Program Aplikasi Informatika	Presentase Pemanfaatan Aplikasi elektronika dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat	%	60	65	70	75	80	85	PD Komunikasi dan Informatika
	9	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Data Statistik Sektoral	%	70	73	76	79	82	85	PD Komunikasi dan Informatika
	10	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Kearsipan
	11	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Penerbitan Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	100	100	100	100	100	PD Urusan Kearsipan
	12	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	PD Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
	13	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	100	100	100	PD Pariwisata

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
	14	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Ketersediaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	15	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
	16	Program Aplikasi Informatika	Presentase Pemanfaatan Aplikasi elektronika dalam Tugas Pemerintahan dan Layanan Masyarakat	%	60	65	70	75	80	85	PD Komunikasi dan Informatika
	17	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga kerja
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	
	18	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Ternate	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga kerja
	19	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Data. Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	80	90	90	90	90	95	PD Administrasi Kependudukan dan Capil serta PD yang Terkait
			Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	23	78	85	93	100	100	
STRATEGI 2 : MENYUSUN REGULASI YANG MENDUKUNG INOVASI											
	1	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%	100	100	100	100	100	100	PD Penanaman Modal

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
	2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	3	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
STRATEGI 3 : MENGEMBANGKAN MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG KEGIATAN YANG INOVATIF											
	1	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Ketersediaan Penerbitan IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	3	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Ketersediaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	%	100	100	100	100	100	100	PD Perindustrian
	4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
STRATEGI 4 : MELAKSANAKAN KEGIATAN LITBANG BERSAMA YANG DAPAT MENGUATKAN JEJARING ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN											
2. Menguatnya Kerjasama Dan Sinergisitas Antara Lembaga	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di	%	30	30	35	35	40	40	

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
Litbang Pemerintah, Swasta, Lembaga Akademik, Dan Masyarakat Dengan UMKM/ Pelaku Usaha			Daerah								
	2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Orang	300	350	400	450	500	550	PD Pariwisata
	3	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
STRATEGI 5 : MEMBANGUN SISTEM DIFUSI INOVASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN FORUM KOMUNIKASI ANTARPEMANGKU KEPENTINGAN											
3. Meningkatnya difusi inovasi antarpemangku kepentingan dengan penggunaan teknologi informasi	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	%	50	55	60	65	70	75	PD Penanaman Modal
	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Diberikan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pertanian
	4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Orang	300	350	400	450	500	550	PD Pariwisata
	5	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase layanan Publik Dan Layanan Administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	70	75	80	85	90	90	PD Komunikasi dan Informatika
	6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	100	100	100	PD Pariwisata

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
	7	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari	2	2	3	3	4	4	PD Pariwisata
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2	2	3	3	4	4	
	8	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
STRATEGI 6 : MENUMBUHKAN PRAKARSA KREATIVITAS PENEMUAN BARU MELALUI PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL HINGGA TINGKAT AKAR RUMPUT											
4. Menguatnya budaya inovasi melalui pengembangan kewirausahaan	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pemuda dan Olah Raga
	3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari	2	2	3	3	4	4	PD Pariwisata
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2	2	3	3	4	4	
	4	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	PD Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
	5	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga Kerja
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	
	6	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Ternate	%	100	100	100	100	100	100	PD Tenaga Kerja
	7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	PD Sekretariat Daerah
	8	Program	Persentase Pengendalian	%	5,5	11	16	16	22	22	PD

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup								Lingkungan Hidup
STRATEGI 7 : MEMBANGUN SISTEM APRESIASI KREATIVITAS YANG INOVATIF											
	1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	80	80	85	85	90	90	PD Litbang atau Perencanaan
			Presentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	30	30	35	35	40	40	
	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pemuda dan Olah Raga
STRATEGI 8 : MEMBANGUN PENGUATAN KELEMBAGAAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL MELALUI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI ANTARLEMBAGA											
5. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan yang mendorong kemandirian dan pengembangan inovasi klaster usaha	1	Program Pengembangan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala Mikro	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
	2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
	3	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	Orang	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	PD Pariwisata
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
	4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-Rata Lama Tinggal Wisata Asing	Hari	2	2	3	3	4	4	PD Pariwisata
			Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2	2	3	3	4	4	
	5	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Persentase Peningkatan Investasi	%	50	55	60	65	70	75	PD Penanaman Modal

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
		Modal									
	6	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal	%	50	50	55	60	65	75	PD Penanaman Modal
	7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	PD Sekretariat Daerah
	8	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	PD Sekretariat Daerah
STRATEGI 9 : MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR FISIK YANG BERSTANDAR INTERNASIONAL											
6. Berkembangnya inovasi layanan pariwisata dan jasa pendukung industri yang berdaya saing dan berkualitas internasional	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	%	100	100	100	100	100	100	PD Perdagangan
	2	Program Pengembangan Ekspor	Presentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	%	100	100	100	100	100	100	PD Perdagangan
	3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan Pelaksanaan Promosi Pemasaran. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	100	100	100	100	100	100	PD Perdagangan
	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	%	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	99,7	PD PUPR
	5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan Permukiman rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan	%	55,5	60	65	70	75	80	PD PUPR

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
			Kabupaten/Kota (IKK Outcome)								
	6	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kota Ternate Yang Terbangun	Km	319.789	319.816	319.843	319.870	319.897	319.924	PD PUPR
	7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas	%	70	75	85	87	90	100	PD Perhubungan
	8	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Standar Keselamatan Pelayaran	%	80	80	80	80	80	80	PD Perhubungan
	9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah Rumah tangga yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah domestik	%	89,34	89,5	89,75	90	90,25	90,5	PD PUPR
	10	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penyelenggaraan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbaya dan beracun (LB3)	%	100	100	100	100	100	100	PD Lingkungan Hidup
	11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	%	-	50	100	100	100	100	PD PUPR
	12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	%	5,13	6,41	7,69	8,97	10,26	11,54	PD PUPR
	13	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	9,4	9,51	9,62	9,73	9,84	9,95	PD Lingkungan Hidup

Sasaran	No	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja					Perangkat Daerah (PD)
	14	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	12,6	13	14	14,4	15	15	PD Lingkungan Hidup
STRATEGI 10 : MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN JASA											
	1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	%	100	100	100	100	100	100	PD Perdagangan
	2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	PD Koperasi dan UKM
	3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	PD Pendidikan
	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	100	100	100	PD Pariwisata
	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Orang	300	350	400	450	500	550	PD Pariwisata

BAB VII
PENUTUP

Roadmap SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 yang telah disinkronkan dengan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang berisi kebijakan Road Map sistem inovasi yang memuat kebijakan umum dan program dengan pendekatan Road Map sistem inovasi di Kota Ternate tahun 2021-2026 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026.

Rumusan kebijakan inovasi dalam Roadmap SIDa Kota Ternate mengacu kepada prinsip-prinsip: untuk peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tiada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Diharapkan Roadmap SIDa Kota Ternate Tahun 2021-2026 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Pelaksanaan Roadmap SIDa Tahun 2021-2026 menjadi tanggungjawab bersama di antara Pemerintah, swasta/dunia usaha, akademisi/Pakar, dan masyarakat Kota Ternate.

WALIKOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN